

**IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN PROGRAM
DESA WISATA DI DESA GUNUNGSARI KOTA BATU**

(Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kota Batu)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

FIRA KATILLA

NIM. 135030101111164



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2017**

MOTTO

Do Something Different, If You Want Something Different

(Fira Katilla)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Pengembangan Program Desa Wisata di Desa
Gunungsari Kota Batu (Studi Pada Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah Kota Batu)

Disusun oleh : Fira Katilla

NIM : 135030101111164

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Prodi : Administrasi Publik

Malang, 26 Januari 2017

Komisi Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing



Dr. Sarwono, M.Si
NIP. 19570909 198403 1 002

Anggota Komisi Pembimbing



Drs. Heru Ribawanto, MS
NIP. 19520911 197903 1 002

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 07 Maret 2017

Jam : 09.00

Skripsi atas nama : Fira Katilla

Judul : Implementasi Pengembangan Program Desa Wisata di Desa Gunungsari Kota Batu (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu)

Dan dinyatakan lulus

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Sarwono, M.Si
NIP. 19570909 198403 1 002

Anggota



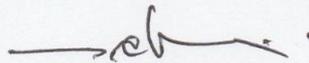
Drs. Heru Ribawanto, MS
NIP. 19520911 197903 1 002

Anggota



Dr. Drs. Mochamad Rozikin, MAP
NIP. 19630503 198802 1 001

Anggota



M. Chazeinul Ulum S, Sos, MPA
NIP. 19740614 200501 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang,



Nama : Fira Katilla

NIM : 135030101111164

RINGKASAN

Fira Katilla, 2017, **Implementasi Pengembangan Program Desa Wisata di Desa Gunungsari Kota Batu (Studi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu)**, Dosen Pembimbing : Dr. Sarwono, M.Si dan Drs. Heru Ribawanto, MS

Program desa wisata ini dilaksanakan sebagai salah satu wisata untuk peningkatan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi alami yang ada melalui bidang pariwisata agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan wisata modern dan lingkungan sekitarnya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana implementasi pengembangan program desa wisata di Desa Gunungsari dan untuk mendeskripsikan serta menganalisis apa saja tantangan dan memberikan inovasi baru dalam implementasi pengembangan program desa wisata di Desa Gunungsari.

Jenis penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yakni pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara langsung dan dokumentasi kepada pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu dan masyarakat desa wisata Desa Gunungsari

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa selama pengamatan penulis, implementasi pengembangan program desa wisata ini melibatkan pemerintah Kota Batu dan masyarakat desa wisata setempat dan menggunakan model implementasi George. C Edward terdapat empat faktor yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Aktor yang terlibat antara lain Pemerintah Kota Batu, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan masyarakat Desa Gunungsari Kota Batu. Terdapat beberapa tantangan, yaitu harga pupuk yang tidak stabil, pengembangan yang monoton, belum adanya wisata yang memiliki nilai untuk edukasi, sarana dan prasarana yang belum memadai. Selain itu terdapat jalan yang masih sulit untuk dilalui kendaraan besar. Wawasan masyarakat untuk mengembangkan program desa wisata di Desa Gunungsari ini masih kurang. Inovasi baru dibutuhkan untuk pengembangan program desa wisata, agar para wisatawan tertarik untuk berwisata di desa Gunungsari.

Saran untuk pengembangan program desa wisata ini adalah menambah pengetahuan atau wawasan masyarakat setempat bahwa potensi daya tarik yang ada di desanya berpeluang untuk meningkatkan perekonomian mereka, diperlukan adanya promosi lebih untuk lebih mengenalkan desa wisata, meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan wisatawan dalam melakukan kegiatan wisata, dan menciptakan inovasi pengembangan program baru.

SUMMARY

Fira Katilla, 2017, **Implementation of program development village tourism in Gunungsari Village Batu City** (Study in Agency for Development Planning, Local Research and Development Batu City), Advisor : Dr. Sarwono, M.Si and Drs. Heru Ribawanto, MS

Tourist village program was implemented as one of the tours to improving the local economy by utilizing existing natural potentials through the tourism sector in order to avoid the development gaps modern travel and the surrounding environment. The purpose of the study is to examine and describe how the implementation of program development of rural tourism in the village Gunungsari and to describe and analyze what are the challenges and provide new innovations in the implementation of program development of rural tourism in the village Gunungsari.

This type of research is using qualitative research with descriptive approach to the analysis developed by Miles and Huberman namely data collection, condensation, data presentation and conclusion. Collecting data using observation, interviews and documentation to employees Development Planning Agency, Regional Research and Development Batu and village tourism village community Gunungsari

The results of this study indicate that during the author's observation, the implementation of this tourist village development program involving government Batu and village communities and the local travel using George implementation model. C Edward, there are four factors namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Actors involved include Batu City Government, the Agency for Development Planning, Regional Research and Development Kota Batu, the Department of Tourism and Culture and the villagers Gunungsari Kota Batu. There are several challenges, namely the price of fertilizer is not stable, the development of the monotony, lack of travel that has value for education, infrastructure and facilities are inadequate. In addition there is a road that is still difficult to pass a large vehicle. Insights community to develop programs in the village Gunungsari tourist village is still lacking. New innovations required for the development of rural tourism program, so that tourists are interested to tour the village Gunungsari.

Suggestions for program development of rural tourism is increasing knowledge or insight into the local community that the potential appeal in her village the opportunity to improve their economy, needed more promotion to introduce the tourist village, improve facilities and infrastructure that takes tourists in tourism activities, and create innovative new program development.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul *"Implementasi Pengembangan Program Desa Wisata di Desa Gunungsari Kota Batu (Studi Pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Batu)"* dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Dr. Sarwono, M.Si selaku pembimbing I dan Drs. Heru Ribawanto, MS selaku pembimbing II yang dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, yakni Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS. Dan Ketua Program Studi Ilmu Administrasi yakni Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di program S1 Ilmu Administrasi Publik.

2. Bapak Sariono, Bapak Rizaldi dan Bapak Andi Susilo yang selalu dengan tangan terbuka membantu penulis dalam penelitian di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Batu dan masyarakat Desa Gunungsari sehingga penulis mendapatkan data yang sesuai.
3. Kedua orang tua penulis, Fadehi Irianto, SH ayahku tercinta dan Elma Suzanna, SH ibuku tercinta terimakasih yang tak terhingga telah memberikan dukungan materil dan memberikan semangat penuh untuk penyusunan skripsi ini serta dengan senang hati meluangkan waktu untuk bertukar pikiran mengenai isi skripsi ini dan mendukung untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Kalian motivasiku.
4. Kakak-kakaku tersayang Susan Salicka dan Gabby Tachana dan adikku Harry Fauzaan yang telah memberikan dorongan semangat untuk segera menyelesaikan kuliah dan yang selalu menemani saat penulis mengerjakan skripsi ini.
5. Keluargaku tercinta Tante Elmi, Om Rusdi, Tante Novi, Om Asril, Tante Yuyun dan Om Beni yang telah berjasa sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah tepat pada waktunya.
6. Teman-temanku Anty, Gading, Yunita, Edo, Sukma Mukti, Rindi, Sundoro yang selalu menemani penulis saat butuh hiburan. Dan teman-teman yang selalu hadir yaitu Angel, Rini, Rifaldi, Syafrian, serta yang lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah amat sangat antusias dalam hal menyemangati sesama teman yang mengerjakan skripsi. Terimakasih banyak atas waktu dan bantuan kalian semua.

Demi kesempurnaan skripsi ini, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan wacana akademik dan dapat berguna pula bagi Pemerintah Kota Batu beserta Masyarakatnya sebagai masukan. Semoga partisipasi berbagai pihak mendapat balasan yang setimpal dari-Nya. Amin .

Malang, 01 Februari 2017

Fira Katilla

DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kontribusi Penelitian	13
E. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kebijakan publik	
1. Pengertian Kebijakan Publik	17
2. Tahapan dalam Perumusan Kebijakan Publik	20
B. Implementasi Kebijakan Publik	
1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	22
2. Implementasi Program	24
3. Tahapan Implementasi Kebijakan	28



4. Model-model Implementasi kebijakan publik	31
5. Faktor Penghambat dan Pendukung implementasi	42
C. Pariwisata	
1. Pengertian Pariwisata	44
2. Peranan Pariwisata dalam Pembangunan	46
D. Desa Wisata	47
E. Inovasi Sektor Publik	
1. Pengertian Inovasi.....	51
2. Atribut Inovasi	53
3. Tipologi dan dimensi inovasi sektor publik.....	54
4. Arti Penting Inovasi	56

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	57
B. Fokus Penelitian	58
C. Lokasi dan Situs Penelitian	59
D. Jenis dan Sumber Data	60
E. Teknik Pengumpulan Data	60
F. Instrumen Penelitian	63
G. Analisis Data	63

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kesimpulan Data	
1. Gambaran Umum Kota Batu	67
2. Gambaran Umum Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Batu	74
3. Gambaran Umum Desa Gunungsari	76
B. Kesimpulan Data Fokus	
1. Implementasi Program Desa Wisata di Desa Gunungsari Kota Batu.....	78
a. Implementasi Pengembangan Program Desa Wisata di Desa Gunungsari Kota Batu	78
b. Aktor-aktor dalam Implementasi Pengembangan Program Desa Wisata di Desa Gunungsari Kota Batu	92
2. Tantangan Dalam Pengembangan Program Desa Wisata di Desa Gunungsari Kota Batu	94
3. Inovasi Pengembangan Program Desa Wisata di Desa Gunungsari Kota Batu	103
a. Inovasi Untuk Pengembangan Program Desa Wisata di Desa Gunungsari Kota Batu	104

C. Pembahasan

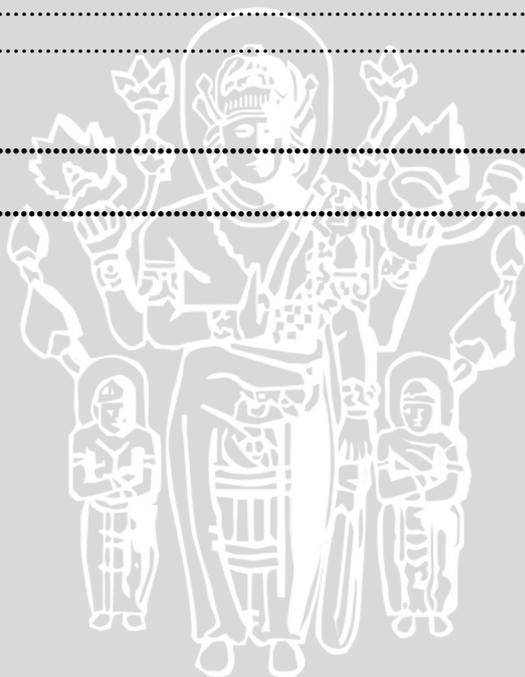
1. Implementasi Pengembangan Program Desa Wisata di Desa Gunungsari Kota Batu	109
a. Implementasi Pengembangan Program Desa Wisata di Desa Gunungsari Kota Batu.....	109
b. Aktor-aktor dalam Implementasi Pengembangan Program Desa Wisata di Desa Gunungsari Kota Batu	119
2. Tantangan Pengembangan Program Desa Wisata di Desa Gunungsari Kota Batu	120
3. Inovasi Pengembangan Program Desa	128
a. Inovasi Baru Untuk Pengembangan Program Desa Wisata Desa Gunungsari Kota Batu.....	130

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	137
B. Saran	138

DAFTAR PUSTAKA 140

LAMPIRAN..... 142



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rencana Pola Ruang di Kota Batu	5
Tabel 3.1 Teknik Pengumpulan Data.....	62



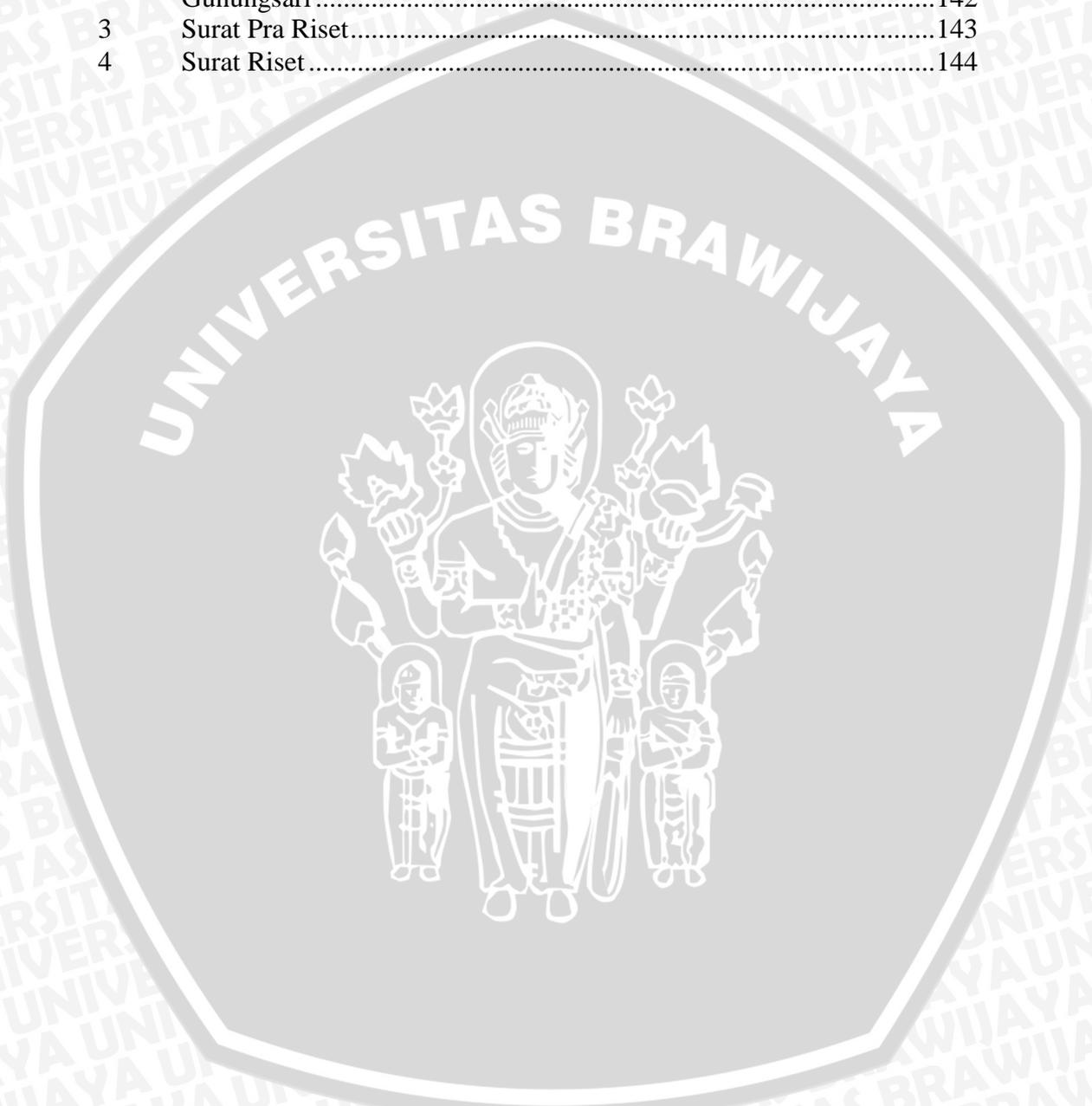
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Siklus skematis kebijakan publik	18
Gambar 2.2 Sekuensi Implementasi Kebijakan	29
Gambar 2.3 Model Implementasi Kebijakan George C. Edward	39
Gambar 4.1 Peta Kota Batu.....	68
Gambar 4.2 Struktur organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah ...	75
Gambar 4.3 Peta Desa Gunungsari Kota Batu	77
Gambar 4.4 Perkebunan bunga mawar desa Gunungsari Kota Batu	81
Gambar 4.5 Kondisi jalan menuju desa Gunungsari yang hanya bisa dilalui kendaraan pribadi	100
Gambar 4.6 Hasil panen bunga mawar di desa Gunungsari	117
Gambar 4.7 Kondisi jalan menuju desa wisata, desa Gunungsari Kota Batu	125
Gambar 4.8 Contoh Wisata Siang dan Malam Hari “ <i>The Garden Of The Morning Calm</i> ”	131-132
Gambar 4.9 Skema implementasi pengembangan program desa wisata di Desa Gunungsari Kota Batu.....	136



DAFTAR LAMPIRAN

1	Wawancara dengan Bapak Sariono Kepala Sub Bidang Pariwisata dan Pertanian.....	142
2	Wawancara dengan Ibu Yulianti Petani dan Pengusaha Mawar Desa Gunungsari	142
3	Surat Pra Riset.....	143
4	Surat Riset.....	144



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat besar yang dihuni oleh bermacam-macam ras, suku, dan etnis yang berbeda-beda. Setiap daerah tersebut memiliki keunggulan masing-masing termasuk potensi alamnya. Hal ini tentunya sangat menguntungkan dalam bidang kepariwisataan. Dengan begitu banyak potensi alam yang dimiliki tersebut akan menarik banyak para wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia dan akan memberikan keuntungan tersendiri bagi Negara. Potensi kekayaan alam ini dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan kegiatan perekonomian negara dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Semua kekayaan alam yang dimiliki Indonesia merupakan aset yang tak ternilai. Seluruh kekayaan alam yang melimpah tersebut dapat dikelola dan diperuntukkan bagi kelangsungan dan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan dasar terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Tanah yang subur menjadi salah satu faktor sehingga segala jenis tanaman dapat tumbuh baik didukung dengan iklim tropisnya. Semua kekayaan alam dan hayati merupakan aset yang tidak ternilai. Kekayaan daratan dan perairan baik perairan darat maupun perairan laut ini sudah selayaknya dilestarikan. Pelestarian alam dan sumber daya hayati ini secara berkelanjutan dalam jangka panjang sangat penting, karena kelestarian hidup di masa depan bergantung pada kelestarian alam dan lingkungan.

Sehubungan dengan upaya-upaya pelestarian itu, Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan berbagai upaya guna melindungi kekayaan alam yang luar biasa ini melalui berbagai kebijakan dan kerja sama dengan berbagai kelompok masyarakat, baik nasional maupun internasional.

Dalam rangka mewujudkan kondisi masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut maka adanya upaya pemerintah, salah satunya yaitu dengan melaksanakan pembangunan. Pembangunan merupakan upaya agar pertumbuhan dan perubahan yang berencana kepada setiap masyarakatnya dapat merata dan berkelanjutan. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang secara merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila, serta bahwa hakekat pembangunan Nasional adalah pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dengan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada hakekatnya pembangunan nasional merupakan serangkaian upaya yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Sebagai negara yang menganut sistem desentralisasi, setiap daerah otonom di negara ini memiliki kewenangan dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memutuskan bahwa hak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung

jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Pemerintah Daerah di era otonomi daerah memiliki peranan yang lebih besar dalam upaya-upaya pelestarian kekayaan hayati ini harus lebih banyak lagi melibatkan partisipasi masyarakat daerahnya. Hal ini karena perencanaan pembangunan daerah perlu dilakukan secara terintegrasi pada semua sektor, sehingga diperoleh manfaat yang lebih besar dari berbagai potensi ekonomi daerah. Selain itu, perencanaan yang terintegrasi juga akan mengurangi dampak-dampak yang tidak diharapkan baik pada saat ini maupun yang akan datang. Sehingga setiap daerah dituntut untuk bersaing secara kompetitif untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengelola dan menggali serta mengembangkan potensi daerahnya khususnya pertanian, kelautan, industri, dan pariwisata guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang menyentuh dan melibatkan masyarakat sehingga dapat membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat. Pariwisata telah menjadi sektor industri besar yang mampu menghidupkan roda perekonomian suatu daerah, bahkan memberikan asupan yang fundamental bagi postur keuangan negara, modal, tenaga kerja, teknologi dan manajemen dalam sektor ini memberikan andil yang signifikan dalam

pengembangan pembangunan. Hal ini menjadikan pariwisata dapat dijadikan sebagai tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Menurut PERMEN Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 26 Tahun 2010 tentang pedoman umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri pariwisata menyatakan bahwa melalui desa wisata yang berisikan tentang konsep, strategi, tahapan program dan pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata dalam rangka membangun kesadaran masyarakat dan penguatan kelembagaan, sehingga masyarakat dapat menjadi pelaku pariwisata. Kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata difokuskan pada pengembangan wilayah sasaran yang memiliki keterkaitan fungsi dan pengaruh dengan unsur daya tarik wisata berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia maupun fasilitas usaha pariwisata di desa pariwisata. Tujuan utama PNPM Mandiri Pariwisata adalah meningkatkan kemampuan, menciptakan lapangan kerja dan usaha masyarakat di sektor pariwisata dan sasaran kegiatan adalah :

1. Meningkatnya kapasitas Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) di desa/kelurahan dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi serta kemandirian masyarakat dalam bidang kepariwisataan
2. Tersedianya dokumen perencanaan desa/kelurahan (RPJM) program penanggulangan kemiskinan melalui sektor pariwisata
3. Meningkatnya kapasitas kemampuan berusaha dan berkarya masyarakat di desa wisata dan sekitarnya, yang mencakup wilayah pedesaan atau komunitas masyarakat yang memiliki hubungan atau keterkaitan fungsi dan peran (sebagai objek pendukung, pemasok bahan baku, pemasok logistik dan lain sebagainya), sehingga masyarakat miskin yang berdomisili di sekitar daya tarik wisata atau pusat-pusat kegiatan pariwisata dan budaya tersebut dapat meningkatkan kesejahteraannya
4. Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dan berpihak kepada masyarakat miskin, dan

5. Terwujudnya kemitraan atau kerjasama LKM dengan pemangku kepentingan untuk menunjang pembangunan kepariwisataan di desa wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan pariwisata di Kota Batu ini memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi selaras, seimbang, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan perlu disusun Rencana Tata Ruang dan Wilayah dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan antara pembangunan pariwisata dan lingkungan sekitarnya.

Tabel 1.1 Rencana Pola Ruang di Kota Batu

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Penggunaan Lahan (%)
1.	Hutan Lindung	3.563,30	17,90
2.	Kawasan Taman Hutan Raya R Suryo	5.342,50	26,84
3.	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.777,70	8,93
4.	Kawasan Hutan Produksi	2.521,70	12,67
5.	Kawasan Pertanian	4.018,50	20,19
6.	Kawasan Perumahan	2.104,00	10,57
7.	Kawasan Perdagangan dan Jasa	172,70	0,87
8.	Kawasan Perkantoran dan Pelayanan Umum	129,70	0,65
9.	Industri dan Pergudangan	26,70	0,13
10.	Kawasan Pariwisata	206,00	1,03
11.	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	45,90	0,23

Sumber : RTRW Kota Batu 2010-2030

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kawasan pariwisata termasuk di dalam tata ruang dan wilayah di Kota Batu. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini seperti yang dikatakan menurut Nugroho (2009:73) kebijakan publik dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk pidato pejabat ataupun berupa program dan tindakan yang dilakukan pemerintah. Dalam hal ini kebijakan pemerintah dikeluarkan dalam bentuk program yaitu desa wisata yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030 yaitu kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sektor unggulan pariwisata diarahkan untuk wisata hidup bersama masyarakat yang meliputi desa wisata, wisata agro serta wisata petualangan alam.

Pada saat ini, Kota Batu merupakan salah satu kota di Indonesia yang sukses dengan pengembangan konsep desa wisata. Jenis wisata yang terdapat di Kota Batu antara lain adalah wisata agro, wisata alam, wisata budaya, wisata rekreasi, wisata minat khusus, wisata sejarah, wisata religi, wisata ziarah, wisata husada dan wisata kuliner. Selain itu Kota Batu juga merupakan salah satu sentra pariwisata di Jawa Timur dengan skala nasional maupun internasional. Oleh sebab itu, sebagai kota dengan tujuan wisata makan perkembangan di Kota Batu berjalan begitu pesat dengan ditandai dengan investasi yang terus berkembang bukan hanya pada objek wisata nya saja tetapi juga di jasa usaha pariwisata, perdagangan-jasa dan kegiatan yang lain. Berdasarkan laporan pendahuluan Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2016 perkembangan investasi di sektor pariwisata dan

pendukungnya dalam jangka lima tahun terakhir ini berkembang dengan pesat, antara lain :

- a. Objek wisata seperti museum satwa di Oro-oro Ombo, BNS di desa Oro oro Ombo, desa wisata, alun-alun Kota Batu dan lain sebagainya.
- b. Usaha jasa wisata seperti hotel singhasari di jalan raya Beji, hotel paradise di jalan Diponegoro, hotel dan sarana rekreasi *wonderland* di 4 jalan Agus Salim, *resort* jambuluwuk di Senggokerto dan lain sebagainya.
- c. Perdagangan dan jasa seperti Batos di jalan Diponegoro, BTC di jalan Kartini dan lain sebagainya.
- d. Nilai pertumbuhan investasi khususnya sektor *Mice* yang terkait dengan kepariwisataan, baik objek wisata, hotel/villa dan restoran maupun pusat perbelanjaan dan kuliner pada tahun 2013 telah mencapai sekitar Rp. 720.000.000.000.
- e. Pertumbuhan kunjungan wisatawan yang datang ke Kota Batu dalam lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang drastis. Berdasarkan data terakhir tahun 2014 telah mencapai dua juta wisatawan.

Berdasarkan data diatas begitu pesatnya perkembangan pariwisata di Kota Batu, maka diperlukan tolak ukuran *riil* sehingga perkembangan sektor pariwisata dan kegiatan pendukungnya dapat tertata dan terbangun sesuai dengan kebutuhan. Apabila perkembangan pariwisata beserta pendukungnya tidak tertata dan terkendali dengan baik dan terarah maka akan berdampak pada keseimbangan lingkungan akan terganggu akibatnya pembangunan yang tidak tertata, selain itu minat wisatawan akan berkurang akibat semakin banyak tempat yang tidak nyaman untuk berwisata di Kota Batu. Kemudian, jika perkembangan pariwisata tidak dikendalikan dengan baik, maka untuk kedepannya akan berakibat pada objek wisata Kota Batu tidak lagi diminati atau bahkan akan ditinggalkan oleh wisatawan. Terdapat beberapa objek daya tarik wisata yang sangat berpotensi untuk dikembangkan diantaranya Wisata Alam (Air Terjun/ Coban Talun dan Coban Rais, Pemandian Air Panas Cangar dan Songgoriti, Tahura, dsb); Wisata Agro dan Wisata Bunga (Kusuma Agro Wisata, Sidomulyo); WisataSejarah (Candi

Songgoriti, Goa Jepang, *Heritage*), Wisata Budaya (Sedekah Bumi, Kesenian Tradisi, Masjid An-Nur, Gereja Tua Jago, Vihara Budha Kertarajasa, Klenteng Dewi Kwam Im Thong, Makam Mbah Wastu, dsb); Wisata Rekreasi (*Jatim Park 1 dan 2*, BNS, Songgoriti, *Selecta*, dsb); Wisata Minat Khusus/*Hobbies* (Paralayang, Arung Jeram, Sepeda Gunung); dan Wisata Kuliner serta Wisata Kerajinan.

Saat ini yang mendapat perhatian dari pemerintah setempat adalah desa wisata. Desa wisata dapat diwujudkan dalam gaya hidup dan kualitas hidup masyarakat setempat. Keaslian desa wisata dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, fisik dan sosial daerah pedesaan tersebut seperti misalnya ruang, warisan budaya, kegiatan pertanian, bentangan alam, pariwisata sejarah dan budaya, serta hal-hal yang unik dan eksotis khas daerah. Terdapat prinsip desa wisata yaitu sebagai salah satu produk wisata alternatif yang dapat memberikan pembangunan pedesaan, prinsip-prinsip tersebut adalah memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat, menguntungkan masyarakat setempat, berskala kecil untuk memudahkan terjalinnya hubungan timbal balik dengan masyarakat setempat, melibatkan masyarakat setempat, dan menerapkan pengembangan produk pedesaan. Program desa wisata ini pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya, sehingga terdapat *output* yang bermanfaat dari program tersebut dan dapat dirasakan bagi masyarakat daerah tersebut seperti yang dikatakan menurut Lester dan Stewart Jr yang dikutip oleh Agustino (2008:139) “keberhasilan sebuah implementasi kebijakan dapat diukur dari proses dan pencapaian output yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih”.

Berdasarkan prinsip tersebut desa wisata adalah salah satu cara untuk masyarakat sekitar dapat meningkatkan perekonomian melalui desa wisata tersebut. Masyarakat dapat berkreasi untuk meningkatkan potensi-potensi yang terdapat di desa tersebut. Kreativitas, inovasi dan kemandirian diharapkan akan dimiliki oleh setiap daerah, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat. Selama ini pembangunan dilaksanakan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah belum mencerminkan tingkat pemberdayaan daerah secara optimal. Pembangunan yang dilaksanakan terkadang tidak sesuai atau tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.

Salah satu desa yang cukup berhasil dalam pengembangan desa wisata adalah Desa Gunungsari. Sebagai salah satu desa wisata yang berpotensi di Kota Batu, Desa Gunungsari tentu saja telah memberikan banyak kontribusi yang tidak sedikit bagi masyarakat setempat. Objek wisata ini menawarkan suasana alam pedesaan yang mengingatkan wisatawan akan nuansa alami dan tradisional. Desa wisata merupakan program pemerintah Kota Batu yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakatnya dengan memanfaatkan potensi pertanian dan peternakan yang dimiliki. Menurut hasil wawancara dari Bapak Andi Susilo selaku Kepala Desa, Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji Kota Batu pada tanggal 03 Oktober 2016 di Kantor Kepala Desa, Desa Gunungsari Kota Batu menyatakan bahwa :

“Terbentuknya desa wisata di desa gunungsari ini bermula dari tahun 2012. Desa Gunungsari sendiri mempunyai beberapa potensi yang memiliki nilai tinggi. Yang menjadi andalan Desa Gunungsari ini adalah petik mawarnya. Selain itu juga ada perah sapi, *hiking*, air terjun, peternakan kelinci dan petik jeruk. Untuk kedepannya mau dibentuk organisasi baru untuk mengoptimalkan Pokdawis atau (Kelompok Desa Wisata), lalu melengkapi

sarana dan prasarana, karena sarana dan prasarana di Desa Gunungsari ini masih kurang memadai. Program desa wisata ini diharapkan dapat membantu mengembangkan potensi lain yang ada di wilayah tersebut sehingga kegiatan ini dapat memberdayakan masyarakat setempat”

Program desa wisata di Desa Gunungsari ini sudah dimulai sejak tahun 2012, hingga sekarang memiliki 17 kelompok tani yang merupakan petani mawar, ternak dan sayur. Masyarakat khawatir akan nasib desanya untuk masa depan akhirnya bermusyawarah dan terbentuklah desa wisata di Desa Gunungsari ini. Sebagai desa wisata yang ditunjang oleh pesona alamnya yang luar biasa dan memiliki sumber tanah yang subur. Desa Gunungsari memiliki posisi geografi yang strategis. Desa Gunungsari merupakan desa yang terkenal dengan petik mawar, pertanian sayur dan peternakan sapi perah. Sejak tahun 2005 hingga sekarang Desa Gunungsari terkenal dengan Desa penghasil bunga mawar potong. Produksi bunga mawar potong dari desa Gunungsari dipasarkan ke berbagai daerah, bahkan sampai keluar pulau Jawa, misalnya ke Ujung Pandang, Medan, Bali dan daerah-daerah lainnya. Potensi keberadaan produk unggulan yang ada di desa Gunungsari adalah pertanian yang berupa sayur mayur dan bunga mawar potong. Khusus untuk bunga mawar potong. Gunungsari dikenal sebagai penghasil bunga mawar terbesar di Indonesia. Dengan adanya pertanian bunga mawar potong, kehidupan warga Desa Gunungsari mulai terangkat ekonominya. Luas wilayah Desa Gunungsari mencapai 318,833 ha (4,106 km²)², dengan batas-batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Desa Punten Kecamatan Bumiaji, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sumberejo Kecamatan Batu, sebelah barat berbatasan dengan Desa Pandesari Pujon, Sebelah Timur Sidomulyo Batu.

Desa Gunungsari yang berada di lereng Gunung Banyak ini memiliki suhu yang dingin sehingga jenis tanaman hias bersuhu dingin dapat berkembang subur dengan warna-warni yang menghiasi udara sejuk, begitu juga hasil pertanian yang melimpah seperti apel, jeruk, sehingga masyarakat sekitar mendukung dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui potensi alam yang akan dikembangkan menjadi desa wisata oleh pemerintah setempat. Terdapat beberapa fasilitas yang terdapat di Dusun Gunungsari yang telah dikembangkan oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Fasilitas-fasilitas tersebut adalah *hiking*, petik buah, petik bunga, wisata air terjun, *rafting*, perah sapi, peternakan kelinci. Hal ini menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam program desa wisata ini telah berjalan dengan baik. Menurut hasil wawancara dari Bapak Sariono Kepala Sub Bidang Pariwisata dan Pembangunan pada tanggal 11 Oktober 2016 di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu menyatakan bahwa :

“Terbentuknya desa wisata di desa gunungsari ini bermula sejak Kota Batu di dijadikan sebagai kota wisata. Melihat banyak nya potensi yang di miliki berbagai desa di Kota Batu ini, pemerintah setempat mulai membentuk program Desa Wisata, terutama pada Desa Gunungsari yang memiliki khas bunga potongnya yaitu bunga mawar yang sudah dikenal sampai ke Bali, Bandung dan masih banyak lagi. Program ini akan di laksanakan sampai akhir Desember tahun 2017. Sampai ini, program desa wisata di Desa Gunungsari ini sudah mencapai 90% dari target yang ingin dicapai. Sisa 10% nya sedang kami usahakan sampai di tahun 2017 nanti.”

Pada saat ini dibutuhkan upaya pengembangan program desa wisata agar mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. Pengembangan sektor pariwisata merupakan suatu hal yang sangat perlu dilakukan oleh pemerintah daerah agar daerah tersebut dapat berkembang dan mandiri dengan potensi yang

dimiliki daerah tersebut. Dalam melakukan pengembangan program desa wisata di Kota Batu sangat dibutuhkan berbagai pendukung untuk memperlancar kegiatan. Antara lain sumber daya manusia yang berkualitas, adanya dana yang cukup memadai, didukung sarana dan prasarana serta kebijakan dari pemerintah daerah yang memprioritaskan bidang program desa wisata. Suatu inovasi program yang baru diperlukan agar terciptanya program yang dapat dimanfaatkan bagi masyarakat. Suatu program memiliki tujuan yang khusus dan memiliki produk akhir atau hasil kerja dan memiliki sasaran jadwal serta kriteria yang jelas dalam proses pencapaiannya dan juga memiliki jangka waktu yang dibatasi, dari titik awal hingga titik akhir, tidak berulang-ulang dan kegiatan yang ada selalu berubah selama program tersebut berlangsung (Soeharto 1997:1).

Program dapat dikatakan berhasil apabila program tersebut dapat tercapai, sesuai dengan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan, suatu proses yang dinamis dalam melaksanakan kebijakan, melakukan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu *output* yang sesuai (Van Meter dan Van Horn (1975) yang dikutip oleh Agustino 2008:139). Diperlukan nya berbagai alternatif program, sehingga para wisatawan tidak monoton akan wisata desa tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengembangan program desa wisata di Desa Gunungsari Kota Batu berjalan?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengembangan program desa wisata di Desa Gunungsari Kota Batu?
3. Apa saja inovasi yang dapat dilakukan dalam pengembangan program desa wisata di Desa Gunungsari untuk di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ada, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pengembangan program desa wisata di Desa Gunungsari Kota Batu berjalan.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengembangan program desa wisata di Desa Gunungsari Kota Batu.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis apa saja inovasi yang dapat diterapkan dalam pengembangan program desa wisata di Desa Gunungsari.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak baik secara akademik maupun praktis terhadap pembangunan sumber daya ekonomi lokal. Kontribusi yang diharapkan dapat diberikan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang desa wisata, baik bagi peneliti maupun pembaca, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan implementasi program pengembangan desa wisata di Desa Gunungsari Kota Batu.
- b. Sebagai salah satu bahan kajian Ilmu Administrasi Publik.
- c. Sebagai tambahan referensi bagi peneliti berikutnya yang mempunyai tema atau hampir sama dengan penelitian ini.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Batu dalam mewujudkan program desa wisata, dimana hal ini penting untuk kesejahteraan rakyat.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan sebagai bahan evaluasi mengenai kegiatan mereka dalam meningkatkan taraf hidup dan mewujudkan kesejahteraannya. Sedangkan bagi masyarakat daerah lain dapat digunakan sebagai referensi apabila ingin mereplikasi program desa wisata.

c. Bagi Peneliti Sendiri

Sebagai sarana bagi peneliti untuk memperluas pengetahuan terutama dalam hal praktik-praktik implementasi kebijakan khususnya implementasi program desa wisata.

E. Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan gambaran yang jelas mengenai isi dari penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan secara singkat dalam sistematika penulisan. Secara garis besar, uraian dari sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan pembahasan yang masih bersifat umum yang meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka

Dalam bab ini berisi teori-teori yang berkaitan dengan penulisan skripsi yang nantinya digunakan untuk melandasi pemikiran dalam pembahasan masalah dari penelitian yang dilakukan. Seperti mengenai pengertian implementasi, pariwisata, desa wisata, inovasi sektor publik.

BAB III : Metode Penelitian

Di dalam bab ini diuraikan tentang metode penelitian, jenis penelitian, pemilihan lokasi, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisa data yang dipergunakan.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Di dalam bab ini menjelaskan tentang penyajian data yaitu penggambaran instansi dan lokasi penelitian yang bersangkutan beserta masalah secara kronologis menurut tujuan penelitian, analisis dan interpretasi. Serta implementasi pengembangan program desa wisata, tantangan dalam pengembangan program desa wisata dan inovasi untuk pengembangan program desa wisata di desa Gunungsari Kota Batu.

BAB V : Penutup

Di dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan yang dapat dijadikan pertimbangan dan bermanfaat bagi instansi pemerintah dan masyarakat Kota Batu dalam mengembangkan desa wisata.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

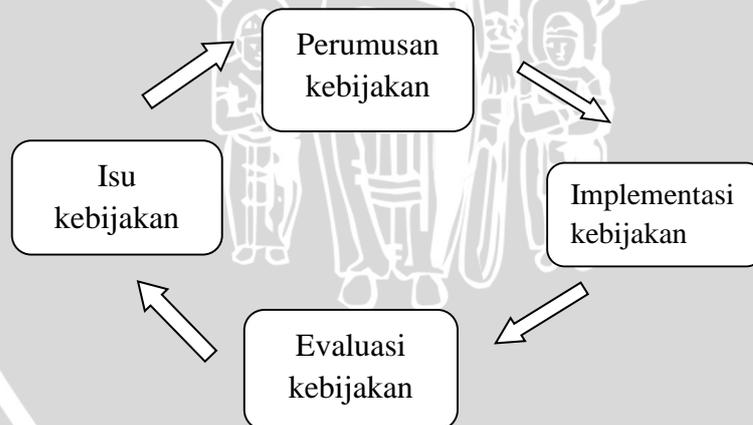
1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Easton dalam Santosa (2009:27) dipandang sebagai tanggapan dari suatu sistem politik terhadap tuntutan yang timbul dari lingkungannya. Kebijakan publik sebagai keputusan yang diambil dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik sesuai dengan norma-norma yang ada pada publik. Ukuran normatifnya adalah keadilan sosial, partisipasi dan aspirasi warga Negara, masalah lingkungan, pelayanan, pertanggungjawaban administrasi dan analisis yang etis. Kebijakan publik pada umumnya merupakan keputusan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, *financial* dan manusia untuk kepentingan publik. Ide kebijakan publik mengandung anggapan bahwa terdapat satu ruang dalam kehidupan yang bukan privat tetapi milik bersama menurut Parson (2006:3).

Terdapat banyak definisi tentang kebijakan publik, sebagian besar para ahli menjelaskan pengertian kebijakan publik berkaitan dengan keputusan pemerintah untuk melakukan tindakan yang membawa dampak baik untuk kehidupan masyarakat. Dalam pengertian secara luas kebijakan publik sering diartikan apa saja yang dilakukan atau yang tidak dilakukan oleh pemerintah, seperti yang dikatakan oleh Edwards dan Sharkansky dalam Islamy (2004:18) “... *is what governments say and do, or do not do, it is the goals or purpose of government program...*” (...)

adalah apa yang dikatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, kebijakan publik itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah).

Selanjutnya juga dikatakan bahwa “kebijaksanaan publik itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk pidato pejabat terus pemerintahan ataupun berupa program dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Nugroho (2009:73) pandangan tradisional mengenai kebijakan publik beranggapan bahwa kebijakan publik hanya berkaitan dengan aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, yang dikaji oleh kebijakan publik menyangkut penilaian dan wilayah yang sangat luas dan tidak identik dengan kelembagaan formal saja. Untuk memahami tentang lingkungan kebijakan publik perlunya diketahui siklus skematis dari kebijakan publik itu sendiri.



Gambar 2.1 Siklus skematis kebijakan publik (Nugroho dalam Public Policy, 2009:157)

Berikut adalah penjelasan dari bagan diatas :

- Isu kebijakan. Disebut isu apabila bersifat strategis, yakni bersifat mendasar, yang menyangkut banyak orang atau bahkan kepentingan bersama, biasanya

berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan oleh orang seorang, dan memang harus diselesaikan. Isu ini diangkat sebagai agenda politik yang diselesaikan. Isu kebijakan terdiri dari dua jenis yaitu problem dan goal. Artinya kebijakan publik dapat berorientasi pada permasalahan yang muncul pada kehidupan publik, dan dapat pula berorientasi pada goal atau tujuan yang hendak dicapai pada kehidupan publik. Pada saat itu, sebagian besar kebijakan publik mengacu pada permasalahan daripada antisipasi ke depan, dalam bentuk *goal oriented policy*, sehingga dalam banyak hal kita melihat kebijakan publik yang berjalan tertatih dibelakang masalah publik yang terus bermunculan dan akhirnya tidak tertangani.

- b. Isu kebijakan publik ini menggerakkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik untuk menyelesaikan masalah. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh warga Negara.
- c. Setelah dirumuskan, kebijakan publik ini kemudian dilaksanakan baik oleh pemerintah atau masyarakat maupun pemerintah bersama-sama dengan masyarakat.
- d. Namun, dalam proses perumusan dan pelaksanaan diperlukan tindakan evaluasi sebagai siklus baru untuk dinilai apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dan diimplementasikan dengan baik dan benar.
- e. Implementasi kebijakan bermuara pada *output* yang dapat kebijakan itu sendiri ataupun manfaat langsung yang dirasakan oleh pelaksana.

- f. Dalam jangka panjang, kebijakan tersebut menghasilkan *outcome* dalam bentuk kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut

2. Tahapan dalam Perumusan Kebijakan Publik

Kebijakan publik pasti akan timbul melalui serangkaian proses. Pengertian dari proses adalah serangkaian tindakan yang secara definitif berkaitan dengan tujuan yang artinya kebijakan publik tidak timbul secara mendadak, melainkan melalui suatu proses tertentu yang berkaitan dengan tujuan kebijakan. Proses dari kebijakan publik saling berkaitan sama lain yang setiap tahap saling berpengaruh. Seperti yang dikemukakan oleh Winarno (2008:119-123) suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan-tindakan oleh seorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah, menolak suatu alternatif kebijakan yang dipilih. Tahapan-tahapan kebijakan itu terlahir dari beberapa langkah-langkah pembuatan suatu kebijakan yaitu :

a. Perumusan masalah

Mengenali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan. Untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah-maslah publik harus dikenali dan didefinisikan dengan baik pula. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat.

b. Agenda kebijakan

Tidak semua masalah publik akan masuk dalam agenda kebijakan. Masalah-masalah tersebut saling berkompetensi antara satu dengan yang

lain. Hanya masalah-masalah tertentu yang pada akhirnya akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti masalah tersebut mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus dilakukan.

c. Pemilihan Alternatif Kebijakan Untuk Memecahkan Masalah

Setelah masalah publik didefinisikan dengan baik dan para perumus kebijakan sepakat untuk memasukkan masalah tersebut kedalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah pemecahan masalah. Para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk memecahkan masalah tersebut.

d. Tahap Penetapan kebijakan

Setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan diambil sebagai cara untuk memecahkan masalah kebijakan, maka tahap paling akhir dalam pembentukan kebijakan adalah penetapan kebijakan yang dipilih tersebut sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Sedangkan menurut pendapat ahli mengenai tahap-tahap dalam perumusan kebijakan publik Haldun (2008:27) terdapat tiga hal yang pokok berkenaan dengan kebijakan publik adalah : formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Menurut pendapat ahli tentang tahapan perumusan kebijakan publik adalah sangat penting untuk merumuskan terlebih dahulu masalah-masalah yang ada, akan tetapi tidak semua masalah dapat dirumuskan untuk membuat suatu kebijakan publik, hanya masalah

yang mempunyai dampak jangka panjang yang bisa dirumuskan untuk membuat suatu kebijakan, setelah dipilih beberapa masalah yang bisa dirumuskan maka akan ditetapkannya sebuah kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut yang berupa suatu kebijakan publik. Kemudian dilaksanakan kebijakan publik baik oleh masyarakat maupun pemerintah, karena suatu kebijakan publik tidak hanya untuk dikonsumsi oleh masyarakat tetapi juga untuk pembuat kebijakan, maka untuk mengetahui apakah kebijakan itu sudah tepat sasaran atau keefektifan maka perlu adanya evaluasi. Hal ini sangat diperlukan apakah kebijakan tersebut berdampak positif atau negatif bagi masyarakat dan hal ini sangat mempengaruhi untuk pembuatan kebijakan selanjutnya.

B. Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan proses pelaksanaan dan penerapan dari kebijakan publik. Didalam penerapan dan pelaksanaan kebijakan publik tersebut terdapat kekompleksan masalah yang bermuatan politik dan adanya kepentingan individu. Untuk menggambarkan kerumitan dalam suatu proses implementasi dapat dilihat pada pernyataan seorang ahli studi kebijakan menurut Eugene Bardach (1991) yang dikutip oleh Agustino (2008:138) yaitu :

“adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk yang mereka anggap klien.”

Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn (1975) yang dikutip oleh Agustino (2008:139) mendefinisikan implementasi kebijakan adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. Berdasarkan pendapat diatas implementasi adalah suatu proses yang dinamis dalam melaksanakan kebijakan, melakukan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu *output* yang sesuai. Dan menurut Lester dan Stewart Jr yang dikutip oleh Agustino (2008:139) bahwa implementasi sebagai proses dan *output*. Keberhasilan sebuah implementasi kebijakan dapat diukur dari proses dan pencapaian *output* yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Fokus utama dari kebijakan adalah dimana tujuan dan sasaran kebijakan telah tercapai, apakah alasan penyebab tujuan dan sasaran kebijakan telah tercapai, dan penjelasan yang menyebabkan tujuan atau sasaran kebijakan tercapai atau tidak. Sedangkan pelaksana kebijakan di lapangan akan memberikan perhatian pada masalah tindakan dan perilaku pelaksana di lapangan, bagaimana menyikapi agar gangguan dan hambatan yang menghalangi keberhasilan suatu kebijakan di wilayah kerjanya serta menghadapi tantangan dari pelaksana di luar badan pemerintah yaitu kelompok sasaran, baik kelompok sasaran pro maupun kelompok sasaran kontra.

Pelaksanaan kebijakan yang ada dalam desain atau program kegiatan merupakan usaha pemerintah atau pelaku kebijakan dalam rangka menjawab

permasalahan yang terjadi di masyarakat sebagaimana yang dinyatakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Abdull Wahab (2004:65) yaitu

“mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa atau kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya suatu kebijakan, baik menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat”.

Implementasi kebijakan merupakan suatu analisis dengan melakukan retropeksi daripada prospeksi dengan tujuan ganda, yaitu : pertama memberikan informasi bagaimana program-program tersebut dapat terlaksana, kedua menunjukkan faktor-faktor yang dapat diubah agar memperoleh capaian hasil yang lebih baik yang dapat memberikan perubahan implementasi atau program baru. Menurut Winarno (1998:72) “proses implementasi memiliki variabel atau faktor yang membentuk kaitan (*linkage*) antara kebijakan dan capaian (*performance*)”. Variabel tersebut dapat berupa variabel bebas atau variabel terikat yang saling berhubungan satu sama lainnya.

2. Implementasi Program

1) Pengertian Implementasi Program

Berdasarkan berbagai pengertian mengenai program, dapat diketahui bahwa program di samping bersifat alokatif dan distributif, program juga bersifat inovatif dan multifungsi. Hal ini sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh United Nations dalam Zauhar (1993:2) bahwa:

“Programme is taken to mean form of organized social activity with a specific objective, limited in space and time. It often consist an interrelated group of projects and usually limited to one or more an going organizations and activities. (Program diartikan sebuah bentuk kegiatan sosial yang

terorganisasi dengan tujuan tertentu, terbatas pada ruang dan waktu. Sering terdiri dari kelompok yang saling terkait program dan biasanya terbatas pada satu atau lebih suatu organisasi dan kegiatan yang berlangsung).”

Program dapat dikatakan sebuah kegiatan yang melibatkan berbagai organisasi yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya guna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara terorganisir dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Dengan suatu program, berbagai macam masalah pembangunan dan kemasyarakatan dicoba untuk dipecahkan. Karena demikian banyaknya masalah yang uncul dalam masyarakat, maka diperlukan pula program yang banyak. Munculnya suatu program di samping bertujuan untuk memecahkan suatu masalah tertentu juga dimaksudkan agar masyarakat bangkit motivasi dan inovasinya, karena mereka tertarik dengan program yang dicanangkan. Dalam mencapai tujuan tersebut disadari benar bahwa kelangkaan sumber merupakan hal tidak dapat dihindari. Oleh karenanya maka para pengelola pembangunan harus mampu menyusun skala prioritas sehingga alokasi dan distribusi sumber daya dapat dilaksanakan secara tepat.

2) Karakteristik Program

Berdasarkan pengertian mengenai program, maka Soeharto (1997:1) menjelaskan mengenai ciri-ciri program sebagai berikut:

- a. memiliki tujuan yang khusus, produk akhir atau hasil kerja akhir;
- b. jumlah biaya, sasaran jadwal serta kriteria mutu dalam proses mencapai tujuan di atas telah ditentukan;
- c. bersifat sementara, dalam arti umurnya dibatasi oleh selesainya tugas. titik awal dan akhir ditentukan dengan jelas;
- d. nonrutin, tidak berulang-ulang. jenis dan intensitas kegiatan berubah sepanjang program berlangsung.

Sementara United Nations dalam Zauhar (1993:2) menjelaskan bahwa agar program dapat terlaksana dengan baik maka suatu program harus memiliki ciri-ciri:

- a) Tujuan yang dirumuskan secara jelas;
- b) Penentuan dari peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan;
- c) Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten dan atau proyek-proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program selektif mungkin;
- d) Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan dari program tersebut;
- e) Hubungan dengan kegiatan-kegiatan lain dalam usaha pembangunan tidak berdiri sendiri;
- f) Berbagai upaya di bidang manajemen termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut.

3) Sasaran Program dan Tiga Kendala

Di dalam mencapai tujuan suatu program, telah ditentukan batasan yaitu biaya atau anggaran, yang dialokasikan, dan jadwal serta mutu yang harus dipenuhi. Ketiga batasan tersebut juga merupakan tiga kendala. Batasan tersebut merupakan parameter penting bagi penyelenggaraan program yang sering diasosiasikan sebagai sasaran program.

a. Anggaran

Program harus diselesaikan dengan biaya yang tidak melebihi anggaran.

Untuk program-program yang melibatkan dana dalam jumlah besar dan jadwal bertahun-tahun, anggarannya bukan hanya ditentukan untuk total program tetapi dipecah bagi komponen-komponennya, atau per periode tertentu yang jumlahnya disesuaikan dengan keperluan. Dengan demikian, penyelesaian bagian-bagian program pun harus memenuhi sasaran anggaran per periode.

b. Jadwal

Program harus dikerjakan sesuai dengan kurun waktu dan tanggal akhir yang telah ditentukan. Bila hasil akhir adalah produk baru, maka penyerahannya tidak boleh melewati batas waktu yang telah ditentukan.

c. Mutu

Produk atau hasil kegiatan program harus memenuhi spesifikasi dan kriteria yang dipersyaratkan. Memenuhi persyaratan mutu berarti mampu memenuhi tugas yang dimaksudkan.

Ketiga batasan tersebut bersifat tarik-menarik. Artinya, jika ingin meningkatkan kinerja produk yang telah disepakati maka umumnya harus diikuti dengan menaikkan mutu, yang selanjutnya berakibat pada naiknya biaya yang melebihi anggaran. Sebaliknya bila ingin menekan biaya maka biasanya harus berkompromi dengan mutu dan jadwal. Dari segi teknis, ukuran keberhasilan program dikaitkan dengan sejauh mana ketiga sasaran tersebut dapat dipenuhi (Soeharto, 1997:2).

4) Ukuran Program

Sampai saat ini belum ada kriteria yang telah dibakukan untuk dapat mengatakan besar kecilnya suatu program. Salah satu sebab adalah banyaknya ragam program, sehingga besarnya ukuran program yang satu belum tentu sama dengan ukuran program yang lainnya. Menurut Santosa (2009:9) program bisa dilihat dari sumber daya yang dibutuhkan, biaya dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Hal-hal ini digunakan sebagai kriteria ukuran program. Sehingga ukuran program dapat dilihat dari:

- a) Jumlah kegiatan
- b) Besarnya biaya
- c) Jumlah tenaga kerja
- d) Waktu yang diperlukan

Sedangkan tingkat kompleksitasnya suatu program ditandai dengan:

- a. Jumlah kegiatan dan hubungan antar kegiatan
- b. Jenis dan jumlah hubungan antar kelompok / organisasi dalam program
- c. Jenis dan jumlah hubungan antar kelompok di dalam organisasi dan pihak luar
- d. Tingkat kesulitan

Kompleksitas tidak tergantung dari besar kecilnya ukuran suatu program.

Program kecil dapat saja bersifat lebih kompleks dari pada suatu program berukuran besar dengan jumlah kegiatan banyak, tenaga kerja besar namun tingkat kesulitannya sedang.

3. Tahapan Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menurut Nugroho (2009:494) pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua langkah yaitu dengan langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.2 Sekuensi Implementasi Kebijakan (Sumber : Nugroho 2009:495)

Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain *Keppres*, *Inpres*, *Kepmen*, *Keputusan Kepala Dinas* dan lain-lain.

Rangkaian implementasi kebijakan dari gambar di atas dapat dilihat jelas yaitu mulai program, ke proyek, dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen dalam sektor publik.

Selain itu menurut Widodo (2012:90-94) tahap implementasi suatu kebijakan publik mencakup tahap interpretasi, tahap pengorganisasian dan tahap aplikasi. Berikut adalah penjelasan dari tahapan tersebut yaitu :

a. Tahap Interpretasi

Tahap interpretasi merupakan tahap penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang dibuat bersama-sama antara lembaga legislatif (DPRD) dan lembaga eksekutif (pemerintah daerah). Kebijakan manajerial diwujudkan dalam bentuk kebijakan kepala dinas, kepala badan atau kepala kantor sebagai unsur pelaksana teknis daerah.

Aktivitas interpretasi kebijakan tadi tidak sekedar menjabarkan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang bersifat abstrak lebih profesional, tetapi juga diikuti dengan kegiatan mengkomunikasikan kebijakan agar seluruh rakyat dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan dan sasaran kebijakan tadi. Kebijakan ini perlu dikomunikasikan atau disosialisasikan agar mereka yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tersebut menjadi tahu dan paham tentang apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran kebijakan tersebut.

b. Tahap Pengorganisasian

Tahap ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi) mana yang akan melaksanakan, penetapan biaya (berapa besarnya biaya yang diperlukan, darimana sumbernya, bagaimana menggunakan dan mempertanggung jawabkan), penetapan sarana dan prasarana apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja dan

penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan termasuk penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksana kebijakan.

c. Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnya.

4. Model-model Implementasi Kebijakan Publik

Dari beberapa pengertian implementasi yang telah dijelaskan diatas, maka implementasi merupakan suatu proses mengubah program menjadi tindakan, dan bagaimana cara untuk menjalankan kemungkinan tersebut. Untuk menganalisis implementasi kebijakan supaya dapat berlangsung maka dapat dilihat dari beberapa model implementasi kebijakan yaitu :

a) Model Marille S. Grindle

Salah satu teori model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Marille S. Grindle dalam Agustino (2008:153). Teori ini dikenal dengan sebutan *Implementation as A Political and Administrative Process*, dalam penelitian ini mengapa peneliti menggunakan pendekatan ini karena tingkat kebutuhan dan kecocokan teori dengan jenis kebijakan publik yang akan diimplementasikan serta kesesuaian dengan tema penelitian. Menurut Grindel yang dikutip Agustino (2008:154-315) keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik juga ditentukan dari dua hal yaitu *content of policy* dan *context of policy*.

a. *Content Of policy* adalah

1) *Interst Affected* (kepentingan yang terpengaruhi)

Dengan adanya berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berpendapat bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaan akan melibatkan banyak kepentingan dan sejauh mana kepentingan tersebut ada pengaruh terhadap implementasinya. Beberapa hambatan pada saat implementasi kebijakan berada diluar kendala, karena hambatan tersebut memang berada diluar wewenang kebijakan dan pelaksana kebijakan. Kendala tersebut dapat berupa fisik maupun politik.

2) *Type of Benefits* (tipe manfaat yang dihasilkan)

Dalam *content of policy* membahas untuk menunjukkan bahwa dalam kebijakan harus terdapat beberapa tipe manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pelaksana kebijakan yang hendak dilaksanakan. Manfaat dari sebuah kebijakan harus mampu diinterpretasikan dan kemudian dikomunikasikan kepada pra pelaksana sebagai ujung tombak implementasi kebijakan di lapangan dan kendala pada masyarakat sebagai target sasaran dari sebuah kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran dan pelaksana kebijakan dapat mengetahui manfaat apa yang akan mereka dapat dari sebuah kebijakan yang telah dirumuskan. Hal tersebut juga akan mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap sebuah kebijakan.

3) *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang diinginkan)

Setiap kebijakan pasti mempunyai target yang akan dicapai. Dalam *Content of policy* yang akan dijelaskan pada poin ini adalah berapa besar perubahan

yang akan dicapai dari suatu implementasi harus mempunyai skala yang jelas. Hal ini mengharuskan ada pemahaman mengenai target atau sasaran yang ingin dicapai. Tujuan tersebut harus dirumuskan secara jelas, dikuantifikasikan, spesifik, dipahami dan disepakati oleh semua pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

4) *Site of Decision Making* (kedudukan pembuat kebijakan)

Yang mempunyai peranan penting dalam suatu pelaksana kebijakan yaitu pengambil keputusan. Pada bagian ini menjelaskan dimana posisi pengambil keputusan dari sebuah implementasi suatu kebijakan.

5) *Program Implementor* (pelaksana program)

Dalam menjalankan sebuah kebijakan harus didukung oleh pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel untuk keberhasilan sebuah kebijakan. Pelaksana kebijakan harus sudah tertulis dan terdata dengan baik. Jenis kebijakan yang akan dilaksanakan sangat tergantung oleh pelaksana kebijakan, akan tetapi setidaknya dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a) Dinas, unit pelaksana teknis (upt), dan lingkungan pemerintah pusat maupun daerah.
- b) Sektor bisnis atau swasta
- c) Lembaga swadaya masyarakat (lsm)
- d) Masyarakat

Penetapan pelaksana kebijakan tidak hanya sekedar menetapkan mana yang akan melaksanakan dan siapa yang akan melaksanakan, akan tetapi juga

menetapkan kewenangan, tanggungjawab, tugas pokok, fungsi dari masing-masing pelaksana.

6) *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)

Pelaksanaan kebijakan agar berjalan dengan baik maka pelaksana kebijakan harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung. Sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan adalah sumberdaya keuangan dan sumberdaya fisik atau peralatan. Sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan sangat tergantung dengan anggaran yang dikeluarkan, setiap kebijakan menghabiskan anggaran yang berbeda-beda. Sumberdaya keuangan dapat diperoleh dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui APBN, APBD, sektor swasta, swadana masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan perlu didukung dengan peralatan yang memadai. Tanpa adanya peralatan yang memadai akan mengurangi efisiensi dan keefektifan dalam implementasi sebuah kebijakan.

b. *Context of policy*

1) *Strategy, Interest, and Power of Actor Involved* (strategi, kepentingan-kepentingan dan kekuasaan dari aktor yang terlibat)

Dalam sebuah kebijakan juga dipertimbangkan juga mengenai strategi, kepentingan serta kekuasaan yang digunakan oleh para aktor yang terlibat dalam memperlancar jalannya pelaksanaan implementasi sebuah kebijakan. Hal ini dapat dilihat dari sejauh mana peluang untuk partisipasi terbuka bagi para aktor diluar badan-badan pelaksana yang mempengaruhi para pelaksana tujuan resmi. Apabila hal ini tidak

diperhitungkan dengan matang, maka kemungkinan besar program yang hendak diimplementasikan akan jauh dari harapan.

2) *Regime and Institution Characteristic* (karakteristik penguasa dan institusi)

Lingkungan juga mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan yang nanti akan membuahkan hasil atau tidak. Meskipun sumber untuk melaksanakan kebijakan telah tersedia, namun kemungkinan kebijakan tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya kelemahan pada struktur birokrasi. Kebijakan yang kompleks membutuhkan adanya kerjasama orang yang tidak sedikit, ketika struktur birokrasi yang tidak kondusif pada kebijakan yang ada. Maka, hal tersebut akan menyebabkan sumberdaya tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dan harus melakukan koordinasi dengan baik.

3) *Responsiveness and compliance* (respon dan tingkat kepatuhan dari pelaksana)

Kepatuhan dan respon dari pelaksana dirasa penting dalam proses pelaksanaan sebuah kebijakan. Maka yang akan dijelaskan dalam poin ini adalah seberapa penting dan sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana. Berdasarkan hal ini, menurut Edward III dalam Agustino (2006:152) menjelaskan bahwa “jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksanaannya tidak mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya”.

b) Model Van Meter dan Van Horn

Suatu model yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2011:158-168) bahwa tidak hanya menentukan variabel-variabel bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan-kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas. Variabel-variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn, identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Di samping itu, ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus.

2. Sumber-sumber kebijakan

Disamping ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber layak mendapatkan perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Dalam hal ini komunikasi didalam dan diantara organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit.

4. Karakteristik badan-badan pelaksana

Para peminat politik birokrasi telah mengidentifikasi banyak karakteristik badan-badan administratif yang telah mempengaruhi pencapaian kebijakan mereka. Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, seperti yang dinyatakan oleh Van Meter dan Van Horn, maka pembahasan ini tidak lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan komponen dari model ini terdiri dari dari ciri-ciri struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka. Disamping itu, perhatian juga perlu ditujukan kepada ikatan-ikatan badan pelaksana dengan pemeran-pemeran serta dalam sistem penyampaian kebijakan.

5. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik

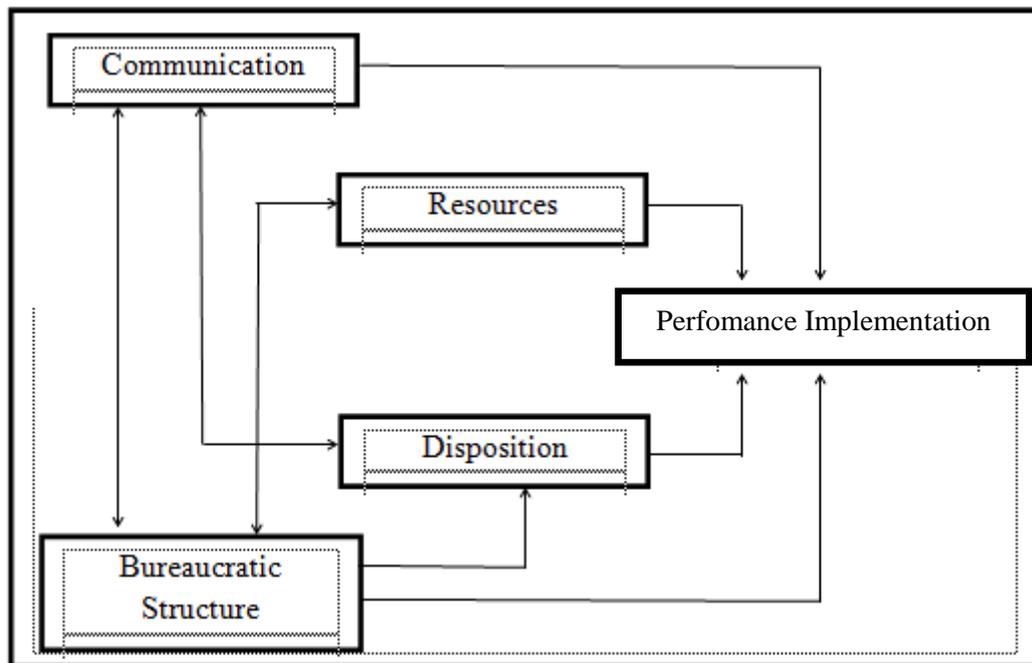
Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan variabel selanjutnya yang diidentifikasi oleh Van Meter dan Van Horn. Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar dan faktor-faktor ini mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana.

6. Arah kecenderungan pelaksana (implementor)

Arah kecenderungan pelaksana terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan juga merupakan suatu hal yang sangat penting. Menurut Van Meter dan Van Horn intensitas kecenderungan pelaksana akan mempengaruhi kinerja kebijakan. Para pelaksana yang mempunyai pilihan-pilihan negatif mungkin secara terbuka akan menimbulkan sikap menentang tujuan-tujuan program. Oleh karena itu para pengkaji implementasi kebijakan harus mengumpulkan banyak individu yang berasal dari unsur kecenderungan yang beragam.

c) Model George C. Edward III

Adapun menurut ahli yang lain, yaitu model George C. Edward III. Edward dalam Widodo (2009:96-107) mengajukan 4 faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegiatan implementasi kebijakan yaitu :



Gambar 2.3 Model Implementasi Kebijakan George C. Edward (Widodo 2011:107)

1. Faktor Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) Widodo (2011:97). Widodo menambahkan bahwa komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain, *pertama* adalah dimensi transformasi (*transformassion*) yaitu menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan. *Kedua*, dimensi kejelasan (*clarity*) yaitu menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana dan pihak lain yang

berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima jelas sehingga mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut. *Ketiga*, konsistensi (*consistency*) yaitu menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsistensi, agar kelompok sasaran kebijakan dan pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung tidak menimbulkan kebingungan dan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

2. Sumber daya (*resources*)

Pada variabel Sumber daya merupakan peranan penting pada implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) menegaskan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya yang mendukung dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, meliputi :

a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan yang efektif dan efisien sumber daya manusia harus mengetahui apa yang dilakukan, sumber daya juga harus mengetahui orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, sumber daya manusia juga harus memiliki kewenangan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan dan juga sumber daya harus cukup memiliki keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pimpinan).

b. Sumber daya anggaran

Selain Sumber daya manusia anggaran merupakan yang memengaruhi keefektivitasan sebuah kebijakan karena anggaran merupakan dana untuk membiayai operasionalisasi dalam pelaksanaan kebijakan. Jika terbatasnya sumber daya anggaran, maka akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak berjalan dengan optimal, terbatasnya anggaran juga menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

c. Sumber daya peralatan (*facility*)

Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan

d. Sumber daya informasi dan kewenangan

Informasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, selain itu informasi tentang kerelaan atau kesanggupan dari beberapa pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut.

3. Disposisi (*disposition*)

Dalam implementasi sebuah kebijakan para pelaku kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya. Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

4. Struktur birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi dapat berpengaruh efektif dan efesienya implementasi sebuah kebijakan. Karena struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya.

Dari penjelasan di atas penulis tertarik untuk menggunakan model implementasi dari George C. Edward III. Pertimbangan yang penulis ambil adalah karena model implementasi kebijakan menurut George C. Edward telah mencakup 4 hal untuk menganalisis implementasi program desa wisata yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selain itu variabel menurut George C. Edward cenderung sederhana dan mencakup wilayah kecil seperti di desa. Model seperti itu tidak ditemukan dalam model implementasi kebijakan Van Meter dan Varn Horn karena kedua model tersebut hanya berfokus pada implementasi dan kurang menekankan pada analisa sasaran kebijakan serta pemaknaan tiap variabelnya terlalu luas dan terlalu kompleks.

5. Faktor penghambat dan pendukung Implementasi

Dalam suatu implementasi kebijakan tentu akan menanggung resiko kegagalan. Menurut Hogwood dan Gunn dalam Wahab (2004:61-62) menjelaskan tentang kegagalan kebijakan dalam dua kategori yaitu :

1. *Non-implementation* (tidak terimplementasikan atau tidak terlaksana) yang artinya bahwa sebuah kebijaksanaan tidak terencana sesuai dengan rencana, hal ini mungkin karena adanya pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama dan bertanggung jawab atau mereka tidak mau bekerja secara efisien atau bisa jadi mereka tidak menguasai kebijakan sepenuhnya.
2. *Unsuccessfull implementation* (implementasi yang tidak berhasil) artinya bahwa suatu kebijaksanaan tertentu yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal yang tidak

menguntungkan akan tetapi kebijaksanaan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil yang dikehendaki. Terdapat faktor-faktor yang biasanya menyebabkan kebijaksanaan gagal sebagai berikut : pelaksanaannya yang buruk (*bad execution*), kebijakan yang buruk (*bad policy*), dan kebijakan yang bernasib jelek (*bad luck*).

Selain faktor penghambat dalam implementasi kebijakan terdapat juga faktor pendukung dalam implementasi kebijakan, menurut Anderson dalam Islamy (2004:108-110) dijelaskan :

“... sebab-sebab anggota masyarakat melaksanakan suatu kebijakan diantaranya:

1. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah.
2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan.
3. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan.
4. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan-kebijakan kontroversial yang lebih banyak mendapatkan penolakan warga masyarakat dalam pengimplementasian”.

Berdasarkan uraian diatas seideal-idealnya sebuah kebijakan yang telah diputuskan tidak dapat lepas dari kegagalan pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk meminimalisir sebuah kegagalan dalam sebuah kebijakan maka harus dipikirkan secara matang dengan birokrasi yang dapat mempertanggungjawabkan sebuah kebijakan tersebut. Kemudian sebisa mungkin dapat menghindari faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan sebuah kebijakan.

C. Pariwisata

1. Pengertian Pariwisata

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha. Sedangkan menurut Wahab (2003:5) pariwisata adalah salah satu dari industri gaya baru yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup, dan mengaktifkan sektor produksi lain di dalam Negara penerima wisatawan. Lagipula pariwisata sebagai suatu sektor yang kompleks, meliputi industri-industri dalam arti klasik seperti misalnya industri kerajinan tangan dan industri cinderamata, penginapan serta transportasi.

Menurut Sammeng (2001:1) kata wisata dan wisatawan termasuk sudah menjadi pembendaharaan Bahasa Indonesia dan digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan wisata adalah 1. Berpergian bersama-sama (untuk memperluas pengetahuan, bersenang-senang dan sebagainya), 2. Piknik. Wisatawan = orang yang berwisata, pelancong, turis. Sedangkan menurut Wardiyanta (2006:49-50) kepariwisataan memiliki dua aspek kelembagaan dan aspek substansial yaitu sebuah aktivitas manusia. Dilihat dari sisi kelembagaannya, pariwisata merupakan lembaga yang dibentuk sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan rekreatifnya. Sebagai sebuah lembaga, pariwisata

dapat dilihat dari sisi manajemennya yakni bagaimana perkembangannya dari mulai direncanakan, dikelola sampai dipasarkan pada pembeli yaitu wisatawan.

Menurut Suwantoro (2004:3) bahwa pariwisata pada hakekatnya adalah suatu proses kegiatan sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan atau karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan, maupun kepentingan lain seperti karena sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar. Sedangkan menurut Yoeti (2008:8) pariwisata memenuhi empat kriteria di bawah ini yaitu :

1. Perjalanan dilakukan dari satu tempat ke tempat lain. Perjalanan dilakukan di luar tempat kediaman dimana orang itu biasanya tinggal.
2. Perjalanan dilakukan minimal 24 jam atau lebih, kecuali bagi *excursionist* (kurang dari 24 jam).
3. Tujuan perjalanan semata-mata untuk bersenang-senang tanpa mencari nafkah di negara, kota yang dikunjungi.
4. Uang yang dibelanjakan wisatawan tersebut dibawa dari negara asalnya, dimana ia biasanya tinggal atau berdiam dan bukan diperoleh karena hasil usaha selama dalam perjalanan wisata yang dilakukan.

Berdasarkan pendapat dari pakar di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa pariwisata adalah sesuatu yang bersifat kompleks dengan melibatkan kegiatan manusia di sebuah objek wisata yang berupa sarana dan prasarana, kondisi wisata dan lain sebagainya.

2. Peranan Pariwisata dalam Pembangunan

Pemerintah berkeinginan mengembangkan pariwisata dengan tujuan untuk mempercepat proses peningkatan kesempatan berusaha, kesempatan bekerja, peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Yoeti (2008:28) adalah sebagai berikut :

a. *Transportation*

Yaitu yang melayani angkutan wisatawan dari satu daerah ke daerah lain dari satu kota ke kota lain , atau dari daerah tujuan wisata ke daerah tujuan wisata lain, termasuk dalam kelompok ini adalah bus pariwisata.

b. *Accommodation*

Yaitu yang melayani wisatawan untuk kebutuhan akomodasi bagi wisatawan seperti hotel, motel, *village*, *apartment*.

c. *Restaurant*

Yaitu yang melayani wisatawan untuk kebutuhan makan dan minum selama kunjungan wisatawan pada suatu daerah tujuan wisata.

d. *Shopping Center*

Termasuk dalam kelompok ini adalah toko cinderamata, toko barang, kesenian, toko lukisan.

Sedangkan menurut Wahab (2003:77) bahwa wisata yang tiba di suatu negara, baik secara individu maupun kelompok tentu akan membelanjakan uangnya selama berada disana untuk membayar jasa-jasa atau barang-barang wisata. Seluruh jumlah uang yang dibelanjakan ini merupakan jumlah penerimaan dari sektor pariwisata dan menjadi pola konsumsi di suatu negara tersebut. Semakin bertambah

konsumsi wisatawan semakin banyak pula jasa-jasa wisata. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa pariwisata pariwisata menjadi sumber pendapatan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa peranan pariwisata dalam pembangunan sangat penting karena selain pariwisata dapat meningkatkan pendapatan masyarakat daerah dan negara, membuka lapangan pekerjaan, selain itu pariwisata juga dapat menjadikan daerah menjadi lebih maju dengan adanya perbaikan jalan, pembangunan hotel, restoran dan lain sebagainya.

D. Desa wisata

Desa wisata sebagai suatu wilayah pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian desa, baik dari segi kehidupan sosial budaya, adat istiadat, aktifitas keseharian, arsitektur bangunan, dan struktur tata ruang desa, serta potensi yang mampu dikembangkan sebagai daya tarik wisata, misalnya: atraksi, makanan dan minuman, cinderamata, penginapan, dan kebutuhan wisata lainnya (Fandeli, 2002:13).

Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Desa wisata merupakan salah satu pengembangan pariwisata yang memanfaatkan potensi alam di desa tersebut. Menurut Soetarso dan Mohamad (2001:35) Penetapan suatu desa dijadikan sebagai desa wisata harus memenuhi persyaratan-persyaratan antara lain:

- a. Aksesibilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi.
- b. Memiliki obyek-obyek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek wisata.

- c. Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang ke desanya.
- d. Keamanan di desa tersebut terjamin.
- e. Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai.
- f. Beriklim sejuk atau dingin.
- g. Berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas.

Menurut Pariwisata Inti Rakyat (PIR) yang dimaksud dengan desa wisata adalah suatu daerah wisata yang menyajikan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian perdesaan baik dari sisi kehidupan sosial, ekonomi, budaya, keseharian, adat istiadat, memiliki arsitektur dan tata ruang yang khas dan unik, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta memiliki potensi untuk dikembangkannya komponen kepariwisataan (Priasukmana, 2001: 37).

Sedangkan menurut laporan pendahuluan Rencana Induk Pengembangan Desa Wisata Kota Batu, desa wisata adalah sebuah kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah wisata. Selain itu desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Yang dimaksud dengan akomodasi adalah sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk, sedangkan atraksi adalah seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta *setting* fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipasi aktif seperti kursus tari, bahasa dan lain-lain yang spesifik.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa desa wisata adalah suatu kawasan pedesaan yang menyajikan segala keunikan dan kekhasan desa tersebut baik berupa wisata alam, wisata budaya yang ditunjang dengan panorama alam yang indah disekitarnya serta didukung dengan sarana dan prasarana seperti *homestay* untuk memungkinkan wisatawan berinteraksi dengan suasana di desa tersebut.

Dalam pelaksanaan desa wisata masyarakat ikut berpartisipasi, partisipasi tersebut harusnya bisa mengubah masyarakat dari menjadi objek sehingga menjadi subjek pembangunan. Oleh karena itu, harus menguntungkan dan mensejahterakan masyarakat. Seperti yang ada di handout *concept resort and leisure* oleh Sastrayuda (2010) desa wisata harus memiliki manfaat terhadap :

a. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Desa wisata perlu dukungan melalui kelancaran dan efektivitas pemberdayaan ekonomi rakyat, terutama untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan KOPERASI (UMKK) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) agar masyarakat desa mendapatkan pekerjaan yang layak, untuk itu perlu adanya pengembangan usaha ekonomi dan mata pencaharian berkelanjutan yang dapat ditempuh dengan cara : (1) Usaha Ekonomi Rakyat (usaha kecil, mikro dan koperasi) yang memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal dan lestari, (2) dikembangkan badan usaha milik rakyat yang dapat berdampingan, kemitraan dengan Koperasi, (3) pengembangan klaster-klaster usaha ekonomi rakyat yang menampilkan produk-produk unggulan bernilai tambah tinggi sebagai sentra-sentra kemandirian ekonomi rakyat. Dukungan bagi kelancaran dan efektivitas pemberdayaan ekonomi rakyat tersebut di atas dapat dikembangkan secara partisipatif sesuai dengan prioritas masyarakat seperti, prasarana fisik yang memperlancar transportasi dan komunikasi, pelayanan dasar, perluasan ruang publik pada tingkatan masyarakat yang mendukung berbagai lapisan masyarakat, pengembangan tenaga kerja dan lingkungan kerja bagi tenaga kerja usia muda.

b. Pemberdayaan Sosial Budaya

Pendekatan integratif dalam menata kehidupan sosial dapat dikaitkan melalui kearifan lokal yang terdiri dari pemerintah

daerah, sebagai regulator dan fasilitator melakukan identifikasi dan kegiatan atas bentuk, mekanisme dalam pemecahan masalah ke pendudukan, perbaikan pelayanan dan peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan pelayanan masyarakat, Unsur-unsur tersebut perlu menjadi pertimbangan utama dalam mengkaji kawasan desa wisata, mengingat pengembangan kepariwisataan secara umum tidak terlepas kaitannya dengan pariwisata sebagai suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat. Disamping itu beberapa pendapat menunjukkan adanya berbagai dampak yang tidak diharapkan, seperti memburuknya kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat, memburuknya ketimpangan antara daerah, hilangnya kontrol masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi. Pentingnya kajian sosiologi terhadap penerapan pemodelan pariwisata semakin jelas, karena tipe pariwisata yang dikembangkan adalah desa wisata, dimana desa wisata mempunyai beberapa ciri, seperti; desa wisata melibatkan masyarakat lokal secara lebih luas dan lebih intensif karena dasarnya adalah berkaitan dengan kehidupan sosial budaya yang menjadi daya tarik wisata melekat pada masyarakat itu sendiri, oleh karena itu pentingnya mengidentifikasi dampak terhadap sosial budaya pariwisata yang menurut Fiquerola (dalam Pitana, 2005:117) terdiri dari enam kategori, yaitu :

- 1) Dampak terhadap struktur demografi
- 2) Dampak terhadap bentuk dan tipe mata pencaharian
- 3) Dampak terhadap transportasi nilai
- 4) Dampak terhadap gaya hidup tradisional
- 5) Dampak terhadap pola konsumsi, dan
- 6) Dampak terhadap pembangunan masyarakat yang merupakan manfaat sosial budaya pariwisata.

c. Pemberdayaan Lingkungan Desa wisata

Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya menyangkut tiga dimensi penting yaitu, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Budiharsono (2006:10) mengemukakan dimensi ekonomi antara lain berkaitan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memerangi kemiskinan, serta merubah pola produksi dan konsumsi ke arah yang seimbang, sedangkan dimensi sosial bersangkutan dengan upaya pemecahan masalah ke pendudukan perbaikan pelayanan masyarakat, peningkatan pendidikan dan lain-lain. Adapun dimensi lingkungan, diantaranya mengenai upaya pengurangan dan pencegahan terhadap polusi pengelolaan limbah serta konservasi/preservasi sumber daya alam.

E. Inovasi Sektor Publik

1. Pengertian Inovasi

Halvorsen (2005) membatasi pengertian inovasi yaitu “*restricted themselves to novel products and processes finding a commercial application in the private sector*”. Dalam pembatasan ini Halvorsen menekankan 2 (dua) hal penting dari inovasi, yaitu:

1. Sifat kebaruan (*novelty*) dari sebuah produk. Dengan kata lain inovasi hanya berhubungan dengan produk-produk yang bersifat baru.
2. Bahwa inovasi berhubungan dengan proses pencarian aplikasi komersial di sektor bisnis.

Menurut Albury (2003) dalam Yogi (2008) secara lebih sederhana mendefinisikan inovasi sebagai *new ideas that work*. Ini berarti bahwa inovasi adalah berhubungan erat dengan ide-ide yang bermanfaat. Inovasi dengan sifat kebaruannya harus mempunyai nilai manfaat. Sifat baru dari inovasi tidak akan berarti apa-apa apabila tidak diikuti dengan nilai kemanfaatan dari kehadirannya.

Lebih rini Albury menjelaskan bahwa:

“successful innovation is the creation and implementation of new processes, products, services, and methods of delivery which result in significant improvements in outcomes efficiency, effectiveness or quality”.

“inovasi yang sukses adalah kreasi dan implementasi dari proses baru, produk baru, dan metode penyampaian baru yang memiliki hasil signifikan dalam peningkatan dalam efisiensi, efektivitas atau kualitas”.

Yogi (2008) memberikan batasan-batasan mengenai dimensi inovasi itu sendiri kedalam beberapa hal diantaranya :

a. Pengetahuan Baru

Sebuah inovasi hadir sebagai sebuah pengetahuan baru bagi masyarakat dalam sebuah sistem sosial tertentu. Pengetahuan baru ini merupakan faktor penting penentu perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

b. Cara Baru

Inovasi juga dapat berupa sebuah cara baru bagi individu atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan atau menjawab masalah tertentu. Cara baru ini merupakan pengganti cara lama yang sebelumnya berlaku.

c. Objek Baru

Sebuah inovasi adalah objek baru bagi penggunaanya, baik berbentuk fisik (berwujud/*tangible*), maupun yang tidak berwujud (*intangible*).

d. Teknologi Baru

Inovasi sangat identik dengan kemajuan teknologi. Banyak contoh inovasi yang hadir dari hasil kemajuan teknologi. Indikator kemajuan dari sebuah produk teknologi yang inovatif biasanya dapat langsung dikenali dari fitur-fitur yang melekat pada produk tersebut.

e. Penemuan Baru

Hampir semua inovasi merupakan hasil penemuan baru. Sangat jarang ada kasus inovasi hadir sebagai sebuah kebetulan. Inovasi merupakan produk dari sebuah proses yang sepenuhnya bekerja dengan kesadaran dan kesengajaan.

Dengan demikian, inovasi dapat hadir dalam wujud pengetahuan, cara, objek, teknologi dan atau penemuan baru. Sifat yang mendasar dari inovasi

adalah sifat kebaruan (*novelty*). Oleh karena itu, sebuah produk (barang atau jasa) dapat dikatakan sebagai produk inovatif apabila memang dipandang baru oleh pasarnya (Yogi, 2008).

2. Atribut Inovasi

Menurut Yogi (2008), meskipun dalam mendefinisikan inovasi para ahli tidak memiliki pemahaman yang sama, namun secara umum dapat disimpulkan bahwa inovasi memiliki beberapa atribut diantaranya :

a. *Relative Advantage* atau Keuntungan Relatif

Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi yang menjadi ciri yang membedakannya dengan yang lain.

b. *Compability* atau kesesuaian

Inovasi juga mempunyai sifat kesesuaian dengan inovasi yang digantinya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta merta dibuang begitu saja, selain karena alasan faktor biaya yang tidak sedikit, namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi itu secara lebih cepat.

c. *Complexity* atau Kerumitan

Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Namun demikian, karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik, maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah penting.

d. *Triability* atau Kemungkinan dicoba

Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang lama. Sehingga sebuah produk inovasi harus melewati fase “uji publik”, dimana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi.

e. *Observability* atau Kemudahan Diamati

Sebuah inovasi harus juga dapat diamati, dari segi bagaimana ia bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Dengan atribut seperti itu, maka sebuah inovasi merupakan cara baru menggantikan cara lama dalam mengerjakan atau memproduksi sesuatu. Namun demikian, inovasi mempunyai dimensi geofisik yang menempatkannya baru pada satu tempat, namun boleh jadi merupakan sesuatu yang lama dan biasa terjadi di tempat lain.

3. Tipologi dan Dimensi Inovasi Sektor Publik

Tipologi Inovasi yang dikembang di sektor publik menurut Halvorsen (2005) adalah:

- a. *A New Improved Service* (pelayanan baru atau pelayanan yang diperbaiki), misalnya kesehatan di rumah sakit.
- b. *Process Innovation* (inovasi proses), misalnya perubahan dalam proses penyediaan pelayanan atau produk
- c. *Administrative Innovation* (inovasi administratif), misalnya penggunaan instrumen kebijakan baru sebagai hasil dari perubahan kebijakan.

- d. *System Innovation* (inovasi sistem), adalah sistem baru atau perubahan mendasar dari sistem yang ada dengan mendirikan organisasi baru atau bentuk baru kerjasama interaksi.
- e. *Conceptual Innovation* (inovasi konseptual), adalah perubahan dalam outlook, seperti misalnya manajemen air terpadu atau mobility leasing.
- f. *Radical Change of Rationality* (perubahan radikal), yang dimaksud adalah pergeseran pandangan umum atau mental matriks dari pegawai instansi pemerintah.

Sedangkan dimensi inovasi (Halvorsen, 2005) yang dikembangkan dalam sektor publik adalah terdiri dari :

- a. Inovasi yang melibatkan perubahan karakteristik dan rancangan (desain) produk-produk jasa dan proses-proses produksi termasuk pembangunan, penggunaan dan adaptasi teknologi yang relevan.
- b. Inovasi delivery termasuk cara-cara baru atau cara yang diubah dalam menyelesaikan masalah, memberikan layanan atau berinteraksi dengan orang lain yang tujuan untuk pemberian layanan khusus.
- c. Inovasi administratif dan organisasional termasuk cara-cara baru atau cara yang diubah dalam mengkoordinasikan kegiatan dalam organisasi *supplier*.
- d. Inovasi konseptual dalam pengertian memperkenalkan misi baru, pandangan, tujuan, strategi dan *rationale* baru.
- e. Inovasi interaksi sistem cara-cara baru atau yang diubah dalam berinteraksi dengan organisasi lain.

4. Arti Penting Inovasi

Pentingnya inovasi menurut Keeh, Hean Tat, Nguyen, Mai, Ping (2007) adalah sebagai berikut:

1. Teknologi berubah sangat cepat seiring adanya produk baru, proses dan layanan baru dari pesaing, dan ini mendorong usaha *entrepreneurial* untuk bersaing dan sukses. Yang harus dilakukan adalah menyesuaikan diri dengan inovasi teknologi baru.
2. Efek perubahan lingkungan terhadap siklus hidup produk semakin pendek, yang artinya bahwa produk atau layanan lama harus digantikan dengan yang baru dalam waktu cepat, dan ini bisa terjadi karena ada pemikiran kreatif yang menimbulkan inovasi.
3. Konsumen saat ini lebih pintar, bergolongan dan menuntut. Mereka mengharap lebih dalam hal kualitas, pembaruan, dan harga. Skill Inovatif karena itu dibutuhkan untuk memuaskan kebutuhan konsumen sekaligus mempertahankan mereka.
4. Dengan pasar dan teknologi yang berubah sangat cepat, ide yang sejatinya bagus bisa semakin mudah ditiru, dan ini membutuhkan metode penggunaan produk, proses yang baru dan lebih baik, dan layanan yang lebih cepat secara kontinyu.
5. Inovasi bisa menghasilkan pertumbuhan lebih cepat, meningkatkan segmen pasar, dan menciptakan posisi korporat yang lebih baik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan bertujuan untuk menggambarkan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Menurut Moleong (2006:14) seorang peneliti yang mengadakan penelitian kualitatif biasanya berorientasi pada teori yang sudah ada. Pada penelitian kualitatif, teori dibatasi pada pengertian dimana suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan seperangkat proposisi yang berasal dari data dan diuji kembali secara empiris. Salah satu dari teori dasar penelitian kualitatif adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana juga dianggap sebagai pendekatan luas sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Dalam penelitian lapangan peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah.

Denzin dan Lincoln 1987 dalam Moeleong (2006:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Dari pengertian ini, latar ilmiah dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena yang ada dan dimanfaatkan dengan berbagai metode yang ada yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen. Begitu juga menurut Pasolong (2012:32) metode penelitian deskriptif

kualitatif mengutamakan peneliti dalam melihat kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Dalam penelitian kualitatif, “proses” penelitian merupakan sesuatu yang lebih penting dibanding dengan “hasil” yang diperoleh karena itu peneliti sebagai instrumen pengumpul data merupakan suatu prinsip utama, hanya dengan keterlibatan peneliti dalam proses pengumpulan data hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian mempunyai tujuan untuk memberikan batasan-batasan terhadap permasalahan yang diteliti agar penelitian tidak mengalami pebiasan dan meluas. Penulis mengemukakan beberapa fokus penelitian adalah sebagai berikut

1. Implementasi pengembangan program desa wisata di Desa Gunungsari Kota Batu
 - a. Model Implementasi
 - b. Aktor-aktor yang terlibat
 - c. Pengembangan Program
2. Tantangan dalam pengembangan program desa wisata di Desa Gunungsari Kota Batu.
 - a. Tantangan yang dihadapi selama berjalan nya program
 - b. Tantangan yang dihadapi di masa yang akan datang
3. Inovasi pengembangan program desa wisata di Desa Gunungsari Kota Batu.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Adapun yang dimaksud dengan lokasi penelitian adalah letak dimana penelitian dilakukan, untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Upaya untuk menentukan lokasi dan situs penelitian merupakan kegiatan yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan penelitian, lokasi penelitian yang dimaksud disini adalah di Kota Batu.

Sedangkan untuk melihat keadaan atau fenomena yang sebenarnya dari objek yang diteliti merupakan situs penelitian. Jadi yang dimaksud dengan situs penelitian adalah lokasi atau tempat dimana peneliti melakukan penelitian guna memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun yang menjadi situs penelitian ini adalah Kantor Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu, karena Kantor Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu merupakan badan pemerintah yang bertanggung jawab terhadap Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah di Kota Batu. Kantor Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu ikut berperan aktif untuk bertanggungjawab dalam pembangunan Kota Batu. Dengan adanya Kantor Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ini maka pembangunan di daerah Kota Batu terpantau dengan rapi begitu juga dengan pembangunan pariwisatanya, karena dengan sumber daya yang ada dan peran masyarakat yang aktif sangat membantu kantor Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan bekerja dengan baik. Sedangkan Desa Gunungsari

merupakan salah satu desa yang melaksanakan program desa wisata yang ada di Kota Batu.

D. Sumber Data

Sumber data yaitu menyangkut orang atau pihak yang disajikan sebagai nara sumber. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut Moleong (2002:112) adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Dari penjelasan di atas, maka sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumbernya. Sumber tersebut diperoleh melalui informan yang berhubungan dengan objek penelitian meliputi wawancara mendalam.

2. Data Sekunder

Data yang bersumber dari media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain). Yakni data yang diperoleh melalui dokumen atau arsip, peraturan-peraturan, laporan dan referensi dari internet maupun koran yang melengkapi serta memperkaya sumber data primer.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Yaitu kegiatan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh data yang aktual dari sumber data. Menurut Margono (199) yang dikutip oleh Zuriah (2009:173) observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. Berdasarkan jenisnya, observasi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut :

- a. Observasi langsung, yaitu observasi yang dilakukan dimana observer berada bersama objek yang diselidiki.
- b. Observasi tidak langsung yaitu observasi atau pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang kan diteliti misalnya melalui film, rangkaian slide atau rangkaian foto.

2. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan sumber-sumber data primer yang telah ditetapkan sebelumnya untuk memperoleh data yang aktual yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Dalam kegiatan wawancara terjadi hubungan antara dua orang atau lebih, dimana keduanya berperilaku sesuai dengan status dan peranan mereka masing-masing dalam Idrus (2009:120). Adapun pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bapak Sariono selaku Kepala Sub Bidang Pariwisata dan Pembangunan

- b. Bapak Rizaldi selaku Kepala Penyusunan Program Bappeda Kota Batu
- c. Bapak Andi Susilo selaku Kepala Desa Gunungsari Kota Batu
- d. Ibu Yuliati selaku Petani dan Pengusaha Bunga Mawar Desa Gunungsari
- e. Bapak Amir selaku Ketua Kelompok Petani Bunga
- f. Mbak Afrianty selaku wisatawan Desa Wisata
- g. Mas Sukma selaku wisatawan Desa Wisata

Tabel 3.1 Tehknik Pengumpulan Data

DATA	SUMBER DATA	TEKHNIK	FOKUS
Peta Kota Batu dan Peta Desa	BAPPEDA	Dokumentasi	Gambaran Umum
Program Desa Wisata	BAPPEDA	Dokumentasi	Implementasi Program
Tantangan Program	BAPPEDA & Desa Gunungsari	Dokumentasi & Observasi Langsung, Wawancara	Permasalahan Implementasi Program
Aktor Implementasi Program	BAPPEDA	Dokumentasi	Pelaksana Program
Foto	Desa Gunungsari dan Web	Observasi Langsung & Observasi Tidak Langsung	Inovasi dan Dokumentasi

3. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen, data atau arsip yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh penelitian dalam mengumpulkan data yang mendukung penelitiannya. Berdasarkan Arikunto dalam Zuriyah (2009:168) kualitas instrumen akan menentukan kualitas data yang terkumpul. Dalam penelitian ini peneliti merupakan instrumen utama penelitian yang mempunyai fungsi sebagai pengumpul data dengan menggunakan panca inderanya untuk menangkap fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Berikut adalah instrumen penunjang yang dibutuhkan dalam penelitian ini :

1. Peneliti sendiri

Peneliti sendiri dengan melakukan pengamatan atau pencatatan terhadap fenomena yang terjadi di tempat penelitian.

2. Pedoman wawancara (*interview guide*)

Yaitu serangkaian pertanyaan yang memfokuskan pada permasalahan penelitian yang digunakan sebagai pedoman bagi peneliti dalam melakukan wawancara dengan informan.

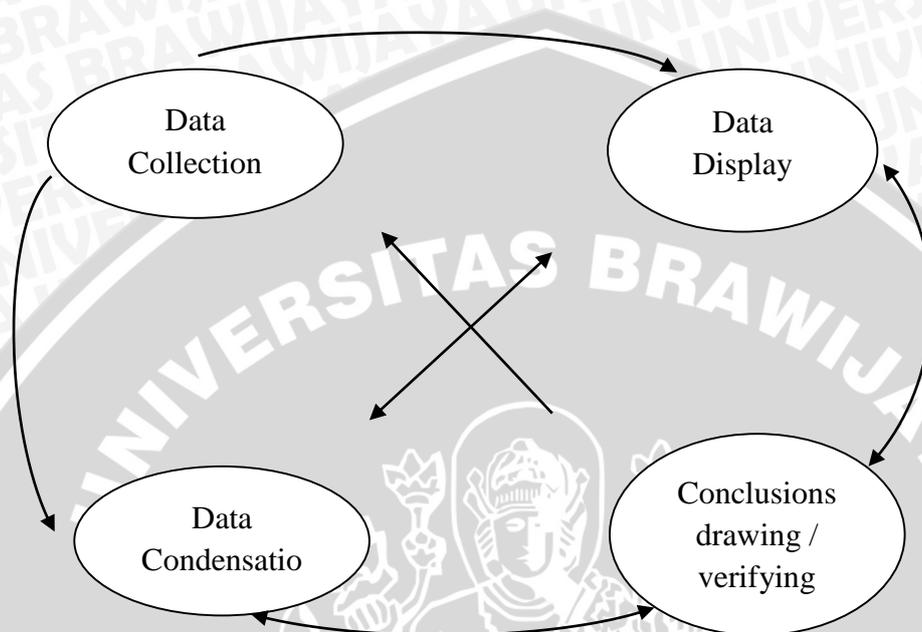
3. Perangkat penunjang

Perangkat penunjang ini meliputi alat tulis menulis dan buku catatan untuk mencatat data-data di lapangan dan kamera untuk mendokumentasikan kegiatan

G. Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga

komponen. Alur kegiatan dalam analisa kualitatif menurut Milles dan Hubberman dalam Saldana (2014:33) yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi :



Sumber : Model analisa data interaktif (Miles and Huberman 2014:33)

Dari komponen gambar analisis data Miles and Huberman dalam Saldana (2014:33) di atas dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu :

1. Kondensasi data

Kondensasi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang didapat dari lapangan. Kondensasi data berlangsung secara terus menerus selama penelitian bahkan sebenarnya kondensasi data dapat dilakukan sebelum data terkumpul secara menyeluruh. Kondensasi data dilakukan dengan cara data diperoleh di lokasi penelitian dituangkan dalam uraian atas laporan secara lengkap dan terinci.

Selanjutnya laporan tersebut disederhanakan, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya. Hal ini dilakukan secara terus menerus, baik selama proses penelitian berlangsung maupun pada tahap analisa data selanjutnya yaitu penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hal ini bertujuan untuk memperkuat data sebuah konsep yang berbeda dengan reduksi data yang terkesan melemahkan data dengan membuang data yang diperoleh di lapangan.

2. Penyajian Data

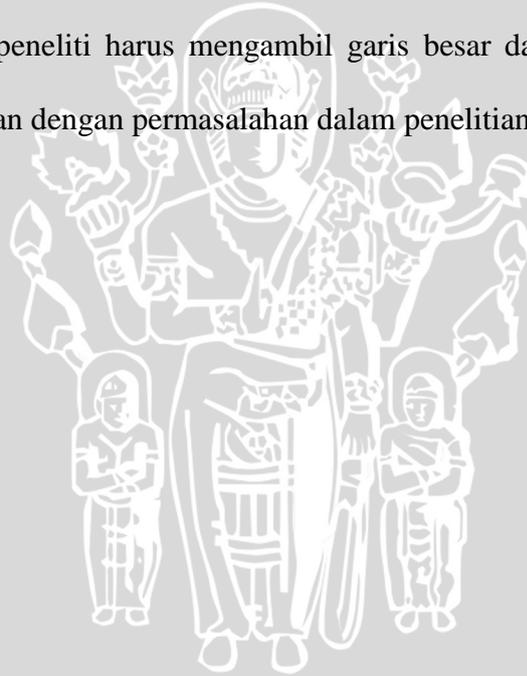
Data yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks bersifat naratif. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Adanya penyajian data dapat memudahkan peneliti untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Contohnya seperti dari data hasil wawancara antara peneliti dengan partisipan yang sudah dikondensasi, peneliti membuat tabel berdasarkan pertanyaan sesuai dengan permasalahan penelitian dan diuraikan inti dari jawaban pertanyaan tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Kegiatan ini bertujuan untuk mencari makna yaitu mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi yang memungkinkan adanya alur sebab akibat dan proposisi. Verifikasi berarti meninjau ulang pada catatan lapangan untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, juga upaya-upaya yang luas untuk mendapatkan salinan suatu temuan dalam data yang lain dan data harus diuji kebenarannya. Kesimpulan awal yang dikemukakan sifatnya

masih sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Namun apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Contohnya setelah melalui proses kondensasi data dan penyajian data, data hasil penelitian yang diperoleh peneliti harus disesuaikan dengan teori yang sudah ada. Jika dalam data dengan teori tersebut terdapat sebuah hubungan atau kesamaan, maka peneliti harus mengambil garis besar dari hasil penelitian tersebut disesuaikan dengan permasalahan dalam penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kesimpulan Data

1. Gambaran Umum Kota Batu

Kota Batu merupakan salah satu kota yang baru terbentuk pada tahun 2001 sebagai pecahan dari Kabupaten Malang. Sebelumnya wilayah kota batu merupakan bagian dari Sub Satuan Wilayah Pengembangan 1 (SSWP 1) Malang Utara. Pada tahun 2010 Kota Batu terbagi menjadi tiga kecamatan yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo, Kecamatan Bumiaji dan terdiri dari 24 desa/kelurahan, 231 RW dan 1.092. Kota ini sedang mempersiapkan diri untuk mampu melakukan perencanaan, pelaksanaan serta mengevaluasian proyek-proyek pembangunan secara mandiri sehingga masyarakat di wilayah ini semakin meningkat kesejahteraannya (Batu Dalam Angka 2016).

a. Kondisi Geografis

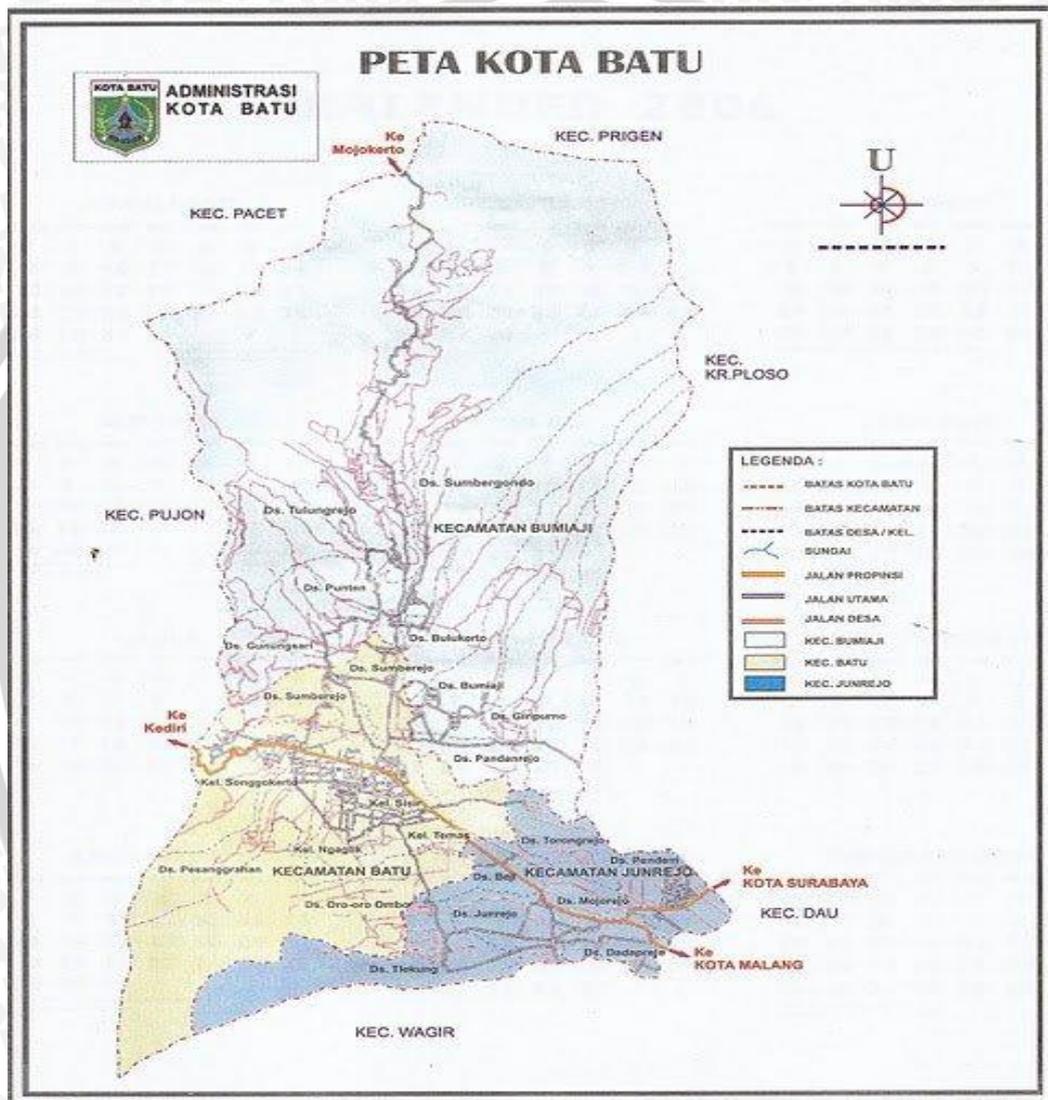
Kota Batu dapat dibagi mejadi dua bagian utama yaitu daerah lereng/bukit dengan proporsi lebih luas dan daerah daratan. Luas kawasan Kota Batu secara keseluruhan adalah sekitar 19.908,72 ha atau 0,42 persen dari total luas Jawa Timur. Dilihat dari aspek astronomi, Kota Batu terletak pada posisi 122°17'-122°57' Bujur Timur dan 7°44'-8°26' Lintang Selatan. Batas wilayah Kota Batu sebagai berikut :

- 1) Utara : Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan
- 2) Selatan : Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang



3) Barat : Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang

4) Timur : Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang



Gambar 4.1 : Peta Kota Batu (Sumber : Bappeda Kota Batu 2017)

Kota Batu yang terletak 800 meter diatas permukaan air laut ini dikarunia keindahan alam yang memikat. Potensi ini tercermin dari kekayaan produksi pertanian, buah dan sayuran, serta panorama pegunungan dan perbukitan.

Sehingga dijuluki *the real tourism city of Indonesia* oleh Bappenas. Kota Batu memiliki 3 (tiga) buah gunung yang telah dikenal dan telah diakui secara nasional. Gunung-gunung tersebut adalah Gunung Pandernan (2010 m), Gunung Welirang (3156 m), Gunung Arjuno (3339 m) dan masih banyak lagi lainnya. Dengan kondisi topografi pegunungan dan perbukitan tersebut menjadikan kota Batu terkenal sebagai daerah dingin. Tahun 2016 temperatur rata-rata kota Batu 23,5°C, dengan temperatur tertinggi 29,1°C dan terendah 17,5°C. Temperatur rata-rata ini relatif lebih tinggi dua derajat daripada temperatur rata-rata sepuluh tahun yang lalu. Rata-rata kelembaban nisbi udara 80 % dan kecepatan angin 41,2 km/jam. Curah hujan tertinggi di bulan Desember 2013 sebesar 570,5 mm dalam hari hujan 23 hari.

Secara geologi batuan pembentuk tanah yang terdapat di wilayah Kota Batu sebagian besar dari jenis andosol, dimana jenis tanah ini memiliki karakteristik lahan tanah yang paling subur. Jenis tanah lain yang terdapat di Kota Batu antara lain tanah kambisol berupa jenis tanah yang cukup subur, tanah alluvial berupa tanah yang kurang subur dan mengandung kapur serta latosol. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Kota Batu merupakan wilayah yang subur untuk pertanian karena jenis tanahnya merupakan endapan dari sederetan gunung yang mengelilingi Kota Batu, sehingga mata pencaharian penduduk didominasi oleh sektor pertanian.

Kota ini juga berada pada jalur transit yang dapat menjadi pilihan untuk melanjutkan perjalanan melalui jalur-jalur selatan menuju kota-kota di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Sebagai daerah yang topografinya sebagian besar

wilayah perbukitan, Kota Batu memiliki pemandangan alam yang indah sehingga banyak dijumpai tempat-tempat wisata yang mengandalkan keindahan alam pegunungan disertai wisata air terjun, kolam renang dan sebagainya. Kondisi topografi pegunungan dan perbukitan tersebut menjadikan Kota Batu terkenal sebagai daerah dingin.

b. Visi dan Misi Kota Batu

- Visi Kota Batu

Sentra pertanian organik, kota pariwisata internasional, sektor pendidikan yang mampu mendukung sektor pertanian organik dan pariwisata yang menjadi unggulan Kota Batu, dan Sumber daya alam, manusia, dan budaya yang dikelola secara baik.

Misi Kota Batu.

- Misi Kota Batu

Mengembangkan pertanian organik dan perdagangan hasil pertanian organik, Meningkatkan posisi peran dari Kota Sentra Pariwisata menjadi Kota Kepariwisataan Internasional, Optimalisasi investasi daerah, Pengembangan infrastruktur (sektor fisik) khususnya perkantoran pemerintah, fasilitas publik, prasarana dan sarana lalu lintas, Peningkatan kualitas pendidik dan lembaga pendidikan, Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, Pemberdayaan masyarakat melalui koperasi dan UKM, Menciptakan stabilitas dan kehidupan politik di Kota Batu yang harmonis dan demokratis.

c. Potensi Wisata Kota Batu

Wilayah Kota Batu merupakan wilayah yang memiliki panorama yang indah dan sejuk serta mempunyai spesifikasi khusus yaitu dikelilingi Gunung Panderman, Gunung Banyak, Gunung Welirang, Gunung Bokong sehingga wilayah ini berpotensi sebagai daerah wisata. Jenis wisata tersebut antara lain :

1) Wisata Agro dan Wisata Bunga

Kota Batu memiliki ciri khas dengan agro wisatanya berupa tanaman bunga, apel, strawberry dan sayur mayur. Berikut obyek wisata agro yang menawarkan wisata agro dan bunga yaitu Kusuma Agrowisata yang menawarkan fasilitas antara lain seperti petik buah, kebun binatang, mini green house, sepeda gunung dan tempat bermain anak-anak kemudian terdapat juga Wisata Agro Punten dan Wisata Bunga Sidomulyo.

2) Wisata Alam

Kondisi geografis Kota Batu yang dikelilingi dengan pegunungan dengan udara yang sejuk sangat cocok untuk berwisata alam. Bagi wisatawan yang ingin melepaskan kepenatan ataupun *refreshing* dapat melakukan aktivitas wisata sambil menikmati keindahan alam Kota Batu.

Wisata alam yang dapat dikunjungi di Kota Batu adalah Pemandian Air Panas Cangar, Pemandian Air Panas Songgoriti, *Camping Ground* Air Terjun Coban Talun, Taman Hutan Raya (TAHURA) Junggo dan Air Terjun Coban Rais.

3) Wisata Budaya

Kebudayaan merupakan salah satu bagian dari kehidupan manusia. Di Kota Batu, kebudayaan tradisional tumbuh dan berkembang dengan baik sebagai suatu tradisi budaya yang dipegang teguh masyarakatnya. Keindahan tradisi budaya Batu dapat dilihat pada atraksi wisata seperti sedekah bumi, gerebeg desa, tari sembrana, dokar wisata.

4) Wisata Rekreasi

Di wilayah Kota Batu telah dibangun tempat-tempat rekreasi wisata pendidikan dan keluarga untuk menambah daya tarik wisata di Kota Batu. Obyek wisata di Kota Batu antara lain Taman Rekreasi Jatim Park, Taman Rekreasi Air Panas Songgoriti, Taman Rekreasi Kolam Renang Selecta dan Taman Rekreasi Nirwana.

5) Wisata Minat Khusus

Wisata minat khusus merupakan wisata yang diselenggarakan dengan tema khusus seperti olahraga paralayang, arung jeram, *mountain bike* dan wisata bumi perkemahan.

6) Wisata Sejarah

Wisata sejarah yang ada di Kota Batu berupa situs peninggalan bangunan candi, rumah peristirahatan. Obyek wisata sejarah yang dapat kita jumpai adalah Candi Supo Songgoriti, Wisma Bakti Selecta, Kartika Wijaya, Goa Jepang Cangar, Goa Jepang Tlekung dan Goa Jepang Coban Talun.

7) Wisata Religi

Wisata religi merupakan salah satu obyek daya tarik wisata mengenai seni arsitektur bangunan tempat peribadatan agama di Kota Batu. Keberadaan bangunan dan tempat beribadah di Kota Batu begitu terawat dan terjaga sehingga menarik sebagai tempat wisata, diantaranya adalah Masjid An-Nur, Gereja Tua Jago, Vihara Budha Kertarajasa dan Klenteng Dewi Kwam Im Thong.

8) Wisata Ziarah

Wisata ziarah merupakan obyek wisata bagi wisatawan yang akan melakukan aktivitas wisata ziarah. Berikut tempat yang ada di Kota Batu dan dijadikan sebagai tempat wisata ziarah yaitu : Makam Pesarehan Mbah Wastu terletak di Bumiaji merupakan cikal bakal nama Kota Batu, Makam Pesarehan Mbah Pathok terdapat di wilayah Songgoriti yang konon Mbah Pathok membuka wilayah/ babat alas daerah Songgoriti.

9) Wisata Husada

Wisata husada merupakan wisata yang sangat diminati bagi para wisatawan khususnya bagi mereka yang sangat mengagumi tanaman obat herbal seperti kunir, jahe, temu lawak dll (tanaman toga). Wisata tersebut dapat dijumpai di Balai Matera Medika.

10) Wisata Kuliner

Wisata kuliner merupakan wisata dengan daya tarik beraneka ragam makanan yang dijual bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu.

Di Kota Batu terdapat restoran dan rumah makan yang menjual aneka makanan.

2. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu

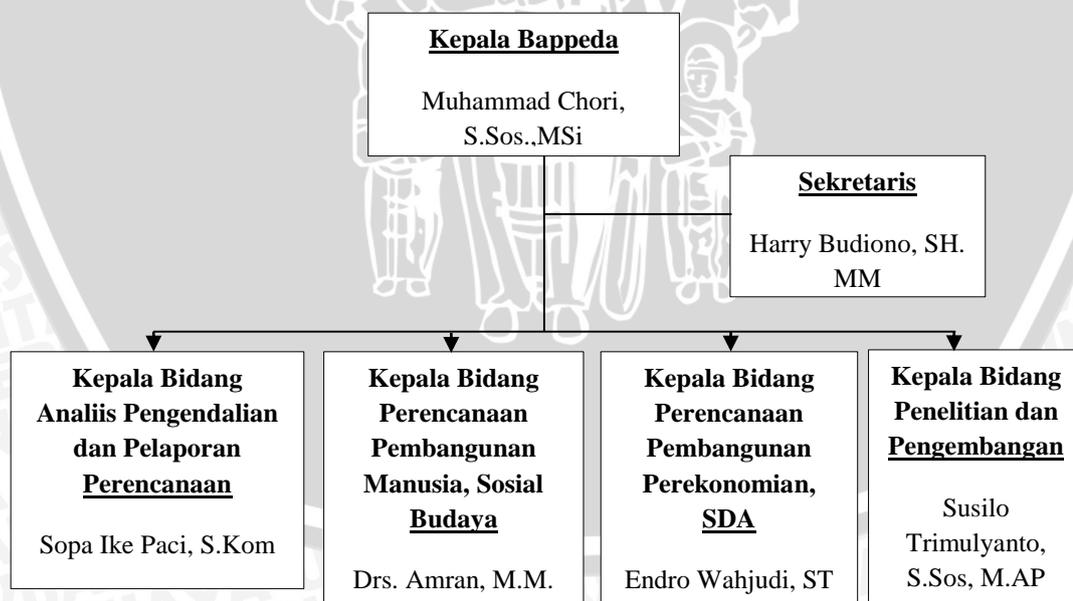
Pemerintah Kota Batu terbentuk semenjak Kota Batu menjadi daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan pelaksanaan urusan wajib dalam perencanaan pembangunan di Kota Batu, khususnya terkait dengan penyusunan kebijakan dan perencanaan, maka dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Batu. Bappeda sebagai unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan melaksanakan perumusan kebijakan perencanaan daerah, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan masing-masing satuan kerja perangkat daerah.

Dalam pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah. Pemerintah Kota Batu melakukan perubahan organisasi perangkat daerah dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, dipimpin oleh kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Badan ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bappeda mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Berikut struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu.



Gambar 4.2 : Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu Tahun 2017 (Sumber : Profil dan Struktur Bappeda 2017)

Program desa wisata ini dibawah oleh bidang perencanaan ekonomi badan perencanaan pembangunan daerah. Dalam bidang perencanaan ekonomi yang dipimpin oleh bapak Sariono ini bertanggungjawab untuk pengembangan desa wisata, selain itu juga melakukan promosi dan publikasi desa wisata Kota Batu. Karena program ini adalah program baru dan banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan desa wisata ini.

3. Gambaran Umum Desa Gunungsari

Desa Gunungsari merupakan satu-satunya desa di wilayah Kecamatan Bumiaji yang memiliki potensi budidaya bunga potong mawar yang besar dengan cakupan luas lahan mencapai lebih dari 60 hektar. Desa Gunungsari adalah desa yang terkenal dengan pertanian sayur dan peternakan sapi perah. Tetapi sejak tahun 2005 hingga sekarang Desa Gunungsari terkenal dengan Desa penghasil bunga mawar potong yang dipasarkan ke berbagai daerah bahkan keluar pulau Jawa, misalnya ke Ujung Pandang, Medan, Bali dan daerah-daerah lainnya. Desa Gunungsari yang berada di lingkungan Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Dalam kehidupan sehari-hari, di Desa Gunungsari ini ditemukan bahwa mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian tetapi ada juga yang bekerja di sektor peternakan. Desa Gunungsari terletak di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu dengan luas desa sekitar 530 Ha. Desa Gunungsari terbagi atas 10 dusun yaitu: Prambatan, Pagergunung, Kapru, Kandangan, Talangrejo, Brumbung, Ngebruk, Jantur, Claket, Brau. Adapun batas-batas wilayah desa Gunungsari adalah sebagai berikut: sebelah utara :

Desa Gunungsari berada sedikit ke dalam dari jalan utama, sehingga akses untuk ke kota memakan waktu yang cukup lama. Sarana transportasi yang umumnya digunakan oleh para penduduk adalah ojek dan kendaraan milik pribadi.

B. Kesimpulan Data Fokus

1. Implementasi Pengembangan Program Desa Wisata di Desa Gunungsari

Kota Batu

a. Implementasi Pengembangan Program Desa Wisata di Desa Gunungsari Kota Batu

Implementasi pengembangan program desa wisata di desa Gunungsari ini menggunakan model George C. Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Kesimpulan datanya sebagai berikut :

a) Komunikasi

Kota Batu memang terkenal dengan pariwisatanya, berbagai jenis macam paket wisata disajikan untuk para wisatawan yang hendak berkunjung ke kota ini. Selain terdapat wisata modern dan wisata alam di Kota Batu juga terdapat desa wisata yang memiliki daya tarik khas dari setiap desa. Desa wisata merupakan salah satu program untuk menjadikan potensi pertanian di Kota Batu ini menjadi salah satu obyek wisata. Desa wisata merupakan sebuah kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata dengan suatu bentuk integrasi antara aksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan.

Salah satu pelaksana program desa wisata ini adalah Gunungsari yang memiliki pemandangan alam, wisata budaya, wisata petik bunga dan peternakan susu sapi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sariono Kepala sub bidang pariwisata dan pembangunan pada tanggal 11 Oktober 2016 di kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu menyatakan bahwa :

“Kota Batu sangat terkenal dengan sebutan kota wisata, berbagai jenis wisata ditawarkan mulai dari wisata modern, wisata agro, wisata kuliner dan lain-lain. Pemerintah Kota Batu melakukan suatu bentuk inovasi pariwisata baru yaitu dengan membentuk desa wisata di Kota Batu dengan tujuan mendongkrak penghasilan masyarakat di setiap desa tersebut termasuk di Desa Gunungsari sehingga tidak hanya wisata modern saja yang terus berkembang, akan tetapi terdapat desa wisata juga akan terus menghadirkan bentuk wisata yang dapat menarik pengunjung untuk datang dengan masih di bawah pengawasan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah”

Dalam sebuah implementasi pengembangan program tentunya terdapat sebuah penyampaian informasi tentang latar belakang, maksud dan tujuan sebuah program yang akan dilaksanakan. Informasi tersebut tentu dapat dilakukan dengan cara komunikasi, bentuk komunikasi yang dilakukan untuk menyampaikan pengembangan program desa wisata di Desa Gunungsari ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Batu melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Peran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yaitu memberikan sosialisasi tentang pengetahuan untuk sadar wisata kepada masyarakat kepala desa atau perangkat – perangkat desa yang bersangkutan. Sosialisasi mengenai program desa wisata di Gunungsari berlangsung di balai

desa. Hal tersebut juga dinyatakan oleh Pak Andi Susilo sebagai kepala desa di desa Gunungsari pada tanggal 15 Desember 2016 sebagai berikut :

“Program desa wisata yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat ini disampaikan langsung secara tatap muka oleh tiap perangkat desa atau RT setempat yang sudah mendapatkan sosialisasi terlebih dahulu dari saya. Setelah para perangkat desa mengerti, kemudian sosialisasi tentang program desa wisata ini disampaikan secara langsung kepada masyarakat tentang tujuan dan manfaat dari program desa wisata di Gunungsari. Informasi ini disambut baik oleh masyarakat sekitar, mengingat banyak masyarakat disini yang berprofesi sebagai petani sehingga dengan adanya program desa wisata diharapkan dapat menarik lebih banyak pengunjung nantinya untuk berwisata langsung ke desa”

Kejelasan informasi tentang program desa wisata yang disampaikan kepada masyarakat Desa Gunungsari sudah cukup jelas. Masyarakat merasa senang dan dapat memahami maksud dari tujuan program desa wisata ini dengan salah satu tujuannya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan para petani dan penduduk sekitar desa. Memiliki pemandangan alam yang indah serta tanah yang subur membuat kebanyakan para penduduk menanam bunga. Di desa Gunungsari dikenal sebagai penghasil bunga nya yaitu bunga potong mawar nya. Salah satu wisata yang ditawarkan di desa wisata ini adalah wisatawan bisa memetik atau melihat langsung bagaimana cara memetik, memanen ataupun pada saat awal menanamnya. Berdasarkan hasil wawancara ketua kelompok petani Bunga Bapak Amir pada tanggal 15 November 2016 di Desa Gunungsari sebagai berikut :

“Mata pencaharian penduduk disini memang mayoritas sebagai petani bunga, biasanya mereka mengandalkan penghasilannya hanya dari tengkulak dan dijual sendiri. Kemudian program desa wisata ini disosialisasikan kepada masyarakat setempat dengan sebelumnya diadakan seperti pelatihan menerima wisatawan, bagaimana menyambutnya serta

berinteraksi untuk ikut melihat dan merasakan secara langsung bagaimana cara bercocok tanam di desa”



Gambar 4.4 Perkebunan Bunga Mawar Desa Gunungsari Kota Batu (Sumber : Dokumentasi Pribadi)

Bentuk komunikasi yang terjadi antara pemerintah Kota Batu melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kepada masyarakat dalam implementasi pengembangan program desa wisata di Desa Gunungsari ini sudah berjalan cukup baik. Masyarakat bisa menerima dan bisa berdampak baik bagi kehidupan para petani serta wisata-wisata lain yang ditawarkan. Seperti meningkatkan pendapatan masyarakat dan secara tidak langsung program ini dapat memberdayakan masyarakat. Dengan adanya desa wisata ini diharapkan juga dapat lebih memajukan lagi pariwisata yang ada di Kota Batu.

b) Sumber Daya

Selain komunikasi, terdapat juga faktor lain yang dapat mempengaruhi implementasi sebuah pengembangan program. Sumber daya yang menunjang untuk mendukung berjalannya suatu pengembangan program harus mencukupi. Sumber daya tersebut bisa berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya anggaran. Untuk sumber daya alam, Kota Batu termasuk wilayah yang kaya akan keindahan alamnya. Desa Gunungsari memiliki lahan pertanian yang berpotensi serta bervariasi untuk ditanami bunga.

Sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi pengembangan program ini tentu saja Pemerintah Kota Batu dan masyarakat. Masyarakat desa Gunungsari sebagai penerima langsung sekaligus pelaksana program berperan penting dalam keberhasilan program ini, karena program ini memang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Andi Susilo selaku kepala desa Desa Gunungsari pada tanggal 15 Desember 2016 di Kantor Kepala Desa Gunungsari yaitu :

“Masyarakat sangat berperan dalam program ini, apabila program ini sebelumnya tidak bisa diterima masyarakat maka tidak dapat berjalan. Oleh karena itu setelah program dapat dukungan dari masyarakat, program ini sedikit demi sedikit dapat berjalan dengan baik, karena sebelumnya sudah diberi pengetahuan dan penyuluhan serta pengetahuan tentang wisata Masyarakat Gunungsari menjadi salah satu faktor yang dapat menentukan dimana program ini berhasil atau tidak dalam pelaksanaannya”

Selain sumber daya manusia, sumber daya anggaran adalah suatu hal yang penting pula dalam mendukung berjalannya suatu program. Dana yang cukup dan memadai pasti akan menjadi dorongan dalam berlangsungnya program desa wisata ini, sumber dana yang dipergunakan dalam kegiatan ini

adalah dari APBD. Kalau dana sudah tersedia, maka masyarakat tinggal menjalankan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rizaldi selaku Kepala penyusunan program pada tanggal 11 Oktober 2016 di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yaitu sebagai berikut :

“Di program desa wisata, untuk sumber daya anggaran sudah ada dalam APBD Kota Batu. Pemerintah Kota Batu memang menyediakan dana untuk kepariwisataan yang ada, termasuk desa wisata ini. Dana akan disalurkan ke setiap desa yang sudah ditunjuk sebagai desa wisata termasuk di Desa Gunungsari.”

Sumber-sumber daya yang terdapat di desa Gunungsari antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya anggaran sudah cukup terpenuhi. Untuk sumber daya alamnya yang memiliki keindahan alam dan sangat berpotensi untuk pertanian kemudian dijadikan wisata. Selanjutnya untuk sumber daya manusia yaitu masyarakat di Gunungsari bisa menerima dan melaksanakannya karena sebelumnya diadakan terlebih dahulu sosialisasi atau penyuluhan tentang program desa wisata ini. Kemudian sumber daya anggaran untuk program desa wisata diperoleh dari dana APBD pemerintah Kota Batu yang kemudian disalurkan kepada setiap desa termasuk Gunungsari.

c) Disposisi

Setelah sumber daya, terdapat pula disposisi yang merupakan kemauan atau kecenderungan dari pelaksana untuk menjalankan suatu program. Pelaksana program disini terlihat baik, terlihat dari respon program desa wisata yang diberikan kepada mereka. Mereka adalah para masyarakat, masyarakat Gunungsari semangat dan perlahan menyadari untuk sedikit demi sedikit

mengubah dan mengembangkan desa Gunungsari sebagai desa wisata, karena program desa wisata ini juga butuh proses. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat desa Gunungsari Bu Yuliati pada tanggal 09 Januari 2017 di Desa Gunungsari :

“Memang setelah adanya program desa wisata di Gunungsari, kami merasa senang. Pendapatan bisa lebih daripada biasanya mbak karena kunjungan para wisatawan ke desa wisata bisa mendapatkan keuntungan daripada biasanya. Ini semua karena warga Gunungsari mendapatkan tambahan dari wisatawan yang langsung memetik bunga ke perkebunan. Oleh karena itu para warga menjadi lebih semangat dan antusias dengan adanya program desa wisata disini”

Program desa wisata tentu saja dapat berjalan jika pelaku siap dan mau melaksanakannya. Apalagi untuk menggerakkan sekelompok masyarakat desa untuk melaksanakan pengembangan program desa wisata dengan memanfaatkan segala potensi dan budaya yang ada di desa tersebut tentu tidak mudah begitu saja. Berdasarkan wawancara dengan Pak Andi Susilo selaku kepala desa Gunungsari pada tanggal 15 Desember 2016 di Kantor Kepala desa setempat menyatakan bahwa :

“pelaksana dalam program ini yaitu masyarakat desa sudah cukup baik dalam merespon program desa wisata yang telah diberikan kepada mereka. Semangat pada masyarakat mulai tinggi dan perlahan mereka juga menyadari pentingnya potensi wisata desanya untuk dikembangkan menjadi lebih maju. Kecenderungan pelaksana dalam melakukan tugasnya sudah berjalan dengan baik. Dengan harapan mereka dapat dengan cepat mewujudkan desanya menjadi desa wisata dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Gunungsari”

Para masyarakat atau warga Gunungsari mempunyai kemauan yang cukup baik dalam melaksanakan program desa wisata. Warga masyarakat merasa terbantu perekonomiannya dengan kunjungan para wisatawan yang datang ke desanya. Mereka menyadari bahwa untuk melakukan suatu

perubahan untuk desanya diperlukan proses, namun dengan semangat dan kemauan yang tinggi serta dukungan dari pemerintah mereka yakin dapat melaksanakan program desa wisata ini dengan baik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Gunungsari.

d) Struktur Birokrasi

Pada struktur birokrasi yang terdapat dalam implementasi pengembangan program desa wisata terlihat sudah cukup baik. Dalam pelaksanaannya hubungan antara kepala desa dengan masyarakat dalam program ini terjalin dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andi Susilo selaku Kepala Desa Gunungsari pada tanggal 15 Desember 2016 di Kantor Kepala desa setempat yaitu :

“Sebagai kepala desa, tentunya saya ingin merubah keadaan masyarakat disini lebih baik. Dengan adanya pengembangan program desa wisata ini merupakan salah satu yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu saya sebagai kepala desa selalu terbuka untuk masyarakat apabila ada yang belum paham bisa menanyakan langsung secara personal. Hubungan yang baik dengan masyarakat yang nantinya juga akan menjadikan program ini dapat berjalan dengan baik pula”

Selain itu keterbukaan dan hubungan antara masyarakat satu dengan yang lain terjalin cukup baik, mengingat mereka adalah sebagai pelaksana pengembangan program desa wisata. Berbagai kegiatan pariwisata juga mereka lakukan secara bersama sesuai dengan pembagian tugas yang sudah ditentukan dari kepala desa sehingga tidak terlalu panjang dan rumit dapat dipahami oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Yulianti yang berprofesi sebagai petani mawar pada tanggal 09 Januari 2017 di Desa Gunungsari yaitu :

“Masyarakat disini memang mayoritas sebagai petani, dalam menjalankan sebuah program tentu saja diperlukan sebuah proses. Hubungan antara kami dengan kepala desa bisa dibilang baik karena baik dari kepala desa dan kami sama-sama terbuka seperti tidak ada perbedaan serta mendukung terwujudnya keberhasilan dalam desa wisata”

Dari sini terlihat bahwa struktur birokrasi dalam implementasi pengembangan program desa wisata tidak terlalu rumit dan panjang. Sehingga dalam pelaksanaannya aktifitas dapat berjalan secara fleksibel dan teratur. Hubungan yang terjalin antara orang atas dan bawah yang layaknya seperti organisasi bersifat terbuka sehingga memudahkan pelaksana yaitu masyarakat untuk melaksanakan pengembangan program ini. Selain itu dukungan antara satu sama lain juga dapat membantu keberhasilan dan kelancaran dalam implementasi pengembangan program desa wisata.

Kota Batu memiliki banyak sekali keindahan alam. Selain mempunyai banyak wisata alam maupun buatan, terdapat desa-desa di Kota Batu juga memiliki daya tarik kunjungan bagi para wisatawan. Desa wisata adalah pembangunan berkelanjutan untuk pedesaan dalam bidang pariwisata. Yang menjadi utama dari desa wisata ini bisa diwujudkan dalam gaya hidup dan kualitas hidup masyarakatnya. Keaslian tersebut juga harus didukung dengan keadaan ekonomi, fisik dan sosial daerah pedesaan tersebut, seperti misalnya ruang, warisan budaya, kegiatan pertanian, bentangan alam, jasa, pariwisata sejarah dan budaya yang unik dan eksotis khas desa tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sariono sebagai Kepala sub bidang pariwisata dan

pertanian pada tanggal 15 November 2016 di kantor Bappeda Kota Batu menjelaskan tentang desa wisata :

“Kota Batu memiliki banyak wisata yang dapat dijadikan objek, setiap desa memiliki keunggulan masing-masing sehingga pemerintah membentuk program Desa Wisata. Seperti salah satu contohnya itu ya Desa Gunungsari yang memiliki keunggulan bunga potongnya. Sejauh ini sih program sudah berjalan baik tapi memang ada beberapa kendala untuk kedepannya. Semoga nanti kedepannya masih bisa di perbaiki mbak.”

Desa wisata adalah berkaitan dengan banyak hal yang akan mampu dijual kepada para wisatawan dan menghasilkan bagi para penyedia layanan wisata dan masyarakat umum di dalamnya. Berbagai hal yang bisa dijual kepada wisatawan seperti budaya atau kesenian daerah yang disuguhkan, kemudian makanan dan minuman tradisional khas masyarakat, kerajinan sebagai cinderamata dan keindahan serta keunikan alam yang di miliki oleh Desa Wisata Kota Batu tersebut. Desa wisata Kota Batu merupakan program dari pemerintah Kota Batu untuk memberdayakan masyarakat Kota batu. Terdapat beberapa program untuk desa wisata Kota Batu yaitu :

a. Memberikan sarana pendukung untuk desa wisata Kota Batu

- 1) Akomodasi adalah sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk. Jadi hal ini akan digunakan untuk wisatawan bermalam di desa wisata Kota Batu ini. Seperti misalnya memberikan bantuan untuk membangun sebuah *homestay* atau memperbaiki rumah warga sekitar untuk ditempati wisatawan.

- 2) Infrastruktur adalah prasarana publik dalam mendukung kegiatan ekonomi suatu Negara. Sehingga pemerintah Kota Batu menyediakan infrastruktur berupa transportasi, listrik, air bersih, drainase dan saluran telepon.

b. Memperluas promosi desa wisata Kota Batu

- 1) Promosi secara langsung

Promosi secara langsung dapat dilakukan dengan mengikuti pameran-pameran yang di diadakan di pusat-pusat pembelanjaan ataupun yang diadakan oleh pemerintah kota untuk menarik minat wisatawan dengan menunjukkan budaya ataupun atraksi yang terdapat dalam desa wisata maupun produk-produk yang dihasilkan oleh desa wisata tersebut.

- 2) Promosi secara tidak langsung

Promosi tidak langsung yaitu dengan cara tanpa interaksi langsung dengan wisatawan. Bentuk kegiatan yang terjadi semisal: penulisan buku-buku tentang desa yang berkembang, kehidupan desa, seni dan budaya lokal, arsitektur tradisional, latar belakang sejarah, pembuatan kartu pos dan sebagainya. Kemudian selain dengan pembuatan buku bisa dikenalkan melalui website desa wisata, menjelaskan apa saja yang terdapat desa wisata Kota Batu tersebut.

c. Mengembangkan potensi desa wisata

- 1) Mengembangkan potensi alam

Desa wisata Kota Batu memiliki alam yang indah serta hasil dari alam tersebut juga melimpah, sehingga perlu dikembangkan supaya menghasilkan produk yang lebih beragam. Sehingga desa wisata ini lebih berinovasi lagi.

2) Mengembangkan potensi budaya

Desa wisata Kota Batu merupakan desa yang kaya akan budaya dan keunikan desa untuk kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar. Untuk mengembangkan budaya yang sudah hampir punah di era modernisasi ini, maka pemerintah Kota Batu akan membuka panggung untuk menampilkan budaya-budaya yang ada di desa wisata tersebut.

3) Mengembangkan potensi masyarakat

Mempersiapkan masyarakat yang secara terbuka untuk menerima menyambut para wisatawan, dapat menjadi pemandu wisata lokal dan diberikan pembelajaran bahasa Inggris untuk menyambut wisatawan asing. Serta masyarakat harus melayani dengan penampilan yang rapi dan bersih untuk menyambut wisatawan baik lokal maupun asing.

Desa Gunungsari merupakan salah satu dari desa wisata yang terdapat di Kota Batu. Desa Gunungsari merupakan desa yang terletak di kecamatan Bumiaji. Luas desa ini 453,037 ha dengan jarak desa ke kecamatan 2,5 km. Dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Potensi yang terdapat di desa ini adalah pertanian. Dan di desa ini juga terdapat tempat ibadah masjid, terdapat Para wisatawan yang berkunjung ke Desa Gunungsari akan mendapatkan fasilitas sebagai berikut :

a) Pemandangan Alam

Pemandangan Dusun Brau terkenal didaerah dengan mengunjungi tempat ini, pengunjung dapat melihat pemandangan pegunungan yang masih alami,disini para wisatawan dapat mengambil foto sebagai cinderamata. Selain itu juga mempunyai air terjun Cendana, airterjun tersebut juga memiliki pemandangan yang indah pula. Jadi wisatawan akan mendapatkan pemandangan yang indahyang tidak bisa dilihat di tempat manapun.

b) Wisata Budaya

Jenis wisata budaya yang ada di Desa ini adalah Tebang jidor, Campursari, tari kendang, pencak silat, Bantengan, Wayang Kulit, Pundem Mbah Singidiarjo, dan makam Mbah Lasem.

c) Petik bunga dan Peternakan Sapi

Wisata petik bunga Desa Gunungsari sudah sangat terkenal karena sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian petani juga penghasil tanaman hias, para wisatawan disini dapat memetik bunga langsung dan dapat mengunjungi tempat-tempat dengan pemandangan bunga yang istimewa. Selain mendapatkan pemandangan yang indahpara wisatawan juga akan mendapatkan pengetahuan tentang proses perawatan dan pengambilan susu sapi perah langsung dari peternakan

Berdasarkan wawancara ketua kelompok petani bunga Bapak Amir pada tanggal 15 November 2016 di Desa Gunungsari bahwa :

“Dulu saya itu petani bunga, saat itu penjualan menurun, mulai dari kualitas sampai dengan harga, sehingga warga Desa Gunungsari khawatir tentang kelanjutan hidup Desa ini karena Desa ini tergantung dengan pertanian nya, dan akhirnya masyarakat dan pemerintah bermusyawarah untuk menjadikan Desa Gunungsari ini menjadi desa wisata. Dengan dijadikannya Desa Wisata maka pemerintah mengadakan pelatihan untuk menyiapkan masyarakat menyambut para wisatawan. Begitu juga petani juga dapat mengetahui bagaimana budidaya bunga dan lain-lain dengan baik.”

Sehingga terdapat persetujuan dari masyarakat untuk melakukan program desa wisata ini, karena apabila tidak terdapat persetujuan dari masyarakat maka implementasi program tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian selain itu sumber daya mencukupi untuk melaksanakan program desa wisata ini, sumber daya tersebut bisa sumber daya manusia, sumber daya alam dan lain-lain. Untuk sumberdaya manusia ini terdiri dari pemerintah Kota Batu dan masyarakat sekitar. Untuk sumber daya alam di KotaBatu juga sangat mendukung untuk dijadikan desa wisata.

d) *Hiking, Motor Trail dan Mountain Bike*

Para wisatawan yang mempunyai hobi dengan wisata petualangan, sangat cocok untuk berwisata di desa ini, karena potensi alam dan keramahan masyarakat yang dapat lebih menonjolkan sisi kenyamanan bagi wisatawan.

e) Sektor UKM

Industri krupuk Ladu, yaitu cemilan khas kota Batu yang merupakan salah satu makanan atau buah tangan yang wajib di beli oleh wisatawan sebagai oleh – oleh khas Kota Batu, pengunjung juga dapat mendapatkan camilan ini di Desa Gunungsari.

b. Aktor-aktor dalam Implementasi Pengembangan Program Desa Wisata di Desa Gunungsari Kota Batu

Dalam implementasi terdapat aktor-aktor yang merencanakan ataupun pelaksana dari implementasi itu sendiri. Karena sebuah kebijakan tidak akan bisa berjalan tanpa ada aktor-aktor yang menjalankan implementasi ataupun kebijakan tersebut. Aktor-aktor ini bisa terdiri dari pemerintah, swasta maupun masyarakat setempat.

Dalam implementasi pengembangan program desa wisata di Desa Gunungsari ini terdapat beberapa aktor-aktor dari pemerintah yang diatur dalam Keputusan Walikota Batu Tahun 2013 terdiri dari :

- 1) Pemerintah Kota Batu merupakan aktor yang paling utama dalam pengembangan program desa wisata, yaitu sebagai pelindung, pengarah dan penanggung jawab dalam program desa wisata. Pemerintah Kota Batu merupakan yang berkaitan langsung dengan desa wisata. Selain itu juga memberikan bantuan modal untuk pembangunan desa wisata melalui alokasi dana APBD.
- 2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Bappeda berperan sebagai Pengkoordinasian penyusunan perencanaan

pembangunan. Dalam desa wisata ini berdasarkan keunikan masing-masing desa yang terdapat di Kota Batu ini. Kemudian desa wisata ini akan dikembangkan supaya dapat menjadi tempat wisata yang nyaman untuk wisatawan. Rencana akan dibangun *amphy theater* supaya wisatawan menyaksikan teater maupun seni dari desa tersebut. Sehingga untuk perencanaan pembangunan selanjutnya akan dipimpin oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu.

- 3) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai pengembangan sumber daya manusia. Memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat supaya lebih memahami dasar-dasar pertanian dan perkebunan, untuk mendapatkan produk yang lebih unggul. Selain itu masyarakat juga diberikan pengarahan bagaimana untuk menjadi pemandu wisata atau bagaimana sikap kepada wisatawan yang berkunjung.
- 4) Masyarakat desa Gunungsari juga merupakan aktor yang sangat penting sebagai pelaksana program desa wisata. Masyarakat melaksanakan program-program yang telah diberikan oleh pemerintah untuk kesejahteraan mereka. Akan tetapi mereka tidak hanya menerima apa yang telah diprogram oleh pemerintah tetapi juga berhak memberikan suaranya apabila program yang telah diberikan oleh pemerintah tidak sesuai atau kurang tepat untuk dilaksanakan di desa masyarakat tersebut.

Berdasarkan wawancara Bapak Rizaldi selaku Kepala Penyusunan Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tanggal 11 Oktober 2016 di Bappeda Kota Batu yaitu :

“Terdapat banyak pihak yang terlibat dalam program desa wisata di Desa Gunungsari ini, ada pemerintah Kota Batu, untuk pemerintah kota batu ini melindungi program ini untuk menjamin untuk tidak ada kerugian dalam program ini dan kemudian selalu mendampingi masyarakat dalam implementasi pengembangan program ini dan pemerintah tidak lepas tangan begitu saja untuk program desa wisata ini. Kemudian juga ada Bappeda memberikan penyuluhan untuk masyarakat desa wisata dan bekerjasama dengan dinas pariwisata Kota Batu, selain itu Bappeda juga mengatur anggaran untuk desa wisata, dan melihat potensi-potensi daerah dengan dinas pariwisata yang kemudian akan dikaji seberapa besar potensi daerah tersebut untuk dijadikan desa wisata, apabila daerah tersebut mempunyai potensi yang besar untuk dijadikan desa wisata maka kekurangan apa yang harus diperbaiki untuk terus meningkatkan desa wisata tersebut. Jadi untuk program yang besar ini butuh kerjasama oleh banyak pihak, selain pihak pemerintah yang berusaha untuk membangun sebaik mungkin untuk menjadi desa wisata maka tidak akan bisa berdiri apabila masyarakat setempat tidak ikut berpartisipasi untuk kelancaran program desa wisata ini. Sehingga kami dari pihak pemerintah merangkul masyarakat untuk melaksanakan program tersebut, mulai dari memberi penyuluhan tentang pertanian sampai dengan bagaimana menjadi tuan rumah untuk desa wisata tersebut.”

Dalam implementasi sebuah kebijakan para pelaku kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya. Dibutuhkan disposisi, yaitu kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang terdapat banyak pihak-pihak yang terlibat dalam suatu implementasi, seperti yang sudah dijelaskan diatas terdapat banyak dari pihak pemerintah karena program tersebut program yang dibuat oleh pemerintah Kota Batu untuk pemberdayaan masyarakat Kota Batu kemudian pemerintah juga bekerja sama dengan masyarakat. Sehingga program tersebut diharapkan bekerja dengan baik dengan adanya kerjasama dari pemerintah dan masyarakat.

2. Tantangan Dalam Pengembangan Program Desa Wisata di Desa Gunungsari Kota Batu.

Dalam usaha pengembangan yang telah dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu, ternyata ada beberapa tantangan yang dihadapi. Tantangan tersebut antara lain :

1) Harga pupuk yang tidak stabil

Harga pupuk merupakan hal yang penting untuk para petani. Kestabilan pupuk dapat mempengaruhi hasil. Para petani di Desa Gunungsari sangat mengharapkan agar harga pupuk yang di berikan selalu berada pada harga yang normal, dengan begitu petani dapat nyaman dalam bertani. Mawar merupakan salah satu tanaman bunga yang menjadi pilihan konsumen. Keindahan bunganya dan warna yang bermacam-macam merupakan salah satu faktor pendorongnya. Sebagai salah satu tanaman hortikultura, usahatani mawar dihadapkan pada kendala yang biasa muncul antara lain, seperti biaya usaha tani yang cukup besar untuk pembelian bibit, penggunaan tenaga kerja, dan biaya perawatan. Selain itu juga diperlukan ketekunan, sehingga memerlukan perhatian yang cukup besar. Pengelolaan usaha tani mawar yang efisien perlu adanya analisis dan pengetahuan akan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan *output*. Perlunya jaminan untuk menarik petani untuk menanamnya karena harga yang cenderung stabil sehingga tidak beresiko rugi, biaya perawatan yang relatif murah, permintaan yang tinggi serta pemasaran yang mudah. Kendala dari usaha tani mawar adalah tingkat persaingan yang tinggi antara petani, sangat dipengaruhi faktor alam terutama

pada musim hujan yang menimbulkan penyakit dan hama. Berdasarkan wawancara Bapak Amir selaku Ketua Kelompok petani bunga pada tanggal 15 November 2016 yaitu :

“saat ini harga pupuk tidak selalu stabil mbak, kadang naik kadang turun. Kita sebagai petani kan juga butuh kestabilan harga supaya pelanggan kita nggak gampang pergi karena harga yang tidak stabil. Harga pupuk sangat mempengaruhi untuk daya jual bunga nya itu sendiri mba”

2) Pengembangan monoton, belum ada variasi.

Pengembangan Desa Wisata merupakan suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat, bahkan pariwisata dikatakan mempunyai *energy trigger* yang luar biasa, yang membuat masyarakat setempat mengalami *metamorphose* dalam berbagai aspeknya. Sementara itu, pariwisata membutuhkan lingkungan yang baik, namun bilamana dalam pengembangannya tidak memperhatikan daya dukung lingkungan dan kerentanan lingkungan terhadap jumlah wisatawan akan menimbulkan dampak negatif. Salah satu faktor terpenting untuk menangani hal tersebut yaitu dengan cara merubah prilaku pengunjung dari sekedar mengetahui menuju kepada suatu pemahaman keterkaitan alur dengan kehidupan manusia, dan pendalaman terhadap sumber daya alam hayati atau ekosistemnya menjadi satu prioritas utama dibandingkan dengan hanya memikirkan luas kawasan atau keindahan kawasan saja. Salah satu pendekatan pengembangan wisata alternatif adalah desa wisata untuk pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dalam bidang pariwisata. Ramuan utama desa wisata diwujudkan dalam gaya hidup dan kualitas hidup

masyarakatnya. Keaslian juga di pengaruhi keadaan ekonomi, fisik dan sosial daerah pedesaan tersebut, misalnya ruang, warisan budaya, kegiatan pertanian, bentangan alam, jasa, pariwisata sejarah dan budaya, serta pengalaman yang unik dan eksotis khas daerah. Dengan demikian, pemodelan desa wisata harus terus dan secara kreatif mengembangkan identitas atau ciri khas daerah.

Ramuan penting lainnya dalam upaya pengembangan desa wisata yang berkelanjutan yaitu pelibatan atau partisipasi masyarakat setempat, pengembangan mutu produk wisata pedesaan, pembinaan kelompok pengusaha setempat. Keaslian akan memberikan manfaat bersaing bagi produk wisata pedesaan. Unsur unsur keaslian produk wisata yang utama adalah kualitas asli, keorisinalan, keunikan, ciri khas daerah dan kebanggaan daerah diwujudkan dalam gaya hidup dan kualitas hidup masyarakatnya secara khusus berkaitan dengan perilaku, integritas, keramahan dan kesungguhan penduduk yang tinggal dan berkembang menjadi milik masyarakat desa tersebut. Oleh sebab itu, pemodelan desa wisata bagi pembangunan pedesaan yang berkelanjutan harus terus secara kreatif mengembangkan identitas atau ciri khas yang baru bagi desa untuk memenuhi tujuan pemecahan masalah yang berkaitan dengan krisis ekonomi daerah pedesaan, semakin bertambah akibat adanya berbagai kekuatan yang rumit, yang menyebabkan baik berkurangnya kesempatan kerja maupun peningkatan kekayaan masyarakat.

Didalam pengembangan pariwisata, diperlukan nya pengembangan yang baru. Wisata yang ditawarkan Desa Gunungsari masih belum terlihat

mengalami pengembangan yang dapat mengarahkan Desa ini lebih bisa maju lagi. Saat ini masyarakat Desa Gunungsari hanya sekedar dengan menjual tanaman ke berbagai daerah dan menawarkan para wisatawan untuk memetik bunga. Apabila program terus menerus seperti itu maka para wisatawan yang datang akan merasa bosan dan Desa tersebut lama kelamaan akan menjadi Desa yang tertinggal dalam pengembangannya. Berdasarkan hasil wawancara Mas Sukma selaku wisatawan desa wisata desa Gunungsari pada tanggal 09 Januari 2017 yaitu:

“Pengembangan program yang ada pada saat ini terasa monoton, itu-itu saja. Kalau pengembangan desa wisatanya seperti ini terus mungkin desa ini tidak bisa maju dan berkembang karena pengunjung yang datang juga bosan dan tidak tertarik untuk datang ke desa ini lagi. Ya, kita berharapnya agar pengembangannya bisa dikembangkan lagi supaya kita para wisatawan juga ketagihan untuk datang ke desa wisata di desa Gunungsari ini. Apalagi yang saya lihat potensi desanya sendiri juga bagus dan menarik, jadi apa salahnya kalau program desa wisatanya bisa lebih dikembangkan lagi”

3) Belum ada wisata edukasi

Belum ada wisata edukasi tentang petik bunga Wisata bunga potong yang menjadi *icon* di Desa Gunungsari ini masih belum menyediakan wisata yang memiliki nilai edukasi. Seperti belajar bagaimana cara memelihara bunga, memetik bunga dan menata bunga. Wisatawan yang datang hanya sekedar untuk melihat dan membeli bunga saja. Untuk kedepannya dapat diciptakan wisata yang berbasis edukasi.

4) Terdapat sarana dan prasarana yang belum memadai

Prasarana adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan mencapai daerah tujuan wisata dan didaerah tujuan wisata itu sendiri, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi,

terminal, jembatan, dan lain sebagainya. Untuk kesiapan obyek-obyek wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan di daerah tujuan wisata, prasarana wisata tersebut perlu dibangun dengan disesuaikan kondisi dan lokasi obyek wisata yang bersangkutan. Pembangunan prasarana wisata yang mempertimbangkan kondisi dan lokasi akan meningkatkan aksesibilitas suatu obyek wisata yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan daya tarik obyek wisata itu sendiri. Dalam melaksanakan pembangunan prasarana wisata diperlukan koordinasi yang mantap antara instansi bersama dengan instansi pariwisata di berbagai tingkat. Dukungan instansi terkait dalam membangun prasarana wisata sangat diperlukan bagi pengembangan pariwisata daerah.

Koordinasi di tingkat perencanaan yang dilanjutkan dengan koordinasi di tingkat pelaksanaan dan pemeliharaan merupakan modal utama suksesnya pembangunan pariwisata. Dalam pembangunan prasarana pariwisata, diperlukan kerjasama yang baik antar pemerintah, masyarakat dan swasta/investor, karena dengan meningkatnya prasarana pariwisata dapat juga meningkatkan arus informasi, arus lalu lintas ekonomi, arus mobilisasi manusia antar daerah dan sebagainya, yang tentu saja dapat meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja masyarakat serta dapat meningkatkan pendapatan daerah. Sarana merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Pembangunan sarana dan prasarana wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan baik secara kuantitas maupun kualitas. Lebih dari itu selera pasar pun dapat menentukan tuntutan sarana

yang dimaksud. Berbagai sarana pariwisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata seperti; *Homestay*, biro perjalanan, alat transportasi, restoran atau rumah makan, serta sarana-sarana pendukung lainnya. Sarana secara kualitatif yang menunjukkan pada mutu pelayanan yang diberikan dan yang tercermin pada kepuasan wisatawan dalam memperoleh pelayanan. Dalam hubungannya dengan jenis dan mutu pelayanan sarana wisata di daerah tujuan wisata telah disusun suatu standart wisata yang baku, baik secara nasional, maupun secara internasional, sehingga penyedia sarana wisata tinggal memilih atau menentukan jenis kualitas yang akan disediakan.



Gambar 4.5 Kondisi jalan menuju desa Gunungsari yang hanya bisa dilalui kendaraan pribadi (Sumber : Dokumentasi Pribadi)

5) Anggaran yang masih kurang untuk pengadaan fasilitas.

Terbatas nya dana merupakan salah satu yang mempengaruhi pengembangan pariwisata karena pengembangan yang dilakukan tidak akan maksimal. Usaha pengembangan dalam sektor pariwisata membutuhkan dana yang cukup besar, yaitu dana untuk pengembangan obyek wisata, sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pariwisata, sumber daya manusia

pengelola pariwisata dan lain-lain. Anggaran merupakan salah satu pendukung berjalannya program desa wisata. Pemerintah terus berupaya dalam mewujudkan program desa wisata ini, salah satunya dengan dukungan dana. Dana merupakan hal yang penting dalam menjalankan suatu program, karena dengan dana dapat digunakan untuk membiayai segala kebutuhan sarana prasarana dan operasionalisasi dalam program desa wisata ini. Oleh karena itu selain potensi wisata yang dimiliki masing-masing desa wisata termasuk desa Gunungsari dan dukungan dari masyarakat untuk melaksanakan program ini, dana menjadi faktor penting demi keberhasilan pelaksanaan program desa wisata.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sariono selaku kepala sub bidang pariwisata dan pertanian pada tanggal 15 November 2016 di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai berikut :

“Dana merupakan tanggung jawab pemerintah demi terwujudnya program ini. Setiap RT ada bantuan permodalan supaya masyarakat tidak terjebak dengan rentenir. Harapan kedepan nya agar desa wisata ini dapat berkembang agar dana bisa dipinjamkan ke yang lain nya mbak. Selain itu pemerintah juga akan lebih fokus terhadap hal-hal apa saja atau potensi wisata yang perlu dikembangkan lagi di desa wisata ini. Memang sudah ada dana yang disediakan, tetapi untuk pembangunan fasilitas seperti *rest area*, *homestay* dll masih belum mencukupi”

6) Kurangnya wawasan masyarakat untuk mengembangkan Desa Wisata.

Penduduk Desa Gunungsari mempunyai wawasan yang kurang dalam menyambut wisatawan ataupun melayani wisatawan dengan baik. Wawasan dalam mengelola hasil pertanian mungkin sudah cukup baik karena memang

pada dasarnya mereka bermata pencaharian sebagai petani. Bagi masyarakat yang masih belum terbiasa dengan wisatawan ataupun orang asing yang datang maka akan merasa kebingungan untuk menyambut dengan baik. Namun pemerintah Kota Batu tidak berputus asa dengan hal ini, pemerintah mengadakan sosialisasi dengan memberikan pengetahuan tentang potensi Desa.

Sikap atau karakteristik yang terdapat pada masyarakat pedesaan biasanya masih tradisional dan tingkat pendidikan yang masih rendah. Hal ini membuat pemahaman masyarakat tentang program desa wisata belum dapat dipahami secara baik. Apabila dalam hal wawasan di bidang pertanian tidak perlu diragukan lagi dengan hasil-hasil panen bunga sehingga banyak yang mengambil dari desa-desa termasuk Gunungsari sebagai komoditi bunga potong untuk dikirim ke dalam maupun keluar daerah (Potensi Wisata Desa Gunungsari 2016). Mayoritas juga mata pencaharian masyarakat adalah sebagai petani bunga, buah, dan peternakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andi Susilo selaku Kepala Desa Gunungsari pada tanggal 15 Desember 2016 di kantor kepala Desa setempat menyatakan bahwa :

“Dalam menjalankan suatu program tentu saja terdapat hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya, termasuk di desa wisata ini. Kita semua pasti menginginkan perubahan tentunya dengan adanya desa wisata di Desa Gunungsari ini, masyarakat memang sebagian besar bekerja sebagai petani menjadikan kebiasaan berkomunikasi hanya dengan penduduk sekitar, sehingga masyarakat masih merasa awam apabila terdapat wisatawan yang berkunjung ke desanya. Oleh karena itu kemampuan masyarakat untuk melayani dan berinteraksi dengan orang lain perlu diperbaiki lagi agar wisatawan juga merasa nyaman dan membuat wisatawan tidak bosan untuk berkunjung mengingat potensi wisata yang dimiliki menunjang”.

Kemampuan berkomunikasi seperti melayani wisatawan masih belum begitu baik, ada masyarakat yang belum terbiasa dengan kunjungan seorang wisatawan ke desanya. Sehingga masyarakat merasa kebingungan bagaimana cara menyambut dengan baik. Padahal desa wisata merupakan salah satu kegiatan yang bermanfaat dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Oleh karena itu pemerintah kota Batu melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah bekerja sama dengan kepala desa terus melaksanakan sosialisasi tentang desa wisata ini sehingga masyarakat bisa mengerti dan siap untuk menjadi tuan rumah yang baik bagi wisatawan dan masyarakat mengetahui berbagai lapangan usaha dan lapangan kerja yang akan tercipta dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan kedatangan wisatawan tanpa meninggalkan pekerjaan utamanya saat ini baik sebagai petani, peternak, pedagang maupun pekerjaan lainnya.

3. Inovasi Pengembangan Program Desa Wisata di Desa Gunungsari.

Wisata bunga pada saat ini sangat digemari oleh semua kalangan. Dibutuhkan nya inovasi yang menarik agar potensi alam di Desa Gunungsari ini yang khas bunga mewarnya dapat berkembang agar lebih menarik dan tidak monoton dan juga dapat menaikkan jumlah wisatawan yang datang dan menambah jumlah pendapatan para penduduk desa tersebut.

Pengelolaan desa wisata yang inovatif akan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisata baik mancanegara maupun nusantara. Menurut Albury (2003) dalam Yogi (2008) secara lebih sederhana mendefinisikan inovasi sebagai *new ideas that work*. Ini berarti bahwa inovasi adalah berhubungan erat dengan ide-

ide yang bermanfaat. Inovasi dengan sifat kebaruannya harus mempunyai nilai manfaat. Sifat baru dari inovasi tidak akan berarti apa-apa apabila tidak diikuti dengan nilai kemanfaatan dari kehadirannya. Untuk itu, keberadaan desa wisata di wilayah Kota Batu yang jumlahnya cukup banyak harus dikelola secara inovatif. Pengelola desa wisata harus memiliki pemikiran yang cerdas untuk menemukan program kegiatan yang inovatif sehingga mampu menarik minat berkunjung wisatawan nusantara maupun mancanegara. Desa Gunungsari memiliki keunggulan bunga potongnya. Untuk bisa menjadi desa wisata yang memiliki nilai jual kepada wisatawan harus ada inovasi potensi yang dimiliki. Dengan demikian, diharapkan dengan potensi wisata yang disajikan secara inovatif maka wisatawan yang menginap di desa itu akan betah dan merasa nyaman. Desa wisata yang dikenal wisatawan diharapkan makin banyak pula wisatawan yang berkunjung ke desa tersebut, sehingga secara perlahan diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi lokal. Desa wisata dengan konsep pariwisata berbasis masyarakat diyakini membawa manfaat besar bagi masyarakat setempat. Maju mundurnya desa wisata tergantung pengelola dan sumber daya manusia (SDM) masyarakat.

a. Inovasi Untuk Pengembangan Program Desa Wisata di Desa Gunungsari

Kota Batu

1) Menciptakan Taman Bunga Untuk Rekreasi Yang Sehat

Pelestarian taman taman bunga yang saat ini sulit sekali ditemui. Desa Gunungsari merupakan desa yang sangat khas dengan bunganya, tetapi sejauh ini belum adanya taman bunga yang dapat dijadikan rekreasi bagi

para wisatawan. Dengan memberikan keindahan pemandangan agar dapat memanjakan pengunjung dan memberikan ketenangan saat berada di taman dengan di kelilingi hamparan bunga dan juga pemandangan yang indah. Perkebunan bunga yang ada hanya disediakan untuk sekedar memetik bunga dan melihat – lihat. Agar Selain itu perkebunan hanya digunakan warga untuk bertani untuk menambah penghasilan saja. Dibutuhkan nya taman agar dapat dijadikan rekreasi bagi keluarga maupun kerabat. Dengan kita melihat taman sekaligus dengan bunga bunga yang mengitari didalamnya membuat mata memandang membuat hati terasa sejuk dan segar diiringi dengan hembusan angin Desa Gunungsari yang membawa aroma sejuk dan aroma wangi di kawasan desa ini, seperti berdasarkan wawancara Mbak Afrianty selaku wisatawan Desa Gunungsari pada tanggal 09 Januari 2017 di Desa Gunungsari :

“ Memang sebenarnya dibutuhkan taman bunga mbak untuk pengunjung. Karena saat ini wisatawan yang datang hanya bisa memetik bunga dan melihat-lihat saja, jadi kalau untuk *refreshing* masih kurang sebenarnya. Harapan saya untuk kedepannya memang ada taman bunga supaya bisa untuk *refreshing*, karena tujuan wisatawan kesini biasanya untuk *refreshing*”

2) Menciptakan taman bunga yang bisa dinikmati saat malam hari

Tidak semua orang bisa libur di siang hari, maka rekreasi di malam hari juga bisa dilakukan dengan melihat pemandangan lampu-lampu indah. Sebuah desa sangat dibutuhkan program program yang menarik agar dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang datang, salah satu nya di Desa Gunungsari ini yang masih belum terdapat wisata yang bisa dinikmati pada saat malam hari, saat matahari mulai terbenam aktifitas pariwisata pun

selesai. Pada siang hari dapat dijadikan rekreasi untuk pengunjung yang datang, sedangkan saat malam hari berubah fungsinya menjadi sebuah taman yang indah berhiasan lampu yang bersinar. Pemerintah harus memberikan bantuan dan seharusnya pemerintah yang membuat tempat wisata bunga ini. Sebaiknya di Indonesia khususnya di desa Gunungsari selain berkembangnya wisata bunga, juga mulai dipikirkan wisata lampu hias di malam hari, sehingga yang bekerja di siang hari di malam hari bisa rekreasi juga.

3) Membangun Restoran Dengan Pemandangan Perkebunan Bunga Mawar.

Sebuah perkebunan bunga mawar juga dapat membangun fasilitas restoran untuk memanjakan perut pengunjung dengan menyediakan berbagai jenis makanan untuk memanjakan perut para pengunjung yang datang dapat menikmati makanan tentunya dengan pemandangan perkebunan bunga mawar yang tidak biasa untuk ditemui. Desa Gunungsari ini juga memiliki kekayaan seperti perah susu sapi, ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu menu di restoran tersebut sehingga desa ini benar-benar dapat dijadikan tempat destinasi wisata yang sangat khas dengan kekayaan alam yang dimiliki desa nya. Berdasarkan wawancara Mas Sukma selaku wisatawan pada tanggal 09 Januari 2017 di desa Gunungsari :

“Saat ini kan anak-anak muda memang sedang gemar untuk foto ya, sebenarnya di desa ini sangat berpotensi untuk maju terutama kalau dibangun restoran dengan pemandangan bunga mawar, pasti pengunjung nya akan lebih banyak untuk berfoto, apalagi bunga benar-benar sedang digemari oleh anak muda saat ini. Mungkin juga bisa ditambah dengan menu dari potensi lain dari desa ini seperti susu sapi nya seperti di Bandung sana yang ada restoran seperti itu”.

4) Mengembangkan Wisata Air dari sumber mata air “Umbul”

Selain memiliki ciri khas dengan bunga dan perah susu sapi nya, desa Gunungsari memiliki kekayaan alam lain nya, yaitu sumber mata air yang diberi nama “umbul”. Sumber mata air umbul ini sampai saat ini belum dimanfaatkan. Banyak yang bisa dikembangkan dari sumber mata air ini, salah satunya yaitu dapat dibuat wisata air, seperti taman bermain anak maupun wisata berendam untuk orang dewasa

5) Menciptakan Program Edukasi Bunga Mawar dan Perah Sapi

Pariwisata dapat di jadikan nilai yang baik untuk edukasi. Sebuah pariwisata sangat dapat dijadikan rekreasi yang bermanfaat untuk pembelajaran apabila dikelola dengan baik. Pariwisata yang memiliki nilai edukatif dapat diciptakan agar suatu pariwisata dapat bermanfaat untuk para pengunjung di masa yang akan datang. Wisata rekreasi edukasi yang diciptakan dapat berupa pembelajaran dalam proses pemetikan bunga, pemerah susu, dan pemanfaatan potensi-potensi Desa Gunungsari yang lainnya. Kota Batu merupakan Kota yang dekat dengan Kota Malang yang memiliki jumlah pelajar yang cukup banyak, sehingga wisata ini akan cukup bermanfaat apabila diciptakan wisata untuk edukasi.

6) Membuat Paket wisata Yang Menarik dan Kreatif

Agar potensi wisata di desa laku jual, diperlukan upaya menyusun paket kunjungan wisata yang sesuai dengan selera wisatawan. Membangun sebuah desa wisata perlu proses dan tidak instan. Pelayanan dan penyiapan pemandu wisata dari masyarakat desa. Bagaimana cara masyarakat desa

melayani tamu wisatawan, bagaimana membuat tamu betah tinggal di desa, dan bagaimana membantu tamu yang baik sehingga mereka akan datang kembali bersama kerabatnya. Melatih masyarakat desa bagaimana membuat paket wisata, cara menghitung harga pokok produksi dan untung rugi sebuah paket wisata yang dijual. Masyarakat juga diajak untuk membuat proposal yang menarik untuk calon konsumen wisatawan, bagaimana cara membuat *leaflet*, brosur dan selebaran yang menarik buat wisatawan. Dalam tahap ini, nantinya masyarakat juga harus dilatih dari segi teknologi dan informasi agar paket wisata itu terjual secara *online* dan *offline*.

Hal yang utama dan menjadi tujuan akhir adalah marketing desa wisata. Masyarakat desa dilatih dan harus bisa menjadi marketing yang handal, masyarakat desa harus tahu dan paham betul paket wisata yang dijual. Untuk ini nantinya, pelatihan marketing akan difokuskan setelah penyiapan paket wisata terbentuk. Dengan adanya paket wisata, potensi desa wisata dapat tergali dan sekaligus dapat menawarkan sebagai paket kunjungan untuk berwisata. Para warga desa gunungsari dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh Desa Gunungsari. Paket wisata yang ditawarkan dapat di buat dengan memanfaatkan potensi petik bunga yang menjadi unggulan Desa Gunungsari ini. Berdasarkan wawancara Mas Sukma selaku wisatawan pada tanggal 09 Januari 2017 di Desa Gunungsari yaitu:

“Di desa ini dibutuhkan inovasi baru sebenarnya, supaya berkembang untuk kedepannya. Mungkin bisa dengan membuat paket wisata yang menarik dan kreatif agar pengunjung yang datang juga mempunyai tujuan yang jelas dan tidak mudah bosan”.

C. Pembahasan

1. Implementasi Pengembangan Program Desa Wisata di Desa Gunungsari

a. Implementasi Pengembangan Program Desa Wisata di Gunungsari

Dalam melaksanakan sebuah program, sudah pasti diawali dengan penyampaian-penyampaian informasi tentang apa yang menjadi tujuan dari sebuah program yang akan dilaksanakan. Pemberitahuan informasi tersebut disampaikan dengan cara komunikasi.

a. Komunikasi

Menurut model implementasi oleh George C Edward III dalam Widodo (2011:97) komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat keijakan kepada pelaksana kebijakan. Penyampaian informasi yang terjadi antara komunikator dan komunikan sudah sesuai, komunikatornya adalah kepala desa sedangkan komunikannya adalah masyarakat desa yang berperan juga sebagai pelaksana program.

Penyampaian informasi dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan informasi mengenai sadar wisata terlebih dahulu. Sadar wisata sendiri merupakan kemampuan atau kesadaran seseorang dapat memanfaatkan potensi yang ada di sekitarnya dengan kemudian dijadikan sebuah wisata yang bermanfaat dengan kearifal lokal daerahnya masing-masing. Kemampuan ini akan digunakan dalam pelaksanaan program

desa wisata, salah satunya di Desa Gunungsari. Widodo menambahkan bahwa komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi yang pertama adalah dimensi transformasi yaitu menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan. Informasi mengenai program desa wisata ini memang ditujukan kepada masyarakat desa Gunungsari, akan tetapi apabila ada pihak yang berkepentingan lain tahu itu akan menjadi lebih baik misalnya saja pihak swasta. Dengan adanya pihak swasta program desa wisata ini tentu akan mendapatkan dukungan lagi selain dari pemerintah. Sehingga semakin banyak pihak terkait, semakin banyak pula dukungan untuk keberhasilan program desa wisata ini.

Selain itu penyampaian informasi harus mempunyai kejelasan, yaitu menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima jelas sehingga mereka apa yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut. Komunikasi yang terjadi dalam program desa wisata di Desa Gunungsari dapat dikatakan sudah jelas, komunikasi yang terjalin berawal dari penyampaian informasi dari kepala desa dan perangkat-perangkat desa kemudian disampaikan secara langsung kepada masyarakat sekitar. Masyarakat juga merespon baik dengan diimbangi apa yang akan mereka dapatkan jika program ini dilaksanakan dan

bisa berdampak positif bagi pelaksanaannya, seperti dapat meningkatkan ekonomi petani desa dan masyarakat desa.

Kemudian konsistensi yaitu menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsistensi agar kelompok sasaran kebijakan dan pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung tidak menimbulkan kebingungan dan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Program desa wisata di Gunungsari juga bisa dibidang konsisten karena program yang berjalan sudah sesuai aturan. Kegiatan yang direncanakan juga sudah sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Nomor: 06/KEP/D.PDP/IV/2011 mempunyai tugas yakni memberikan sosialisasi tentang pengetahuan untuk sadar wisata kepada pelaksana program. Masyarakat pun bisa menerima secara positif dan memberikan respon serta memahami apa yang akan dilaksanakan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang disampaikan kepada pelaksana program mempunyai transformasi, kejelasan dan konsistensi. Pada dimensi transformasi diharapkan ada pihak swasta juga yang mengetahui tentang program ini sehingga semakin banyak pihak yang mendukung untuk keberhasilan program desa wisata Gunungsari. Kemudian pada dimensi kejelasan, informasi mengenai program desa wisata sudah disampaikan secara jelas kepada masyarakat yang mendapatkan respon baik dan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Serta pada dimensi konsistensi, program berjalan secara konsisten dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

b. Sumber Daya

Pada variabel sumber daya merupakan salah satu peranan penting dalam implementasi sebuah program. Sumber daya yang memadai dan mencukupi tentu saja sangat dibutuhkan untuk mendukung sebuah kegiatan dapat dilakukan dengan baik. Edward III dalam Widodo (2011:98) menegaskan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistennnya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya yang mendukung antara lain sumber daya manusia, sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi program ini tentu saja pemerintah Kota Batu dan masyarakat. Pemerintah Kota Batu melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menangani tentang pengembang-pengembangan wisata apa saja yang dapat dilaksanakan, jasa wisata serta pembinaan atau pelatihan dalam mewujudkan program desa wisata ini. Selain itu masyarakat juga sangat berperan penting karena mereka sebagai pelaksana program sehingga berhasil tidaknya program ini bisa dilihat dari masyarakat dapat merespon atau tidak. Dan pada masyarakat desa Gunungsari dapat merespon keberadaan program desa wisata ini yang sedikit demi sedikit bisa berjalan. Sesuai dengan George Edward III dalam Widodo (2011:98) menyebutkan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu

variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan yang efektif dan efisien sumber daya manusia harus mengetahui apa yang dilakukan, mengetahui orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, juga harus memiliki kewenangan yang diperlukan dalam melaksanakan dan harus cukup memiliki keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pimpinan).

Selanjutnya terdapat juga sumber daya anggaran, sumber daya anggaran merupakan yang mempengaruhi keefektifan sebuah kebijakan karena anggaran merupakan dana untuk membiayai operasionalisasi dalam pelaksanaan kebijakan, jika terbatasnya anggaran maka akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Di samping program tidak berjalan dengan optimal, terbatasnya anggaran juga menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah. Dalam pelaksanaan desa wisata ini, dana diperoleh dari APBD. Berdasarkan hasil wawancara menyebutkan bahwa untuk program desa wisata sudah ada anggarannya dari APBD pemerintah Kota Batu. Dengan adanya dana tersebut kemudian disalurkan kepada setiap desa wisata termasuk di Gunungsari. Sehingga dana tersebut dapat digunakan untuk menunjang keberlangsungan program ini selain sumber daya manusia yang tersedia cukup baik.

Sumber daya peralatan juga merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi kebijakan yang akan memudahkan dalam

memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Di desa wisata Gunungsari masih sedikit tersedia *homestay*.

Dukungan dari sumber daya manusia, sumber daya anggaran serta sumber daya fasilitas dikatakan cukup baik. Karena masyarakat cukup mendukung program desa wisata ini, ditambah dengan adanya sumber daya anggaran yang berasal dari dana APBD serta fasilitas meskipun masih terkendala dengan tersedianya *homestay* yang minim. Akan tetapi upaya yang terus dilakukan dengan dukungan-dukungan yang sudah dimiliki dapat membantu program desa wisata ini dapat berjalan secara efektif dan efisien.

c. Disposisi

Dalam implementasi sebuah kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya. Menurut George Edward dalam Widodo (2009:96-107) disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat dilakukan.

Pelaksana pengembangan program disini adalah masyarakat Gunungsari, masyarakat yang mayoritas pekerjaannya sebagai petani merasa senang dan antusias setelah diadakannya sosialisasi mengenai program desa wisata. Mereka menerima dampak positif seperti keuntungan yang lebih dari biasanya karena kunjungan wisatawan ke desanya. Dengan begini masyarakat semakin semangat sehingga kemauan untuk merubah keadaan desanya menjadi lebih baik dan kesejahteraan mereka meningkat.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang terdapat dalam implementasi pengembangan program wisata di Gunungsari sudah sesuai dengan harapan. Ini bisa terjadi karena hubungan antara kepala desa dengan masyarakat sudah terjalin dengan baik. Kepala desa berkeinginan untuk membuat lebih baik keadaan desanya, ini merupakan salah satu program yang dapat dilaksanakan. Struktur birokrasi yang terdapat disini tidak terlalu rumit dan jelas. Pengembangan program desa wisata yang disampaikan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kepada kepala desa kemudian masyarakat sebagai pelaksana masih dalam pengawasan dari pemerintah setempat sehingga dapat mencegah terjadinya permasalahan. Oleh sebab itu hubungan antara pihak-pihak yang terkait dengan program desa wisata ini harus terjalin dengan baik sehingga dapat mendukung implementasi pengembangan program desa wisata ini.

Sesuai dengan George Edward dalam Widodo (2009:96-107) menyatakan bahwa struktur birokrasi dapat berpengaruh efektif dan efisiennya implementasi sebuah kebijakan. Karena struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi lainnya.

Desa ini terletak diantara daerah perbukitan gunung Panderman disebelah selatan serta gunung Arjuna disebelah utara. Desa ini juga merupakan desa pemasok bunga mawar potong terbesar di seluruh Indonesia.

Jenis mawar potong yang ditanam petani di desa ini ada beberapa macam. Jenis mawar lokal unggulan dinamakan mawar Pergiwo Pergiwati dengan warna merah tua dan merah muda. Selain itu mawar jenis *Holland* juga banyak dijumpai dengan warna yang indah seperti merah tua, merah, putih tissue, putih salju, pink, pink tua, salem, oranye dan lain sebagainya yang berasal dari berbagai macam varietas diantaranya *Cerry Brandy*, *Havalan*, *Luciana*, *Marbel*, *Red Holland* serta masih banyak lagi varietas yang sedang dan akan dikembangkan. Desa Gunungsari, Kecamatan Bumiaji Kota Batu merupakan desa yang paling 'romantis' di Jawa Timur. Betapa tidak, desa ujung yang terletak di kaki gunung ini penghasil mawar potong, salah satu yang terbesar di Indonesia. Ada ratusan ribu kuntum Mawar yang diproduksi setiap harinya, dengan pasar yang menjangkau berbagai kota besar hingga ke luar pulau. Pada momen-momen tertentu, seperti pada hari Valentine atau musim wisuda, kuntum mawar dari Gunungsari melanglang buana hingga jauh di pelosok negeri. Semua halaman dan teras rumah penduduk penuh bunga aneka warna dan jenis. Tumbuh subur dan terawat. Terdapat kebun-kebun mawar yang luas dan tiada hentinya menghasilkan kuntum mawar yang segar dan siap di pasarkan. Para petani bunga mampu hidup layak dari budidaya dan produksi jenis kembang yang paling dicari kaum metropolis ini. Di sepanjang ruas jalan, di dalam gang-gang dan lorong rumah penduduk, selalu ada bunga. Tidak hanya mawar untuk diambil kuntumnya, namun juga bunga tanam (dari bibit hingga yang sudah tumbuh besar) tersedia dalam puluhan bahkan ratusan jenis dan warna. Para pembeli bebas memilih, baik untuk keperluan ditanam di

halaman rumah pribadi maupun untuk dijual lagi. Di beberapa rumah, penduduknya memproduksi pot bunga berbagai ukuran. Lalu lalang kendaraan pengangkut bunga potong menunjukkan betapa besar potensi bunga di desa ini.



Gambar 4.6 : Hasil panen bunga mawar di Desa Gunungsari (Sumber : Dokumentasi Pribadi)

Maka sangat layak desa Gunungsari ini menjadi desa wisata bunga, dimana para pelajar dan mahasiswa atau masyarakat umum datang untuk belajar tentang menanam dan merawat bunga serta bagaimana sistem bisnis bunga yang bisa diterapkan di luar desa. Tidak berlebihan apabila desa ini patut disebut sebagai desa sejuta mawar kuntum, desa yang romantis sebagaimana umumnya desa penghasil bunga lainnya di kota yang tenar dengan julukan Paris van Java ini.

Desa wisata adalah pengembangan pariwisata yang memanfaatkan potensi alam yang terdapat di sebuah desa. Jadi pariwisata tersebut menggunakan keindahan alam dan keunikan desa sebagai icon untuk menarik wisatawan supaya berkunjung ke pariwisata tersebut. Di dalam handout *concept and leisure* oleh Gumelar (2010) desa wisata itu seharusnya memiliki hal yang penting sebagai berikut : a. keunikan, keaslian, sifat khas, b. Letaknya berdekatan dengan daerah alam yang luar biasa, c. berkaitan dengan kelompok atau masyarakat berbudaya

yang secara tidak langsung menarik minat para wisatawan, d. memiliki peluang untuk berkembang baik dari sisi prasarana dasar maupun sarana lainnya.

Desa Gunungsari selain memiliki keindahan alam yang disuguhkan, Desa Gunungsari mempunyai keunikan budaya mereka yang sampai saat modernisasi ini budaya itu masih melekat pada masyarakat desa tersebut. Desa Gunungsari tersebut memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi sebuah wisata alam, karena sarana dan prasarana, potensi alam dan masyarakat di desa tersebut mendukung dengan adanya desa wisata ini. Sehingga Desa Gunungsari tersebut layak disebut dengan desa wisata. Dalam sebuah kebijakan itu terdapat tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dalam pelaksanaan program desa wisata ini terdapat tujuan atau sasaran yang harus dicapai yaitu dengan adanya implementasi pengembangan program desa wisata, perekonomian Kota Batu dapat meningkat, selain itu supaya dapat meningkatkan kualitas pariwisata yang ada. Suatu keberhasilan sebuah implementasi kebijakan dapat ditentukan oleh *content of policy* dan *context of policy*, hal ini menurut Grindell yang telah dikutip oleh Agustino (2008:154-315). *Content of policy* menjelaskan bahwa suatu implementasi harus terdapat pelaksana program dan sumber daya yang akan digunakan. Seperti halnya dalam desa wisata gunungsari, desa ini telah terorganisir dengan baik mulai dari pelaksana program maupun sumber daya yang akan digunakan dalam program ini. Pemerintah Kota Batu berperan penting dalam pengembangan program desa wisata, mulai dari pendanaan sampai dengan memberi pelatihan untuk masyarakat sekitar. Selain itu swasta dan masyarakat juga ikut berpartisipasi untuk kelancaran program tersebut. Karena implementasi kebijakan tidak akan berjalan sesuai dengan harapan apabila

hanya terdapat satu aktor atau implementator. *Context of policy* menjelaskan bahwa lingkungan sangat berpengaruh dengan berhasil atau tidaknya sebuah implementasi kebijakan tersebut. Meskipun sudah tersedianya sumber daya untuk implementasi kebijakan, akan tetapi apabila terdapat lemahnya dari birokrasi maka akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Pengembangan program desa wisata merupakan kebijakan yang harus didukung penuh oleh pemerintah, karena pada dasarnya masyarakat yang terdapat di Desa Wisata Gunungsari merupakan masyarakat biasa, sehingga membutuhkan pelatihan untuk mempersiapkan diri untuk menyambut para wisatawan yang akan berkunjung. Sehingga apabila tidak adanya sebuah perhatian dari pemerintah maupun swasta maka masyarakat tidak akan pernah tahu apa yang nantinya akan dilakukan ketika para wisatawan berdatangan dan pada akhirnya para wisatawan merasa kecewa atas pelayanan yang terdapat di Desa Wisata tersebut.

b. Aktor- aktor dalam Implementasi Pengembangan Program desa Wisata di Desa Gunungsari Kota Batu

Menurut Grindel yang dikutip Agustino (2008: 154-315) keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik juga ditentukan dari pelaksana program. Dalam menjalankan sebuah kebijakan harus didukung oleh pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel untuk keberhasilan sebuah kebijakan. Pelaksana kebijakan harus sudah tertulis dan terdata dengan baik. Jenis kebijakan yang akan dilaksanakan sangat tergantung oleh pelaksana kebijakan, akan tetapi setidaknya dapat di identifikasikan sebagai berikut :

- 1) Dinas, unit pelaksana teknis (upt), dan lingkungan pemerintah pusat maupun daerah.
- 2) Sektor bisnis atau swasta
- 3) Lembaga swadaya masyarakat (lsm)
- 4) Masyarakat

Penetapan pelaksana kebijakan tidak hanya sekedar menetapkan mana yang akan melaksanakan dan siapa yang akan melaksanakan, akan tetapi juga menetapkan kewenangan, tanggung jawab, tugas pokok, fungsi dari masing-masing pelaksana. Dalam implementasi desa wisata ini juga melibatkan aktor-aktor dalam menjalankan kebijakan yang ada. Berdasarkan *content of policy* terdapat pelaksana program. Dimana pelaksana program yang tertulis dan terdata dengan baik. Seperti yang sudah ada di Keputusan Walikota Batu Tahun 2013. Dalam keputusan tersebut sudah dirinci dengan jelas apa peranan dan tugas yang diberikan untuk pelaksanaan program desa wisata ini. Seperti misalnya walikota batu sebagai pelindung dari pelaksana program tersebut, kemudian untuk perencanaan pemetaan wilayah yang dikoordinasikan oleh kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu, kemudian dari pihak desa wisatanya terdapat camat dari semua kecamatan yang terdapat di Kota Batu. Kemudian untuk masyarakatnya juga ikut berpartisipasi dalam program desa wisata ini.

2. Tantangan Pengembangan Program Desa Wisata di Desa Gunungsari Kota

Batu

Konsep Desa Wisata Muljadi dalam Agustina (2012) menjelaskan desa wisata sebagai suatu produk wisata yang melibatkan anggota masyarakat desa dengan

segala perangkat yang dimilikinya. Desa wisata tidak hanya berpengaruh pada ekonominya, tetapi juga sekaligus dapat melestarikan lingkungan alam dan sosial budaya masyarakat terutama berkaitan dengan nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan, dan lain-lain. Komponen dalam pengembangan desa wisata:

a. Atraksi dan kegiatan wisata.

Atraksi wisata dapat berupa seni, budaya, warisan sejarah, tradisi, kekayaan alam, hiburan, jasa dan lain-lain yang merupakan daya tarik wisata. Atraksi ini memberikan ciri khas daerah tersebut yang mendasari minat wisatawan untuk berkunjung ke tempat tersebut. (Karyono dalam Pantiyasa 2013)

b. Akomodasi.

Akomodasi pada desa wisata yaitu sebagian dari tempat tinggal penduduk setempat dan unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk

c. Unsur institusi atau kelembagaan dan SDM.

Dalam pengembangan desa wisata lembaga yang mengelola harus memiliki kemampuan yang handal.

d. Fasilitas pendukung wisata lainnya.

Pengembangan desa wisata harus memiliki fasilitas-fasilitas pendukung seperti sarana komunikasi.

e. Infrastruktur

Infrastruktur lainnya juga sangat penting disiapkan dalam pengembangan desa wisata seperti sistem pertanian

f. Transportasi

Transportasi sangat penting untuk memperlancar akses tamu.

g. Sumberdaya lingkungan alam dan sosial budaya.

h. Masyarakat.

Dukungan masyarakat sangat besar peranannya seperti menjaga kebersihan lingkungan, keramah tamahan.

i. Konsep pariwisata berbasis masyarakat (Community Based Tourism).

Dalam pengembangannya, pengembangan program Desa Wisata di desa Gunungsari ini memiliki berbagai tantangan, yaitu :

1) Harga pupuk yang tidak stabil

Tidak jarang pupuk di desa Gunungsari ini tiba – tiba saja mengalami kenaikan sehingga para petani merasa terbebani. Alangkah baiknya apabila pemerintah menjamin agar harga pupuk selalu stabil, sehingga para petani tidak kesulitan dalam mendapatkan pupuk dan tidak terbebani dengan harga pupuk yang tiba-tiba naik.

2) Pengembangan monoton, belum ada variasi.

Pengembangan Desa Wisata yang disediakan hanya itu-itu saja, kurangnya suatu kreativitas, sehingga tidak berkembangnya program. Sejauh ini di Desa Gunungsari hanya bisa melihat-lihat dan memetik bunga saja. Belum adanya suatu program yang mengarah untuk program yang baru agar para wisatawan tidak bosan. Sejauh ini, wisata yang ditawarkan oleh Desa Gunungsari dari segi pertanian yaitu memetik bunga, menikmati pemandangan kebun bunga, wisata bersama keluarga, mengetahui proses penanaman, mencari

tanaman hias yang diinginkan, mencari aksesoris untuk taman, berwisata sambil menjalankan hobi

3) Belum ada wisata edukasi

Selain memiliki nilai lebih bagi pariwisata, desa wisata juga dapat dijadikan nilai lebih bagi edukasi. Seperti yang diketahui bahwa saat ini pariwisata yang memiliki nilai untuk edukasi sangat minim, salah satunya Desa Gunungsari yang masih belum menyediakan wisata yang memiliki nilai edukasi. Nilai edukasi dapat dijadikan manfaat untuk kehidupan di masa yang akan datang, jadi pengunjung yang datang tidak hanya sekedar untuk melihat-lihat perkebunan saja, tetapi juga dapat dijadikan pelajaran untuk sebagai bekal untuk di masa yang akan datang. Wisata yang tersedia masih belum cukup untuk dapat dijadikan edukasi karena masyarakat yang memiliki usaha masih kurang kreatif dan belum memiliki keinginan untuk mendirikan sebuah inovasi baru terutama dalam hal edukasi.

4) Terdapat Sarana dan prasarana yang belum memadai

Sarana dan prasarana merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Sarana pariwisata adalah fasilitas yang dapat memberikan pelayanan kepada wisatawan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk menuju ke daerah wisata, tentu saja kita akan melewati sebuah perjalanan. Sarana jalan yang menghubungkan Desa Gunungsari dengan desa-desa lain umumnya sudah mulus, akan tetapi sebagian ada yang kurang baik. Ada beberapa kendala yang menjadi penyebab

ketidaknyamanan wisatawan untuk berkunjung menuju wisata petik bunga di desa Gunungsari ini, yaitu:

a) Arah Penunjuk jalan yang belum ada

Di Desa Gunungsari petunjuk jalan masih jarang ditemukan. Para wisatawan yang ingin menuju ke arah Desa Gunungsari masih cukup kesulitan karena tidak ada petunjuk jalan yang menandai arah ke Desa Gunungsari, sehingga para wisatawan harus bertanya-tanya terlebih dahulu apabila ingin menuju Desa Gunungsari. Permasalahan ini sangat menyulitkan para wisatawan yang menuju ke Desa

b) Jalan masih kecil

Kendaraan besar yang ingin mengakses untuk ke Desa Gunungsari tidak bisa, dikarenakan jalanan yang tersedia masih sangat kecil. Pemerintah juga harus memperhatikan kondisi jalan yang seperti ini. Pemerintah dapat memperlebar jalan agar untuk kedepannya kendaraan dapat mengakses jalan tersebut. Ini dapat mempengaruhi pendapatan bagi para warga Desa Gunungsari, karena tidak hanya kendaraan pribadi saja yang dapat mengakses. Pada Saat ini jalan menuju Desa Gunungsari masih kecil, hanya kendaraan pribadi yang dapat melintas. Apabila kondisi jalan dapat dilebarkan maka kendaraan seperti bis dapat melintas, sehingga tingkat wisatawan yang datang juga meningkat.



Gambar 4.7 : Kondisi Jalan Menuju Desa Wisata, Desa Gunungsari Kota Batu
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)

Selain itu fasilitas yang tersedia di Desa Gunungsari masih kurang memadai. Seperti belum tersedianya *rest area* seperti fasilitas *homestay*, toilet umum. Fasilitas memiliki peran yang sangat penting untuk mengembangkan sebuah Desa Wisata. Fasilitas-fasilitas yang diperlukan di kawasan wisata adalah toilet umum, kebersihan desa, penunjuk arah wisata, penginapan dan yang paling penting adalah kenyamanan dan keamanan desa sekitar. Karena kriteria untuk desa wisata salah satunya adalah penyediaan fasilitas dan prasarana yang dimiliki masyarakat lokal yang biasanya mendorong peran serta masyarakat dan menjamin adanya akses untuk berkembangnya desa wisata. Dalam pengembangannya Desa Gunungsari masih memiliki kendala dalam pengadaannya, yaitu :

- a. Fasilitas umum yang belum tersedia.

Homestay merupakan salah satu fasilitas yang penting yang wajib disediakan oleh suatu desa yang menjadi Desa Wisata. Tetapi dalam pengembangannya, Desa Gunungsari ini masih belum memiliki fasilitas *Homestay*. Toilet umum juga belum tersedia, sehingga pengunjung yang

datang harus meminjam toilet rumah warga sekitar. Berikut Merupakan Wawancara dari Ibu Yuliati :

“ Saat ini Desa Gunungsari masih belum mempunyai tempat persinggahan untuk wisatawan yang ingin beristirahat atau pun bermalam. Kalau ada wisatawan yang datang biasanya menginap di Desa sebelah yaitu Brau mbak, harapan saya supaya pemerintah bisa ikut membantu dalam penyediaan penginapannya. Kalau ada penginapan kan wisatawan juga jadi merasa nyaman, dan itu juga bisa dijadikan usaha untuk masyarakatnya.”

b. Tidak tersedia *Tour Guide* untuk para wisatawan asing

Dalam pelaksanaan program desa wisata, *Tour Guide* sangat berpengaruh untuk mendatangkan para wisatawan. *Tour Guide* berfungsi agar para wisatawan dapat terarah dengan baik saat berwisata.

Desa Gunungsari ini masih belum menyediakan *Tour Guide* yang berperan penting dalam pengembangan program desa wisata.

5) Anggaran yang masih kurang untuk pengadaan fasilitas

Dana merupakan faktor utama yang penting dalam pengembangan desa wisata. Saat ini di desa Gunungsari memiliki kendala yaitu terbatasnya dana terutama untuk pengadaan fasilitas umum seperti pembangunan homestay, rest area, pembangunan infrastruktur jalan seperti memperbesar ruas jalan agar kendaraan bisa melintas dan pengadaan wisata lain selain memetik bunga. Dana sangat dibutuhkan agar desa Gunungsari ini dapat menjadi desa wisata yang benar-benar dicari dan dibutuhkan oleh wisatawan lokal maupun asing.

6) Kurangnya wawasan masyarakat untuk mengembangkan Desa Wisata

Wawasan masyarakat yang dinilai kurang mengenai wawasan yang kurang dalam menyambut wisatawan yang berpariwisata ke desa wisata. Wawasan dalam mengelola hasil pertanian mungkin sudah cukup baik karena memang pada dasarnya mereka bermata pencaharian sebagai petani. Bagi masyarakat yang masih belum terbiasa dengan wisatawan ataupun orang asing yang datang maka akan merasa kebingungan untuk menyambut dengan baik. Khususnya pengetahuan tentang potensi desa.

Pada dasarnya desa wisata adalah sebagai salah satu produk wisata alternatif yang dapat memberikan dorongan bagi pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dengan prinsip memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat, menguntungkan masyarakat setempat, berskala kecil untuk memudahkan terjalinnya hubungan timbal balik dengan masyarakat setempat, melibatkan masyarakat setempat, dan menerapkan pengembangan produk wisata pedesaan. Jadi dalam pelaksanaan desa wisata di Kota Batu program desa wisata harus menguntungkan masyarakat agar perekonomian masyarakat juga akan meningkat, karena yang mengembangkan desa wisata adalah dari masyarakat desa, dan melalui keunggulan desa, maka masyarakat pun harus merasakan dampak yang baik dari program tersebut.

Masyarakat di sekitar obyek wisatalah yang akan menyambut kehadiran wisatawan tersebut sekaligus akan memberikan layanan yang dibutuhkan oleh para wisatawan. Untuk itu masyarakat di sekitar obyek perlu mengetahui berbagai jenis dan kualitas layanan yang dibutuhkan oleh para

wisatawan. Dalam hal ini pemerintah melalui instansi-instansi terkait telah menyelenggarakan penyuluhan kepada masyarakat. Salah satunya adalah dalam bentuk bina masyarakat sadar wisata. Dengan terbinanya masyarakat yang sadar wisata akan berdampak positif karena mereka akan memperoleh keuntungan dari para wisatawan yang membelanjakan uangnya. Para wisatawan juga akan diuntungkan karena mendapat pelayanan yang memadai dan juga mendapat berbagai kemudahan dalam memenuhi kebutuhan

3. Inovasi Pengembangan Program Desa Wisata di Desa Gunungsari Kota Batu.

Desa Gunungsari sangat khas dengan bunga mawarnya, alangkah lebih baik apabila diciptakan inovasi-inovasi baru yang memanfaatkan kekayaan alam dari Desa Gunungsari ini agar desa ini bisa menyuguhkan apa yang menjadi potensi bagi desa nya. Inovasi yang di munculkan bisa dimulai dari bunga mawar nya dan juga perah susu sapi nya yang menjadi keunggulan desa ini, agar hasilnya bisa dinikmati bagi para penduduk maupun pengunjung yang datang

Inovasi dan daya kreasi sangat diperlukan dalam pengemasan pariwisata. Keberadaan destinasi yang menarik tidaklah cukup untuk membawa wisatawan datang. Menurut Albury (2003) dalam Yogi (2008) secara lebih sederhana mendefinisikan inovasi sebagai *new ideas that work*. Ini berarti bahwa inovasi adalah berhubungan erat dengan ide-ide yang bermanfaat. Inovasi dengan sifat kebaruannya harus mempunyai nilai manfaat. Sifat baru dari inovasi tidak akan berarti apa-apa apabila tidak diikuti dengan nilai kemanfaatan dari kehadirannya. Kedatangan wisatawan itu sendiri juga tidaklah cukup jika mereka tidak

mendapatkan kepuasan saat mengunjungi destinasi. Oleh karena itu di dalam pengembangan pariwisata dan pengelolaan destinasi wisata perlu mempertimbangkan aspek kualitas pelayanan pariwisata disamping kuantitas pengunjung suatu obyek wisata. Dewasa ini perkembangan jenis dan genre pariwisata sangat beragam. Perkembangan pariwisata juga merambah ke arah pariwisata minat khusus. Keberadaan sebuah tempat yang memiliki nilai sejarah menjadi lirikan bagi wisatawan masa kini.

Di berbagai negara maju tempat tempat yang memiliki nilai sejarah yang tinggi dikemas sebagai daerah tujuan wisata. Harus dilakukan upaya untuk membantu mengembangkan produk bunga potong mawar. Upaya yang dilakukan untuk pengembangan produk ialah dengan menamabah varitas bunga potong mawar dengan kualitas bunga mawar yang lebih baik, warna mawar yang bervariasi dan menarik, ketahanan bunga mawar yang lebih lama dan memiliki tangkai yang lunak dan tanpa duri salah jenis bunga potong mawar yang sedang dikembangkan ialah jenis Marbell, Pitch, Tinneke, Black Magic dan lain-lain. Strategi ini dilakukan dengan cara menambah usaha atau produk baru yang masih berhubungan dengan usaha atau produk pada saat ini. petani dapat menerapkan usaha lain yang masih berkaitan dengan usaha pertanian bunga mawar semisal dengan mendirikan toko pertanian yang menyediakan alat pertanian, pupuk, bibit, obat dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pertanian hal ini bisa dimiliki kelompok tani ataupun milik anggota petani sendiri, usaha lain yang dapat dilakukan kelompok tani dan petani ialah dengan menjadi pengepul bunga mawar dari petani lain, selain itu kelompok

tani dan petani juga dapat membuat Toko (florist) yang dimiliki kelompok tani ataupun milik petani sendiri.

Selain itu, petani bunga potong mawar dapat menambah produk baru selain bunga potong mawar misal bunga krisan, gladiol, anggrek, gerbera, dan bunga lili. Selain itu kedepan di Desa Gunungsari akan memiliki agrowisata petik bunga mawar, maka potensi untuk mengembangkan jenis usaha akan sangat menjanjikan semisal dengan mendirikan rumah makan, memproduksi pakaian, kerajinan tangan, makanan khas desa, penginapan dirumah warga dan lain sebagainya. Hal tersebut nantinya akan membantu perekonomian masyarakat Desa Gunungsari itu sendiri.

a. Inovasi Baru Untuk Pengembangan Program Desa Wisata di Desa Gunungsari Kota Batu

1) Menciptakan Taman Bunga Untuk Rekreasi Yang Sehat

Desa Gunungsari sejauh ini masih belum menyediakan taman bunga yang dapat dimanfaatkan untuk rekreasi. Pada saat ini Desa Gunungsari hanya memiliki satu kebun bunga mawar yang dapat digunakan untuk berwisata, itu pun hanya untuk memetik mawar. Selain itu perkebunan hanya digunakan warga untuk bertani untuk menambah penghasilan saja. Selain untuk memetik mawar, dapat juga diciptakan taman bunga yang menarik agar dapat dijadikan tempat rekreasi bagi wisatawan. Keunggulan tempat ini adalah bunga potongnya, tetapi tidak ada satupun taman yang dijadikan tempat rekreasi. Suasana di Desa Gunungsari ini sangatlah indah, suasananya sangat sejuk dan dikelilingi pemandangan gunung. Dapat juga

dibangun gazebo untuk tempat bersantai sambil menikmati pemandangan Desa Gunungsari yang sangat indah dan sejuk.

2) Menciptakan taman bunga yang bisa dinikmati saat malam hari

Pada saat ini program desa wisata yang tersedia di Desa Gunungsari ini hanya bisa dirasakan pada siang hari saja. Meniru yang baik bukanlah suatu hal yang tabu, tidak perlu membangun lagi bangunan tapi tinggal memasang lampunya, tentu saja harus menjaga keamanan karena berkaitan dengan listrik. Pengaturan karcis meskipun dibedakan. Untuk karcis masuk di siang hari untuk pengunjung yang dapat memelihara bunga mawar, sedangkan kalau malam hari dimana pengunjung hanya bisa melihat lampu-lampu, maka harga karcisnya lebih murah. Dengan cara ini maka taman ini juga bisa meningkatkan pendapatannya. Desa Gunungsari dapat mencontoh dari Negara luar seperti Korea Selatan yang menjadikan kebun bunga menjadi wisata malam hari, pada malam hari kebun bunga tersebut dibentuk agar terlihat hidup dengan diiberikan lampu – lampu hias di sekitar bunga tersebut.





Gambar 4.8 : Contoh Wisata Siang dan Malam Hari “*The Garden Of The Morning Calm*” (Sumber : <http://korea.panduanwisata.id>)

The Garden Of Morning Calm merupakan Taman yang berlokasi di Sumogwon-ro, Sang-myeon, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do ini adalah taman yang dibuka sepanjang tahun di Korea. Bagi Minasan yang menyukai hobi fotografi tentu wajib ke taman ini untuk mengabadikan bunga-bunga cantik menawan. Tidak hanya bunga, di sini Minasan juga bisa menikmati segarnya pohon-pohon pinus dan gemerlap lampu warna-warni pada malam hari. Taman ini dapat menjadikan inspirasi untuk pengembangan program desa wisata di Desa Gunungsari ini agar wisatawan yang datang lebih meningkat.

3) Membangun Restoran Dengan Pemandangan Perkebunan Bunga Mawar.

Dapat dibangun restoran dengan pemandangan perkebunan bunga mawar milik warga, agar pengunjung yang datang dapat menikmati menu restoran sambil menikmati pemandangan perkebunan bunga mawar secara langsung.

Menu yang ditawarkan restoran tersebut juga bisa berasal dari tanaman-tanaman alami bunga mawar. Seperti minuman yang berasal dari bunga mawar. Sehingga pengunjung dapat benar-benar merasakan seperti benar-benar sedang menikmati bunga mawar dan suasana tersebut hanya dapat mereka nikmati di Desa Gunungsari ini. Selain itu juga dapat dipasarkan susu hasil perah sapi dimana juga yang menjadi khas dari desa Gunungsari ini.

4) Mengembangkan Wisata Air dari sumber mata air “Umbul”

Di Desa Gunungsari ini terdapat sumber mata air yang diberi nama ‘Umbul’. Mata air ini dapat dimanfaatkan untuk wisata air, seperti untuk pemandian. Di Desa ini juga belum terdapat tempat wisata yang bisa dinikmati oleh anak usia dini. Selain itu juga dapat disediakan kolam pemandian bunga mawar untuk orang dewasa. Saat ini di Kota Batu belum ada kolam pemandian Bunga Mawar, apabila diciptakan dapat menciptakan hal yang baru dan dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang datang. Untuk kedepannya dapat di buat sebuah kolam pemandian bunga mawar untuk berendam maupun bermain untuk anak kecil. Saat ini umbul tersebut tidak dimanfaatkan semestinya. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yuliati Sebagai penduduk dan pengusaha bunga Desa Gunungsari tanggal 9 Januari 2017 di Desa Gunungsari Kota Batu menjelaskan tentang Wisata di Desa Gunungsari :

“Memang kalau wisata untuk orang dewasa sudah ada, tetapi kalau untuk wisata anak usia dini masih belum ada. Harapan saya untuk kedepannya agar dibangun kolam renang di umbul sana untuk anak kecil mbak, soalnya sayang kalau tidak dimanfaatkan. Memang kalau

bunga sudah banyak, tapi masih banyak potensi lain dari Desa Gunungsari ini seperti umbul itu salah satunya, jadi kalau dimanfaatkan, anak kecil juga bisa berwisata gak cuma orang dewasa aja. Jadi tingkat wisatawan nya juga bisa meningkat.”

5) Menciptakan Program Edukasi Bunga Mawar dan Perah Sapi

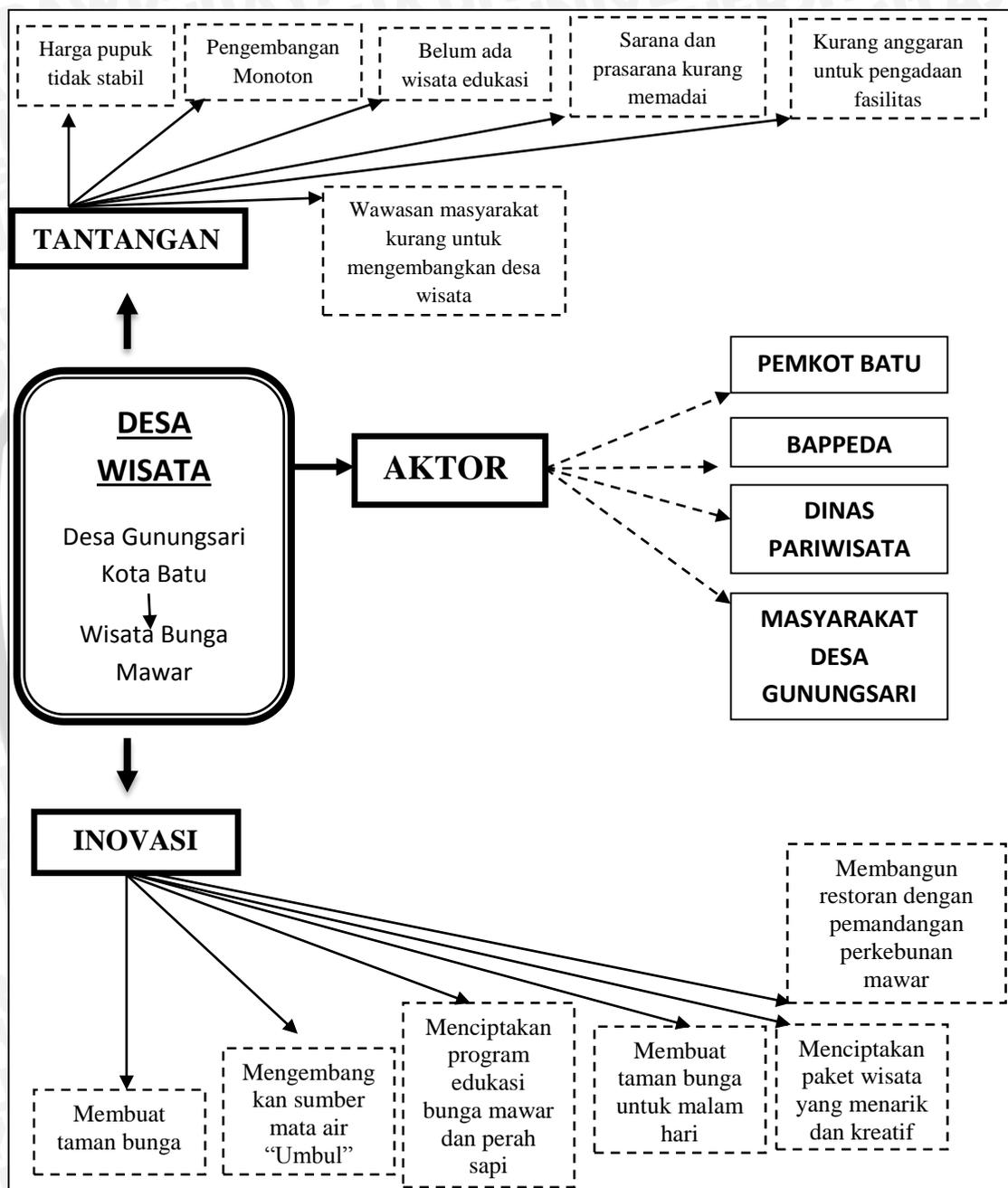
Wisata yang ditawarkan dapat lebih dikembangkan lagi, salah satunya yaitu dalam hal edukasi. Seperti yang terlihat bahwa Kota Batu sangat dekat dengan Kota Malang yang memiliki jumlah pelajar/mahasiswa yang sangat banyak, sehingga wisata edukasi akan sangat bermanfaat untuk kedepannya. Untuk kedepannya dapat di ciptakan paket petik bunga mawar yang menyediakan bagaimana proses memelihara bunga mawar, memetik mawar, dan merangkai bunga mawar. Selain itu juga dapat disediakan sertifikat bagi para wisatawan yang mengikuti program tersebut, dan juga dapat dibangun sebuah pondok yang dimana ditempat tersebut dapat menjadi tempat untuk dimana wisatawan dapat belajar bagaimana proses pemeliharaan bunga mawar. Selain itu Desa Gunungsari juga memiliki potensi dalam perah susu sapi nya. Edukasi tentang bagaimana cara menghasilkan susu yang langsung dari hewan tersebut juga dapat dikembangkan, sehingga program yang ditawarkan Desa Gunungsari dapat bermanfaat bagi pengunjung. Tentu saja semua proses tersebut juga dibutuhkan sebuah lembaga yang konkrit untuk melancarkan proses pengembangannya.

6) Menciptakan Paket Yang Menarik dan Kreatif

Menyediakan paket wisata yang menarik untuk menambah minat wisatawan. Seperti paket wisata menanam bunga, memetik bunga dan

membudidayakan bunga. Selain itu dapat juga menambah paket wisata seperti *outbound*, perah susu sapi, petik buah yang menjadi *icon* Desa Gunungsari. Selain itu juga dapat memfasilitasi desa wisata untuk melakukan marketing melalui promosi dan pameran, serta menggelar *farmtrip* atau *travelmart* dengan mengundang biro perjalanan wisata sebagai upaya promosi serta memperkenalkan seni budaya yang ada.

Warga Desa Gunungsari harus diberikan pelatihan lebih lagi agar mendapatkan pengetahuan bagaimana menjadikan usahanya lebih berkembang lagi, tidak hanya sekedar menjual bunga saja. Pelatihan sangat dibutuhkan agar para warga bisa lebih kreatif dalam menjalankan usahanya sehingga munculnya ide-ide baru untuk menjalankan usaha. Melakukan pertemuan dengan sumber daya manusia pengelola pariwisata dalam rangka mensosialisasikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola obyek wisata agar kinerja semakin meningkat serta mampu memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan.



Gambar 4.9: Skema Implementasi Pengembangan Program Desa Wisata di Desa Gunungsari Kota Batu

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi pengembangan program desa wisata di desa Gunungsari ini sudah berjalan dengan baik karena cukup meningkatkan perekonomian masyarakat, tetapi program yang ditawarkan masih belum cukup menarik dan kreatif untuk meningkatkan wisatawan.
2. Aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan program desa wisata ini antara lain Pemerintah Kota Batu, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu dan masyarakat desa Gunungsari.
3. Terdapat beberapa tantangan, yaitu tantangan nya adalah harga pupuk yang tidak stabil, pengembangan monoton dan belum adanya variasi, belum adanya wisata yang memiliki nilai untuk edukasi, sarana dan prasarana yang belum memadai seperti tidak tersedianya *homestay*, *rest area*, dan toilet umum. Selain itu terdapat jalan yang masih sulit untuk dilalui kendaraan besar. Kurangnya anggaran untuk pengadaan fasilitas, dan juga wawasan masyarakat untuk mengembangkan program desa wisata di desa Gunungsari yang masih kurang.
4. Inovasi baru dibutuhkan untuk pengembangan program di desa Gunungsari, agar para wisatawan tertarik untuk berwisata di desa Gunungsari. Sejauh ini pengembangan program wisata yang ditawarkan di desa Gunungsari ini cukup

monoton dan tidak menarik, yaitu pengunjung yang datang ke desa ini hanya bisa berjalan mengelilingi kebun dan memetik saja, selain itu tidak ada lagi wisata yang bisa dikunjungi oleh pengunjung, sehingga minat masyarakat untuk berwisata di desa wisata di desa ini sangat kurang.

B. Saran

Adapun Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Menambah pengetahuan atau wawasan masyarakat setempat bahwa keberadaan potensi daya tarik yang ada di desanya dapat berpeluang untuk dapat meningkatkan perekonomian mereka dengan desa wisata berbasis pada pelestarian lingkungan ini. Sehingga diperlukan perhatian lagi kepada masyarakat dari pemerintah dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan kemampuan untuk berkomunikasi maupun menyambut para wisatawan yang nantinya akan berkunjung ke desa.
2. Diperlukan adanya promosi lebih untuk mengenalkan desa wisata agar menjadi salah satu tujuan wisata di Kota Batu yang tidak kalah dengan wisata-wisata lain seperti wisata modern yang sudah ada. Bisa dengan cara menyediakan paket wisata sekaligus dengan wisata-wisata modern melalui brosur misalnya sehingga secara tidak langsung dapat mempromosikan lagi desa wisata ini ataupun dengan cara menyediakan situs khusus desa wisata yang lebih mudah diakses melalui internet dan kemudian desa wisata bisa lebih dikenal di para wisatawan.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan wisatawan dalam melakukan kegiatan wisata di desa Gunungsari. Seperti perbaikan jalan yang

masih kecil untuk menuju tujuan wisata, menyediakan *homestay* untuk tempat pengunjug beristirahat, dan menyediakan *rest area*, karena dengan keadaan seperti ini tentu saja dapat mempengaruhi minat wisatawan untuk berkunjung. Oleh karena itu hal ini harus menjadi perhatian pemerintah agar segera memperbaiki demi kenyamanan para wisatawan yang akan berkunjung.

4. Menciptakan inovasi untuk pengembangan program desa wisata di desa Gunungsari Kota batu. Yaitu berupa program-program yang menarik, kreatif dan destinasi wisata yang nyaman. Ada beberapa inovasi yang bisa di terapkan di desa Gunungsari ini yaitu dengan membuat taman bunga, karena di desa ini belum ada nya taman bunga yang bisa di datangi untuk rekeasi, selain itu juga bisa dibangun restoran dengan pemandangan bunga mawar, lalu mengembangkan sumber mata air “umbul”, menciptakan program edukasi untuk pemeliharaan bunga mawar dan perah susu sapi, membuat taman bunga untuk malam hari, dan menciptakan paket yang menarik dan kreatif. Maka dengan itu, diharapkan agar inovasi ini bisa diterapkan agar jumlah pengunjug di desa ini terus meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik Bandung*. Bandung : CV Alfabeta

<http://shining-batu.com> diakses pada tanggal 10 Oktober 2016

Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta : Erlangga

Kota Batu Dalam Angka. (2016). Laporan Pembangunan Pariwisata Kota Batu. Batu: BAPPEDA

Miles, M.B, Hubberman A.M., Saldana Jhony, 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Source Book*. SAGE Publication. 3 : 1 341

Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Nugroho, Riant D. 2009. *Public Policy*. Jakarta : PT. Elek Media Komputindo

Parson, Wayne. 2006. *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisa Kebijakan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta

PERMEN Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata

Priasukmana, Soetarso dan Mulyadin, MR. 2001. *Pembangunan Desa Wisata: Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah*. LIPI

Profil Kota Batu. (2014). Batu: BAPPEDA Kota Batu.

Rencana Induk Pengembangan Desa Wisata Kota Batu. (2013). *Eksekutif Summary*. Batu: BAPPEDA Kota Batu

Rencana Induk Pengembangan Desa Wisata Kota Batu. (2013). Laporan Akhir.
Batu: BAPPEDA Kota Batu

Rencana Induk Pengembangan Desa Wisata Kota Batu. (2013). Laporan Antara.
Batu: BAPPEDA Kota Batu.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu 2012-2017. (2013).
Rencana Pembangunan Pariwisata Kota Batu. Batu: Pemkot Batu

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu Tahun 2010-2030. (2010).
Kajian Akademis. Batu: BAPPEDA Kota Batu

Santosa, Budi. 2009. *Manajemen Proyek : Konsep & Implementasi*. Yogyakarta:
Graha Ilmu.

Santosa, Panji. 2009. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Governance : PT*.
Reflika Aditama

Soeharto, Iman. 1997. *Manajemen Proyek: Dari Konsep Sampai Implementasi*.
Jakarta: Erlangga

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung : Alfabeta

Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi
Keimplementasian Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara

Wardiyanta. 2006. *Metode Penelitian Pariwisata*. Yogyakarta : Andi

Yoeti, Oka A. 1983. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung : Angkasa

Zauhar, Susilo. 1993. *Administrasi Progran dan Proyek Pembangunan*. Malang:
IKIP Malang

Zuriah, Nurul. 2009. *Metodeologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta : PT.
Bumi Aksara

LAMPIRAN

1. Wawancara dengan Bapak Sariono Kepala Sub Bidang Pariwisata dan Pertanian



2. Wawancara dengan Ibu Yuliati Petani dan Pengusaha Mawar Desa Gunungsari



3. Surat Pra Riset



PEMERINTAH KOTA BATU
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Jenderal Sudirman 507 Block office Gedung B Lantai 2

KOTA BATU

Batu, 07 Oktober 2016

Nomor : 072/592/1422.207/2016
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : Ijin Survey

Kepada
 Yth. 1. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Batu
 2. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu
 3. Camat Bumiaji Kota Batu
 Di

BATU

Menunjuk surat pengantar dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Tanggal 06 Oktober 2016 Nomor : 14080/UN10.3/PG/2016 Perihal Pra Riset / Survey, bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : FIRA KATILLA
 NIM : 13503010111164
 Jurusan : Administrasi Publik
 Fakultas/Universitas : FIA / Universitas Brawijaya Malang
 Alamat : Jl. Veteran Malang

Bermaksud mengadakan Ijin Survey pada Instansi yang Saudara pimpin dengan ketentuan sebagai berikut :

- Judul : Implementasi Program Desa Wisata Di Desa Gunungsari Kota Batu Dengan Pendekatan Masyarakat (Studi Pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Batu)
- Data Yang Dicari : 1. Presentase program desa Gunungsari (tingkat pencapaian)
 2. Tentang program desa wisata di Desa Gunungsari Kota Batu
- Lokasi : 1. BAPPEDA Kota Batu
 2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu
 3. Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji Kota Batu
- Peserta : -
- Waktu : 10 Oktober 2016 s.d 10 November 2016

Selama melakukan kegiatan wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dan melaporkan secara tertulis hasil kegiatannya kepada instansi setempat. Demikian untuk menjadikan maklum.

An. WALIKOTA BATU
 KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATU



4. Surat Riset



PEMERINTAH KOTA BATU
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Jenderal Sudirman 507 Block office Gedung B Lantai 2

KOTA BATU

Batu, 15 Nopember 2016

Nomor : 0721/2008/1422.207/2016
 Lampiran : -
 Perihal : Ijin Penelitian

Kepada
 Yth. 1. Kepala Badan Perencanaan Dan
 Pembangunan Daerah Kota Batu
 2. Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
 Kota Batu
 di

BATU

Menunjuk surat pengantar dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Tanggal 09 Nopember 2016 Nomor : 16939/UN10.3/PG/2016, bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : FIRA KATILLA
 NIM : 135030101111164
 Jurusan : Administrasi Publik
 Fakultas/Universitas : FIA/Universitas Brawijaya Malang
 Alamat : Jl. MT Haryono 163 Malang

Bermaksud mengadakan Ijin Penelitian pada Instansi yang Saudara pimpin dengan ketentuan sebagai berikut :

Judul : Implementasi Pengembangan Program Desa Wisata Di Desa Gunungsari Kota Batu (Studi Kasus Pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kota Batu)
 Data yang dicari : Tentang desa wisata di Desa Gunungsari Kota Batu
 Lokasi : 1. Bappeda Kota Batu
 2. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Batu
 Peserta : -
 Waktu : 15 Nopember 2016 s/d 15 Januari 2017

Selama melakukan kegiatan wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dan melaporkan secara tertulis hasil kegiatannya kepada instansi setempat.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. WALIKOTA BATU
 KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK KOTA BATU



THOMAS MAYDO, S.Sos
 Pembina

